

Dra. Rahmawati, MA

Perspektif Baru dalam Proses Penyebaran Islam
di **KERAJAAN BONE**
Sulawesi Selatan

**Analisis Sejarah tentang Musu Selleng
Pada Tahun 1606-1640**



**PERSPEKTIF BARU DALAM PROSES
PENYEBARAN ISLAM DI KERAJAAN
BONE SULAWESI SELATAN**

(Analisis Sejarah tentang Musu Selleng
Pada tahun 1606-1640)

Dra, Rahmawati, MA.



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

**PERSPEKTIF BARU DALAM PROSES PENYEBARAN
ISLAM DI KERAJAAN BONE SULAWESI SELATAN**
(Analisis Sejarah tentang Musu Selleng
Pada tahun 1606-1640)

Penulis:

Dra, Rahmawati, MA.

Editor:

Asrul Muslim, S.Ag.,M.Pd.

Cetakan: I 2014

viii + 208 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-237-881-5

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa

SAMBUTAN REKTOR

Jika engkau ingin meng"abadi", maka tinggalkanlah "Legacy"

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah *legacy* yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang "menyejarah". Hanya sebagian kecil anak manusia yang mampu menghadirkan dan meng"abadi"kan dirinya dalam garis lingkaran lintasan sejarah.

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil Anwar berkata: *"Aku ingin hidup seribu tahun lagi"*.

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi *legacy*. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih

dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi amal jariah di "alam sana".

Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap dosen mampu melahirkan "legacy" dalam catatan kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. Gerakan ini diharapkan menjadi "trigger" untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN Alauddin Makassar. Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya.

Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya "iqra/baca" dan "al-qalam/pena". Karena itulah, UIN sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya "baca-tulis" pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan Tuhan.

Samata, 2 Oktober 2014
Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang memiliki seluruh ilmu pengetahuan dan yang telah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Shalawat dan do'a semoga dicurahkan pada Baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah memberikan teladan dalam menindak lanjuti amalan ilmu, dengan memerintahkan ummatnya untuk menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai kelian lahat, bahkan sampai ke negeri China sekalipun. Dengan Selesainya buku ini disusun merupakan salah satu bentuk perwujudan dalam menggali dan mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang sejarah Islam.

Materi sejarah Islam yang penulis temukan dalam Proses penyebarannya mempunyai Perspektif baru, yaitu dengan adanya penyebaran Islam yang dilakukan kerajaan Gowa terhadap kerajaan Bone Yang dilandasi dengan peperangan (*Mususelleng*). Materi ini adalah merupakan suatu pembahasan disamping sangat kompleks juga unik dan sangat penting, karena selama ini yang dibahas adalah penyebaran Islam secara damai dengan berbagai jalur-jalur dengan melalui perdagangan, perkawinan, ilmu pengetahuan, kesenian dan lain sebagainya.

Buku ini diawali dengan penyebaran Islam di Indonesia secara umum. Kemudian secara terperinci diikuti dengan uraian proses penerimaan Islam Kerajaan Bone pada tahun 1606-1640. Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi

kejelasan dalam proses penyebaran Islam Indonesia secara umum dan Kerajaan Bone pada khususnya.

Terima kasih yang tulus disampaikan kepada segenap Civitas UIN Alauddin yang telah memberikan kesempatan dalam penerbitan buku ini juga pada semua keluarga dan kerabat yang meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian penulisan buku ini, saya juga menyampaikan terima kasih. Seandainya buku ini mengandung sesuatu yang berharga, mohon untuk dikembangkan. Tetapi bila terjadi sebaliknya yang mempunyai kesalahan dan segala kekurangan, semoga dapat di perbaiki dan di sempurnakan.

Makassar, 24 Oktober 2013

Penulis

Dra. Rahmawati, MA.

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 PENYEBARAN ISLAM DI INDONESIA

A. Pusat-pusat Penyebaran.....	23
B. Pola Penyebaran.....	37
C. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.....	52
1. Peranan Tokoh-tokoh Islam dalam Penyebaran.	52
2. Proses Masuknya Islam di Kerajaan Gowa (Sulawesi Selatan).....	60

BAB 3 KONTEKS SOSIAL POLITIK KERAJAAN BONE

A. Asal-Usul Lahirnya Kerajaan Bone.....	77
B. Kebudayaan dan Kepercayaan dalam Domain Masyarakat Bone pada masa Pra Islam.....	86
1. Stratifikasi Sosial.....	86
2. Bahasa dan Kesusasteraan	91
3. Kepercayaan.....	98
C. Hubungan dan Persaingan dengan Kerajaan-kerajaan Lain.....	101
1. Domain Kerajaan Tallo.....	101
2. Tri Aliansi <i>Tellumpocco</i> E Kerajaan Bugis (Bone- Soppeng-Wajo)	105

BAB 4 PENYEBARAN ISLAM DI KERAJAAN BONE

A. Gowa Sebagai Pusat Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan	113
B. Proses Penyebaran Islam di Kerajaan Bone.....	115
1. Himbauan Raja Gowa	115
2. Penolakan Raja Bone.....	116
3. Peperangan (<i>Musu Selleng</i>)	119
C. Raja Bone Masuk Islam.....	126
D. Usaha-usaha Penganjur Agama Islam di Kerajaan Bone	131

BAB 5 PENYEBARAN ISLAM PADA DOMAIN SOSIAL POLITIK DI KERAJAAN BONE

A. Penyebaran Islam dalam Struktur Kerajaan Bone...	
1. Penyebaran Agama Islam di Kerajaan Bone.....	138
2. Struktur Kerajaan Bone	139
3. Pengaruh Islam dalam Struktur Kerajaan.....	146
B. Pranata Islam dalam Pangngadereng.....	150
1. Kearifan Budaya dalam Penyebaran Agama Islam.	150
2. Pranata Islam dalam Pangngadereng	155
3. Islam dalam kehidupan Sosial.....	161
C. Kedudukan dan Posisi Raja dalam Penyebaran Islam	169

BAB 6 Penutup

A. Kesimpulan.....	179
--------------------	-----

Lampiran-Lampiran	201
-------------------------	-----

Riwayat Penulis	208
-----------------------	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

Hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah telah ada sejak zaman sebelum kedatangan Islam. Keadaan ini merupakan hasil dari perdagangan Arab dan Persia dengan Dinasti Cina, karena Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal-kapal Arab dan Persia yang berdagang ke Cina, bahkan hubungan antara kedua wilayah ini jika dikaji lebih lanjut melibatkan sejarah yang panjang, yakni bermula sejak masa Phunisia dan Saba. Selanjutnya, hubungan antara kaum Muslimin di kawasan Melayu-Indonesia dan Timur Tengah telah terjalin sejak masa awal Islam. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia dan Anak Benua India yang mendatangi Kepulauan Nusantara tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat.

Penyebaran Agama Islam merupakan proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Terlepas dari perbedaan pendapat yang bisa dijadikan patokan tentang kapan, mengapa dan bagaimana penduduk Indonesia tepatnya mulai menganut Agama Islam, agaknya relevan untuk dikemukakan pendapat Arnold (1968: 367), bahwa Islam telah dibawa oleh muballigh-muballigh Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 M. Setelah abad ke-7 Agama Islam mulai berkembang di kawasan ini. Selanjutnya antara abad ke-16 sampai abad ke-17 hampir seluruh kepulauan di Indonesia telah memeluk agama Islam. Dengan demikian, penyebaran Islam kesemua daerah di Indonesia tidaklah berlangsung secara bersamaan.

Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berbeda. Kedatangan Islam di Sulawesi

Selatan, misalnya, agak terlambat dibanding dengan kawasan lain di Indonesia (Pelras, 1996: 167). Seperti, Islam masuk dan tersebar di Palembang pada tahun 1440 (Textbook, 1993:107) sedangkan di Sulawesi Selatan, adalah diterimanya Islam menjadi agama resmi Kerajaan Gowa Pada tahun 6105. Namun, sekarang Islam justru telah menjadi identitas dua etnik besar di Sulawesi Selatan yaitu Bugis dan Makassar, Bone adalah salah satu Kerajaan Bugis yang terbesar di Sulawesi Selatan yang mempunyai prespektif baru dalam penyebaran Islam yang belum di temukan selama ini.

Golongan pembawa agama Islam ke Indonesia tidak hanya terbatas pada orang-orang yang berasal dari luar Indonesia. Banyak bukti bahwa orang Muslim bangsa Indonesia juga melakukan penyebaran agama Islam. Contoh mengenai hal ini, disebutkan bahwa para penyebar Islam pertama di Sulawesi Selatan, yang dikenali dengan nama *Datuk Tellua*, yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal bergelar Dato 'ri Bandang, Sulaiman Khatib Sulung bergelar Dato' Pattimang dan Khatib Bungsu bergelar Dato ri Tiro dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Islam ke daerah Sulawesi Selatan. *Datuk Tellua* tersebut memilih strategi pendekatan struktural dengan mendekati para elit kerajaan seperti yang berlangsung di Kerajaan-Kerajaan Luwu, Gowa, Tallo dan kerajaan lain di Sulawesi Selatan.

Melalui pendekatan struktural *Datuk Tellua* itu, maka Raja Gowa dan Tallo memeluk Islam. Raja Tallo I Malingkang Daeng Nyonri, di samping sebagai raja Tallo, beliauapun merangkap sebagai Tumabbicara Butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa. Setelah memeluk agama Islam, I Malingkaang Daeng Nyonri bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam. Raja Gowa I Manggarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin, secara resmi masuk agama Islam pada malam Jumat tanggal 22

September 1605 M./9 Jumadil Awal 1015 H. Setelah itu dalam mendakwahkan Islam, pendekatan formal lebih bersifat struktural dalam menyebarkan agama Islam seperti dilakukan oleh Sultan Alauddin ketika mendekritkan Gowa sebagai Kesultanan Islam. Dekrit ini diumumkan setelah sholat Jumat pertama di Tallo yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Dalam peristiwa itu Sultan Alauddin memerintahkan, "*Nassaba ia anne alloa sallangmi Karaenge, ia ngaseng to Mapparasanganku sallang to mako*" (bahwa pada hari ini raja telah menganut agama Islam, maka semua rakyatnya juga masuk Islam semua). Peristiwa itu berlangsung pada 9 Nopember 1607 M/9 Rajab 1016 H.

Setelah mendekritkan Gowa dan Tallo Kerajaan Islam dan raja-raja telah memperoleh gelar sultan, maka kerajaan itu juga menjadi pusat Pengislaman di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin mengeluarkan seruan kepada para penguasa pemerintah lain agar menerima agama Islam. Seruan itu dikatakan telah didasarkan pada perjanjian (ulu ada) sebelumnya, bahwa setiap penguasa yang menemukan suatu jalan baru, dan lebih baik, berkewajiban memberi tahu para penguasa lainnya tentang temuannya. Seruan pengislaman diterima oleh beberapa kerajaan kecil dengan baik sehingga berlangsunglah pengislaman di tempat-tempat itu dengan damai akan tetapi di kerajaan Bone menolak ajakan tersebut dengan keras sehingga Gowa menyatakan perang. Perang itu dinamakan oleh orang Bugis "Musu Sellang" (perang agama Islam).

Pada tahun 1607 Gowa mengirim pasukan wilayah kerajaan Bugis namun dapat dikalahkan oleh laskar-laskar kerajaan Bugis. Walaupun demikian tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 1611 tanah Bone berjaya ditakluk. Dengan menyerahnya Bone pada tahun 1611, maka sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan telah memeluk agama Islam,

kecuali Tanah Toraja. Raja Bone yang pertama-tama memeluk Islam ialah raja Bone ke 12, yaitu La Tenri Pale, Matinroe ri Tallo pada 23 Ramadhan 1021 H/1610 (Abdullah, 1983: 245). Setelah La Tenri Pale memeluk agama Islam, beliau berangkat ke Gowa untuk mempelajari agama Islam kepada Khatib Tunggal Datuk ri Bandang.

Setelah Kerajaan Bone resmi menerima Islam pada tahun 1611 M. maka proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Bone dengan pendekatan formal yaitu secara *top down* mempunyai kelebihan, yaitu penyebaran Islam boleh berlangsung lebih cepat. Menurut Mattulada (1995: 70) penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dengan pendekatan formal hanya berlangsung empat tahun, yaitu dari 1607 sampai tahun 1611. Agaknya, itu sebabnya sehingga pendekatan ini bukannya tidak memiliki kelemahan. Kelemahannya, penerimaan Islam menjadi formalitas, yaitu sekalipun penduduk sudah menerima Islam, tetapi juga masih terdapat banyak pelanggaran terhadap ajaran Islam itu sendiri. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pendekatan formal dilengkapi dengan seperangkat sistem dalam struktur pemerintahan yang banyak berpengaruh pada pembentukan watak orang Bugis.

Terlepas dari kelemahan tersebut, secara formalistik nilai-nilai dan kebudayaan Islam telah masuk ke dalam struktur pemerintahan, seperti nilai-nilai adat yang disebut *panngadakkang/panggadderang* dilebur bersama-sama dengan nilai-nilai agama yang disebut dengan *Sara'* karena itulah, pelanggaran terhadap nilai-nilai agama akhirnya identik dengan pelanggaran terhadap adat. Integrasi ajaran Islam ke dalam adat istiadat yang menyebabkan sendi-sendi adat-istiadat dan kehidupan masyarakat menjadi sebagai berikut: *ada, rapang, wari, bicara* dan *sara*. (Mappangara, 2003: 13). Dengan demikian dimulailah proses sosialisasi Islam ke dalam struktur kerajaan dan kehidupan masyarakat.

Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara dilakukan secara damai. Atas dasar ini, maka tesis ini berusaha merekonstruksi proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan yang dikhususkan pada satu kajian atas Kerajaan Bone, 1606-1640. Konsekuensi logis dari hal ini, maka tulisan ini akan memperhatikan lebih mendalam proses penyebaran Islam di zona Makassar dan Bugis, dimana proses penyebaran Islam berlangsung damai tanpa melalui peperangan sebaliknya pola pengislaman di Kerajaan Bone justru melalui jalan perang yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa disebabkan resistensi yang menguat di kerajaan yang tergabung dalam Kerajaan Tellumpoccoe adalah merupakan koalisi dari tiga kerajaan atau Tri Aliansi kerajaan yang terdiri dari (Bone-Soppeng-Wajo). Akan tetapi yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah khusus Kerajaan Bone. Peran kunci Bone dalam sejarah juga terlihat pada literatur islamisasi di Jazirah Sulawesi, di mana Bone menjadi salah satu pelaku penting terhadap proses islamisasi itu, misalnya dengan hadirnya Lontara Latoa yang menjadi rujukan terpenting terhadap jejak sejarah implementasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Dalam sejarah islamisasi, dikenal istilah *musu selleng* karena penolakan Bone terhadap politik islamisasi yang dilancarkan Kerajaan Gowa. Selanjutnya Bone kemudian menjadi penganut kerajaan Islam yang taat.

Ketiga kerajaan atau tri aliansi Kerajaan Bone-Soppeng-Wajo masuk Islam setelah di taklukkan oleh Kerajaan Gowa secara bertahap yakni di Wajo pada 1610, Sidenreng dan Soppeng tahun 1609, sedangkan Bone 1611. Dengan demikian langkah strategis sekaligus taktis dalam penyebaran Islam di kerajaan Bone dengan terlebih dahulu masuk ke dalam lingkaran politik dan militer dianggap selesai setelah Kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Atas dasar tersebut di atas, maka perlu dilakukan analisis dalam buku ini untuk menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Islam di Kerajaan Bone yang mempunyai presfektif baru yang disertai dengan penaklukan yang populer dikatakan *Musu Selleng* Sebab, Informasi yang ada tentang penyebaran Islam di Kerajaan Bone, hanya menguraikan sebagai bahagian daripada mata rantai penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, sehingga belum terungkap secara utuh.

Selain hal tersebut di atas juga disebutkan bahwa proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terdapat dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan formal dan pendekatan budaya. Kedua pendekatan ini dilakukan secara bergantian dalam sejarah bahkan dalam tempo tertentu digunakan secara serentak. Namun, dengan kedua pendekatan tersebut belum diperoleh adanya hasil penelitian yang menyatakan secara terperinci tentang proses penyebaran Islam. Untuk mengetahui hal ini, perlu adanya tulisan khusus yang menjelaskan tentang proses penyebaran Islam tersebut.

Dalam membahas penyebab yang mendorong terjadinya perang pengislaman yang dalam lontara Bugis tercatat sebagai *Musu' Selleng*, maka dapat dibedakan antara "sebab langsung" dan "sebab tidak langsung". Menurut Louis Gottschalk, "sebab langsung" bukanlah sebab yang sesungguhnya; sebab langsung hanyalah merupakan suatu titik dalam suatu peristiwa yang sekaligus menjadi pemicu dari penyebab yang sesungguhnya atau "sebab tidak langsung". Dengan demikian, dalam hubungannya dengan Islamisasi Kerajaan Gowa terhadap perikatan Tellumpocoe, *Musu Selleng* merupakan "sebab langsung" sedangkan "sebab tidak langsung" adalah keinginan Gowa, Sultan Alauddin, untuk menjadikan Gowa sebagai kerajaan yang kuat dari segi ekonomi dan politik.

Meskipun demikian dampak perang tersebut sangat menguntungkan dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, sebab ia diiringi dengan pengislaman terhadap raja-raja dan elit kerajaan yang ditaklukkan. Dengan asumsi bahwa kalangan publik kerajaan secara berangsur-angsur akan mengikuti rajanya menjadi pengikut yang setia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa musu aselleng yang menyertai proses islamisasi di Kerajaan Bone, tidak hanya dilatari oleh penolakan Bone atas ajakan Kerajaan Gowa-Tallo untuk menerima Islam secara damai, tetapi juga tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi dalam rangka persaingan dan perebutan hegemoni di Sulawesi Selatan. Penolakan itu menjadi alasan bagi Gowa-Tallo untuk memerangi Bone. Namun pada penghujung peperangan itu, Bone mengalami kekalahan sehingga harus menerima kenyataan menerima Islam tahun 1611 dan tunduk di bawah kekuasaan Gowa-Tallo.

Tentang peperangan yang terjadi antara Gowa dalam proses penyebaran Islam di kerajaan Bone maka dalam penulisan ini akan di terangkan lebih cermat, sebab konsepsi dasar ajaran Islam tidak boleh memaksakan penerimaan ajaran Islam.

Dengan demikian, dalam tulisan ini akan mencari jawaban lebih terperinci dan sedapat mungkin mendekati kebenaran sejarah tentang proses penyebaran Islam di kerajaan Bone Sulawesi Selatan yang mempunyai perspektif baru yang dilalui atas penaklukan, sehingga terjadi perang pengislaman (Musu Selleng).

Dari pernyataan masalah penyelidikan di atas, ada beberapa persoalan kajian yang akan di jawab dalam buku ini, yaitu:

1. Mengapa proses penyebaran Islam di Kerajaan Bone menimbulkan peperangan dengan Kerajaan Gowa?

2. Apa alasan Kerajaan Bone menolak seruan Islam Raja Gowa?
3. Mengapa rakyat dapat menerima Islam setelah raja mereka kalah dalam peperangan?
4. Mengapa proses penyebaran Islam di Kerajaan Bone berlangsung cepat setelah di taklukan oleh Kerajaan Gowa?
5. Bagaimana pengaruh penyebaran Islam pada domain sosial-politik Kerajaan Bone, 1606-1640?

Dari rumusan persoalan pokok dan sub masalah di atas, maka dapat dipertegas bahwa tulisan ini berusaha mengungkapkan tentang perspektif baru dalam proses penyebaran Islam di kerajaan Bone Sulawesi Selatan 1606-1640, yaitu pada masa pemerintahan La Tenri Pale, Matinroe ri Talloq (1606-1631) dan La Maddaremmeng, Matinroe ri Bukaka (1631-1640). Pada ke dua raja ini, dengan mempertimbangkan watak dari problem-problem yang ditimbulkan dan konteks respons yang diberikan maka periode yang dikaji ini dipandang sebagai periode paling menentukan dalam proses penyebaran dan perkembangan Islam pada masa-masa selanjutnya.

Perjalanan sejarah Islam di Indonesia telah berlangsung berabad-abad, tetapi dari perjalanan yang panjang itu tidak begitu banyak hal yang bisa terungkap. Sejarah Islam lokal, terutama pada abad ke-16 dan 17 M. masih bersifat umum. Rincian data tentang berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan khususnya Kerajaan Bone, masih sangat minim. Padahal selain Kerajaan Luwu dan Gowa, Kerajaan Bone juga merupakan salah satu kerajaan yang paling besar pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Ketiga kerajaan tersebut dikenal sebagai kerajaan Cappagala'e dalam buku ini mengungkapkan implikasi yang ditimbulkannya dalam domain sosial politik Kerajaan Bone.

Pengkhususan Kerajaan Bone didasarkan atas pertimbangan bahwa Kerajaan Gowa dikenal sebagai kerajaan pertama yang menerima Islam sebagai agama resmi sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Proses pengislaman di Sulawesi Selatan dapat dianggap selesai setelah Kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 1611. Jadi dalam buku ini akan sampai pada satu penulisan yang utuh dalam memahami sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Ada beberapa hal menarik dalam membicarakan proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, yaitu: Pertama, agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya, seperti Pesisir Utara Jawa, Kalimantan Selatan bahkan Ternate yang letaknya jauh ke Timur telah menerima Islam, ketika putra Zaenal Abidin diangkat menjadi Sultan Ternate Pada tahun 1486 sekembalinya mengikuti pesantren Giri di Jawa Timur. Kedua, adalah sesuatu yang amat mengherankan agama Islam telah berkembang pesat di kawasan Barat Indonesia pada abad ke-15 yang memerlukan waktu kurang lebih 100 tahun untuk sampai ke Sulawesi Selatan. Ketiga, peranan yang dimainkan Kerajaan Gowa dalam proses penyebaran Agama Islam di Sulawesi Selatan termasuk penyebarannya di Kerajaan Bone yang dalam Lontarak dikatakan sebagai *Musu Selleng*, perang pengislaman. Pengislaman di Sulawesi Selatan dapat dianggap selesai setelah Kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Penerimaan Islam sebagai agama resmi kerajaan merupakan titik awal penyebaran Islam dalam domain politik dan sosial.

Dalam buku ini diharapkan pula dapat menjadi bahan komparasi bagi kajian yang sama dimasa akan datang, dan diharapkan pula dapat menambah pembendaharaan rujukan sejarah Islamisasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Banyak karya yang sudah ditulis mengenai Islam di Sulawesi Selatan, baik oleh para sarjana Indonesia sendiri maupun sarjana asing. Beberapa di antara karya yang terpenting adalah seperti berikut:

1. H. Andi Rasdiyanah (1995) dalam disertasinya, Integrasi sistem Pangngaderreng (Adat) dengan sistem Syariat sebagai pandangan hidup orang bugis dalam Lontarak Latoa. Dalam tulisannya mengemukakan tentang hubungan Adat setempat dengan pengaruh Islam, bahwa pengaruh Islam dengan pandangan budaya setempat sukar dipisahkan karena berlaku pembauran di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sikap dinamik, masyarakat Sulawesi Selatan. A. Ras juga mengemukakan adanya pengaruh budaya setempat karena ajaran orang terdahulu mempunyai banyak kebersamaan dengan ajaran Islam terutama ajaran moral dan lain-lain. Berkaitan dengan kajian ini sangat membantu dalam mengungkap tentang Akulturasi kebudayaan dalam proses islamisasi di Kerajaan Bone pada abad ke 17.
2. Mattulada, menulis karya biografi yang bermanfaat mengenai antropologi politik suku bugis, "Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis" yang semula merupakan disertasi doktor pada Program Universiti Indonesia tahun 1975 diterbitkan untuk pertama kalinya dengan tajuk yang sama oleh Gadjah Mada University press tahun 1985. Melalui Abstraksi Latoa ini, Mattulada melukiskan Kerajaan Bugis - Bone pada masa silam, dan membandingkannya dengan keadaan sekarang, melalui pendekatan antropologi. Melalui telaahan ini Mattulada menggambarkan kedudukan, peranan dan jalan fikiran serta sikap hidup orang bugis dalam bernegara sebagai kegiatan politik yang diungkapkan dalam Latoa.

3. Ahmad M. Sewang menulis, "Islamisasi Kerajaan Gowa (Pertengahan Abad XVI sampai Pertengahan Abad XVII) yang semula merupakan disertasi doktor pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) - sekarang UIN - Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997 yang tahun 2005 dipublikasikan dengan judul Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII). Tulisan yang menonjol dari M. Sewang ini bahwa pola islamisasi Kerajaan Gowa adalah melalui penukaran kraton atau pusat kuasa, yaitu bermula dengan masuknya Islam Raja Gowa dan Tallo yang kemudian disusul oleh rakyatnya.
4. Christian Pelreas (2006) dalam bukunya "Manusia Bugis" membicarakan tentang manusia Bugis dalam pelbagai aspek. Bahagian pertama tulisannya mendeskripsikan tentang pembentukan identitas Bugis bermula dari prasejarah Bugis, perdaban awal, kebangkitan kerajaan Bugis, hingga hegemoni kuasa agama dan kuasa. Pada bahagian inilah sangat penting untuk dikaji dalam memperkaya khazanah sejarah Islamisasi di Bone.

Beberapa tulisan di atas belum memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam kajian ini. Namun tulisan di atas dapat membantu dalam mencari sumber rujukan yang akan digunakan dalam tulisan ini. Kajian ini berusaha mengungkapkan tentang perspektif baru dalam proses penyebaran Islam di kerajaan Bone Sulawesi Selatan pada tahun 1606-1640 yang ditandai dengan adanya peperangan yang popular disebutkan *Musu Sellang* (perang Islam) dan mengungkap adanya akulturasi budaya lokal dan juga berusaha menjabarkan tentang pengaruh penyebaran Islam pada domain sosial-politik ke atas Kerajaan Bone. Dalam konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini

sebahagian terus dibangunkan dengan mendapat warna-warna Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan "akulturasi budaya", antara budaya lokal dan Islam.

Berdasarkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia yang mempunyai tiga konsep pengertian tentang masuknya Islam di suatu daerah, yang tersangkut paut dengan keadaan umum pada masa itu, yakni berhubungan perdagangan antar daerah dan keadaan sosio-politik dalam kerajaan-kerajaan feodal yang telah ada dalam daerah itu. Mengenai konsep masuknya Islam di suatu daerah, menurut Andi Rasdiyanah Amir (1982: 27) dapat mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Datangnya untuk pertama kali seseorang yang beragama Islam dari luar masuk ke daerah itu.
2. Adanya penduduk setempat yang mula-mula menerima agama Islam.
3. Penerimaan agama Islam untuk pertama kali oleh suatu kerajaan yang kemudian disusul dengan proses islamisasi.

Penerimaan Islam untuk pertama kali oleh suatu kerajaan, mula-mula seorang raja memeluk agama Islam dan menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi kerajaan dan menjadikannya sebagai pusat mengislaman, dengan memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan politik untuk melakukan islamisasi di daerah sekitarnya. Dikemukakan bahwa islamisasi sebagai suatu proses yang tidak pernah berhenti. Oleh karenanya, Islamisasi yang berlangsung hingga kini dapat diklasifikasikan dalam beberapa fase sebagaimana yang diformulasikan oleh J. Noorduyn (1975: 258) dalam tiga tahap. Pertama; sejak datangnya agama Islam. Kedua; penerimaan agama Islam. Ketiga; penyebaran agama Islam. Islamisasi dapat dipetakan dalam beberapa domain. Pertama; dengan penerimaan Islam melalui penukaran dengan jalan perpindahan agama atau

kepercayaan yang dianut sebelumnya kepada agama Islam khususnya ke wilayah pedalaman. Kedua; boleh di kategorikan islamisasi melalui jalur politik, yang disebut secara khusus sebagai tahap pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam. (Mukti Ali, 1970:13). Ketiga; Islamisasi dengan mengajukan pola sosial budaya, yaitu: perubahan yang berlaku secara adaptif atau penyesuaian secara berperingkat dari budaya pra-Islam kepada agama Islam.

Berkaitan dengan hal di atas maka tulisan dalam buku ini tentang "Perspektif baru dalam Proses Penyebaran Islam di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan Atas Perang Pengislaman (Musu Selleng) oleh Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bone, 1606-1640" akan menggunakan teori yang dikembangkan oleh J. Noorduyn. Dalam konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini sebahagian terus dibangun dengan mendapat warna-warna Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan "akulturasi budaya", antara budaya lokal dan Islam.

Hubungan antara para penyokong dua kebudayaan yang berbeda dalam masa yang lama menyebabkan berlakunya akulturasi, yang mencerminkan adanya pihak pemberi dan penerima (Robert: 1993: 402). Di dalam proses itu berlaku percampuran unsur-unsur kedua-dua kebudayaan yang bertemu. Mula-mula unsur-unsur tersebut masih boleh dikenali dengan mudah, tetapi lama-kelamaan akan muncul sifat-sifat baru yang tidak ada dalam kebudayaan induknya upanya proses seperti yang diterangkan di atas berkali-kali terjadi di Indonesia, termasuk ketika Islam masuk dan berkembang di Indonesia.

Pertemuan dan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha, Prasejarah, dan Islam (kemudian juga kebudayaan

Barat) berlaku dalam jangka masa yang panjang, dan berperingkat. Tidak dinafikan bahwa selama itu tentu terjadi ketegangan dan konflik. Akan tetapi hal tersebut adalah sebahagian daripada proses menuju akulturasi.

Faktor pendukung terjadinya akulturasi adalah persamaan dan kelenturan kebudayaan pemberi dan penerima, dalam hal ini kebudayaan Islam dan pra-Islam. Salah satu contohnya adalah bangunan masjid. Akulturasi juga mencetuskan kreativiti seniman, sehingga tercipta hasil-hasil budaya baru yang sebelumnya belum pernah ada, juga *way of life* baru. Setelah mengetahui bahwa terjadi akulturasi dan perubahan sehingga terbentuk kebudayaan Indonesia-Islam, maka perlu dipikirkan bagaimana pengembangannya pada masa kini dan masa akan datang.

Proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu melalui tiga tahap: 1) kedatangan Islam; 2) penerimaan Islam dan 3) penyebaran selanjutnya. J. Noorduyn (1975: 258). Teori islamisasi dari J. Noorduyn ini akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis islamisasi di Kerajaan Bone. Proses masuknya Islam ke Indonesia merupakan faktor penting yang menimbulkan keunikan budaya Islam di Indonesia. Islam tidak datang melalui penaklukan, seperti di beberapa kawasan-kawasan lain. Adapun yang terjadi adalah satu proses untuk saling memahami antara para pembawa Islam dengan masyarakat Indonesia, sebelum akhirnya memutuskan menganut Islam. Sedangkan dalam proses saling memahami, membolehkan budaya pra-Islam yang masih boleh ditemui pada masa Islam. Tetapi tentu saja dengan bentuk yang diubah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hingga akhirnya kita mengenal selamatan dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengembangkan teori J. Noorduyn di atas maka untuk lebih mendalami bagaimana pola penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raja

Bone setelah agama Islam diterima sebagai kepercayaan baru oleh masyarakat Bone maka akan digunakan peranan penguasa dalam islamisasi.

Uka Tjandrasasmita (1986: 24) mengemukakan tentang peranan raja dalam penyebaran Islam sebagai berikut: *"If their governous and nobles adopted a new religion, they would readiliy follow, as in their tradition in different degrees their kings or sulthans were regarded as divine representativies in this world"* Dari teori yang dikemukakan oleh Uka Tjandrasasmita ini, maka kata kunci dari kerangka konseptual dalam kajian ini adalah kedudukan raja yang begitu strategik dengan pendekatan formal yang *top down*, sehingga memudahkan untuk menyebarkan agama baru sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Sewang bahwa raja memiliki kedudukan yang diberikan adat sebagai wakil Tuhan di bumi .

Aplikasi teori di atas bila dikaitkan dengan konsep *To Manurung* dari masyarakat Bugis-Makassar. *To Manurung*, sebagai yang dikemukakan oleh Mattulada, ini bermakna orang yang turun dari kayangan untuk mencipta keamanan di Bumi. Jika di Kerajaan Gowa, *To Manurungnya* adalah seorang wanita, di Kerajaan Bone *To Manurung* adalah seorang laki-laki. Dalam silsilah Raja Bone tercatat Raja pertama kerajaan Bone adalah *To Manurung*, yang bergelar *Mata-Silompo'E, Manurung ri Matajang*.

Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan mendalam tentang fokus penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Biklen yang menyatakan bahwa: *Qualitative researchers are concerned with process rather than simply with outcomes or product* (Bogdan, 1992: 31). Proses dalam hal ini merupakan kegiatan penyelidikan dengan fokus kajian dalam kajian ini berorientasi pada masa lampau, maka kaedah pelaksanaan kajian menggunakan

kajian sejarah (*Dirasat tārīkhīyyah*), artinya prosedur kajian sejarah (*historical research*) dalam pendekatan realiti perspektif proses penyebaran Islam di kerajaan Bone Sulawesi Selatan pada tahun 1606-1634 benar-benar boleh dilaksanakan. Olehnya itu, kajian sejarah yang pada dasarnya adalah kajian terhadap sumber-sumber sejarah, merupakan implementasi dari tahap aktiviti yang termasuk dalam kaedah sejarah (*histotical method*), yaitu: Heuristik (kegiatan menghimpun jejak-jejak pada masa lampau); kritik sumber (menyiasati apakah jejak-jejak sejarah itu sejati, baik bentuk maupun isi kandungannya); tafsiran (menetapkan makna yang saling berkaitan dari fakta-fakta yang diperolehi dan penyajian ialah menyampaikan sintesa yang diperolehi dalam bentuk suatu kisah, pada tahap inilah yang merupakan histiografi (Notosusanto, 1978: 36-43). Tahap aktiviti yang disebut terakhir ini sebenarnya bukan kegiatan penyelidikan, melainkan kegiatan penulisan sejarah (penulisan hasil penyelidikan) dan membina semula keadaan objek dari berbagai kejadian dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan sehingga dapat mempertajam subjek yang diramalkan dalam bentuk konsepsional guna memberi gambaran dan maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dikutip dari berbagai sumber menjadi satu rangkaian pengertian yang bersifat utuh dan disajikan apa adanya.

Sebagaimana lazimnya, pendekatan sejarah menuntut alat bantuan ilmu-ilmu sosial, dalam hal ini ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologis ini dimaksudkan sebagai penunjang dalam pembahasan. Artinya ia merupakan pendekatan yang memperhatikan fenomena sosial umat Islam pada waktu itu dan dikaitkan dengan masalah yang dibincangkan, pendekatan ini merupakan hasil analisis dialog kreatif terhadap peristiwa yang berlaku. Sedangkan antropologi digunakan dalam

Lokasi Penyelidikan ini adalah Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

[illegible]

Gambar 2 : MAP OF BONE



Menurut Sartono Kartodirjo sebagai kajian sejarah juga berkaitan eksplorasi struktur masyarakat, pola perilaku dan lain-lain (Kartodirjo, 1993: 120). Kajian ini menggunakan teknik jaringan data sejarah secara konvensional berupa kajian kepustakaan dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah dengan menganalisis sumber-sumber bertulis, seperti kronik-kronik dan manuskrip-manuskrip klasik yang terdapat dalam lontarak. Sedangkan sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan yang datang kemudian, baik yang ditulis oleh penulis dari dalam negeri ataupun penulis asing, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan utama. Kemudian digabungkan dengan teknik jaringan data dalam kajian sosial dan kajian sejarah sosial.

Di antara jenis Lontarak yang akan digunakan sebagai sumber data primer adalah seperti berikut:

1. Lontarak Latoa, yang mengandung tentang masalah pemerintahan dan tata kehidupan sosial. Lontarak ini terdiri daripada 265 alinea dan telah ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Mattulada. Lontarak ini tidak diketahui secara tepat kapan ditulis. Tetapi penulisan ulangnya dimulai pada abad ke 17, dan disempurnakan pada abad ke 18. Lontarak telah dikumpulkan oleh Matthes pada awal abad ke 19 yang dapat didapati di perpustakaan Leiden (Universiteits bibliotheek) dan Perpustakaan Daerah Makassar. Latoa sebagai Lontarak mulai, ditulis oleh Raja Bone ke 7 yang bernama La Tenrirawe Bongkangnge 1560 - 1578. Lontarak ini mengandungi kumpulan ucapan-ucapan dan petua-petua dari raja-raja dan orang-orang bijaksana Bugis.

Mengenai berbagai masalah terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban raja terhadap rakyat dan sebaliknya. Latoa dijadikan tuntunan bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemeritahan dan memutuskan pengadilan.

2. Lontarak Bilang, Lontarak ini mengandung catatan harian kerajaan Gowa dan Tallo yang mencatat peristiwa-peristiwa penting bermula dari pertengahan abad ke 16 sehingga pertengahan abad ke 18. Lontarak Bilang yang ditemui sekarang ini diperkirakan ditulis oleh Daeng Pamatte pada masa pemerintahan Raja Gowa ke 9, Tumapa'risi kallongna (1512 - 1546). Lontarak ini disempurnakan dan dilengkapi dengan kalender Hijriyah dan ditulis dengan huruf Timur pada masa Sultan Malik as-Said, Raja Gowa ke 15 (1639-1653). Kemudian disempurnakan kembali pada abad ke 18 dengan memasukkan kejadian-kejadian dalam kurung waktu antara abad ke 17 - 18. Kelebihan dari Lontarak Bilang ini adalah catatan peristiwa yang dilengkapi dengan tarikh kejadian, baik kalendar Masehi mahupun Hijriyah. Selain itu rekaman peristiwanya singkat dan tertulis apa adanya, sehingga obyektivitasnya lebih bisa dipertanggung jawabkan. Namun kelemahan Lontarak ini hanya merekam peristiwa dalam bentuk kronik atau merupakan kumpulan fakta-fakta sejarah yang disusun secara kronologi, sehingga memerlukan wawasan luas untuk dapat memberi iterpretasi dalam melakukan historiografi. Lontarak Bilang tersebut terdapat di Perpustakaan Nasional Jakarta, tertulis dalam aksara Arab berbahasa Makassar tanpa nomor halaman. Untuk mencari data yang diperlukan, perlu ditelusuri lewat penggalan yang tersusun mengikuti peristiwa. Lontarak ini telah ditranskripsikan dan diberi komentar ke dalam

bahasa Belanda oleh A. Ligvoet pada tahun 1880 dan sudah dilengkapi dengan senarai indeks dan nomor halaman, sehingga lebih memudahkan pencarian data dalam rangka kajian-kajian serupa.

Penggunaan Lontarak sebagai data primer sebagaimana disebutkan di atas dilakukan karna objek kajiannya berbeda dengan di daerah lain, sebut seperti di pulau Jawa, yang banyak meninggalkan jejak sejarah seperti prasasti yang maklumatnya dapat bertahan lama. Oleh sebab itu, Lontara 'harus diletakkan pada kedudukan hadapan sebagai bahan kajian untuk mengungkap proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan ke atas kerajaan Bone, 1606-1634. Walaupun harus pula diakui bahwa catatan sejarah yang tertulis dalam Lontara berbagai kerajaan memang mengandung maklumat mengenai masa-masa sebelumnya, beberapa di antaranya jelas bersifat mitos, tetapi unsur mitos pun dapat memberikan petunjuk mengenai sejarah awal daerah Bone serta pengertian mengenai gagasan tentang masyarakat dan pemerintahannya.

BAB 2

PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

A. Pusat-pusat Penyebaran

Penyebaran agama Islam di Nusantara pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan Islam kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang Asia, seperti Arab, India, Cina yang telah bergama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah di Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti cara hidup lokal. Kedua proses ini sering terjadi secara bersamaan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan tentang beberapa jalur dalam proses masuknya Islam di Nusantara sebagai berikut:

Menurut Uka tjandrasasmita, prorses masukya Islam di Nusantara yang berkembang ada enam, jalur yaitu:

1. Jalur Perdagangan

Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu-lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim (Arab, Persia dan India) turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara dan Timur Benua Asia.

Jaluri islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan *mullah-mullah* dari luar sehingga

jumlah mereka menjadi banyak, dan karenanya anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya.

Di beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Utara Jawa banyak yang masuk Islam, bukan karena hanya faktor politik dalam negeri yang sedang goyah, tetapi karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang muslim. Perkembangan selanjutnya mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat-tempat tinggalnya.

2. Jalur perkawinan

Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama puteri-puteri bangsawan, tertarik untuk menjadi isteri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawini mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas, akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah dan kerajaan muslim.

Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan; tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Demikianlah yang terjadi antara Raden Rahmat atau sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan puteri Kawunganten, Brawijaya dengan puteri Campa yang mempunyai keturunan Raden Patah (Raja pertama Demak) dan lain-lain.

3. Jalur Tasawuf

Ajaran Islam sampai ke Alam Melayu, sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara dan boleh dikatakan bahwa tasawuf dengan ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses islamisasi di Asia Tenggara. H. John ahli sejarah Australia itu menyatakan bahwa islamisasi tersebut berlaku adanya dakwah yang cerdas dilakukan oleh para penyebar sufi yang datang bersama-sama dengan para pedagang muslim.

Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Dengan tasawuf, "bentuk" Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima.

Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 M bahkan di abad ke-20 M ini.

4. Jalur Pendidikan

Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiyai-kiyai dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama dan kiyai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka

pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ketempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden rahmat di Ampel Denta Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan Agama Islam.

5. Jalur kesenian

Jalur islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabarata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu di sisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat islamisasi, seperti sastra (hikayat, babad dan sebagainya), seni bangunan dan seni ukir.

6. Jalur Politik

Di Maluku dan Sulawesi selatan termasuk kerajaan Bone, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia Bagian Timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam.

Mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, para sarjana dan peneliti sepakat bahwa pada umumnya, islamisasi itu berjalan secara damai,

meskipun ada juga penggunaan kekuatan oleh penguasa muslim Indonesia untuk mengislamkan rakyat atau masyarakatnya.

Sebagai sebuah agama, Islam bukan hanya merupakan kumpulan doktrin Ilahi dan kenabian yang transenden, tetapi juga terwujud dalam realitas sosial. Karena itu, dalam proses akomodasi kultural dapat dilihat pada kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan tradisi dan adat lokal serta pada kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai pokok keislaman.

Sepanjang sejarah, pada hakekatnya, Islam senantiasa bersentuhan dengan budaya dan adat istiadat masyarakat, sebagai wadah aplikasi ajaran agama Islam. Pada mulanya Islam bersentuhan dengan budaya dan adat istiadat masyarakat Arab. Setelah agama Islam berkembang keluar Jazirah Arab, maka Islam pun bersentuhan dengan budaya dan adat istiadat non-Arab, seperti Persia, Turki, Barbar, India dan termasuk Melayu. Bahkan pada zaman modern sekarang, Islam sangat intens bersentuhan budaya barat, sebagai budaya yang sangat berpengaruh pada zaman modern.

Sampai saat ini waktu kedatangan Islam di Indonesia belum diketahui secara pasti, dan memang sulit untuk mengetahui kapan suatu kepercayaan mulai diterima oleh suatu komunitas tertentu. Di samping itu wilayah Nusantara yang luas, dengan banyak daerah perdagangan yang memungkinkan terjadinya kontak dengan orang asing, mengakibatkan suatu daerah mungkin lebih awal menerima pengaruh Islam daripada daerah lain. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan secara pasti kapan agama Islam masuk di Nusantara secara keseluruhan.

Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara, terdapat tiga teori yaitu teori Gujarat (India), teori Makkah dan teori

Persia. Ketiga teori tersebut setidaknya memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara dan tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Adapun ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut.

1. Teori Gujarat (India)

Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad XIII dan pembawanya berasal dari Gujarat (Cambay), India. Dasar dari teori ini adalah:

- a. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia.
- b. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia -Cambay - Timur Tengah - Eropa.
- c. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat.

Pendukung teori Gujarat adalah Snouck Hurgronje, WF Stutterheim dan Bernard H.M. Vlekke. Para ahli yang mendukung teori Gujarat, lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marcopolo dari Venesia (Italia) yang pernah singgah di Perlak (Perureula) tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam.

2. Teori Makkah

Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII dan pembawanya berasal dari Arab (Mesir). Dasar teori ini adalah:

a. Pada abad VII yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam (Arab); dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad IV. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina.

b. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, dimana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekkah. Sedangkan Gujarat/India adalah penganut mazhab Hanafi. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Leur dan T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam, jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya yaitu abad VII, dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri

3. Teori Persia

Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad XIII dan pembawanya berasal dari Persia (Iran). Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia seperti:

a. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad, yang sangat di junjung oleh orang Syiah/Islam Iran. Di Sumatra Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabuik/Tabut. Sedangkan di pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur Syuro.

b. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syaikh Siti Jennar dengan sufi dari Iran yaitu Al - Hallaj.

c. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi Harakat.

d. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik.

e. Adanya perkampungan Leren/Leran di Giri daerah Gresik. Leren adalah nama salah satu Pendukung teori ini yaitu Umar Amir Husen dan P.A. Hussein Jayadiningrat. Ketiga teori tersebut, pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Maka itu berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad VII dan mengalami perkembangannya pada abad XIII. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia dan Gujarat (India). Sampai saat ini waktu kedatangan Islam di Indonesia belum diketahui secara pasti, dan memang sulit untuk mengetahui kapan suatu kepercayaan mulai diterima oleh suatu komunitas tertentu. Hal ini disebabkan oleh proses masuk dan berkembangnya Islam di beberapa wilayah di Nusantara berbeda. Di samping itu wilayah Nusantara yang luas. Namun ada tiga teori yang setidaknya yang bias menjawab persoalan tersebut yaitu, teori Gujarat (India), teori Makkah dan teori Persia

Selain Teori tersebut diatas masih mempunyai tanda tanya dalam menentukan dengan tepat tentang kapan awal penyebaran pertama Islam ke Indonesia. Menurut hasil "*Seminar tentang Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia*" yang berlangsung di Medan, 7 s/d 20 Maret 1963, dan "*Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh*" pada tanggal 10 s/d 16 Juli 1978, diperkirakan bahwa pada abad I Hijriyah, agama Islam telah masuk ke Indonesia (Hasymy, 1981: 89-484).

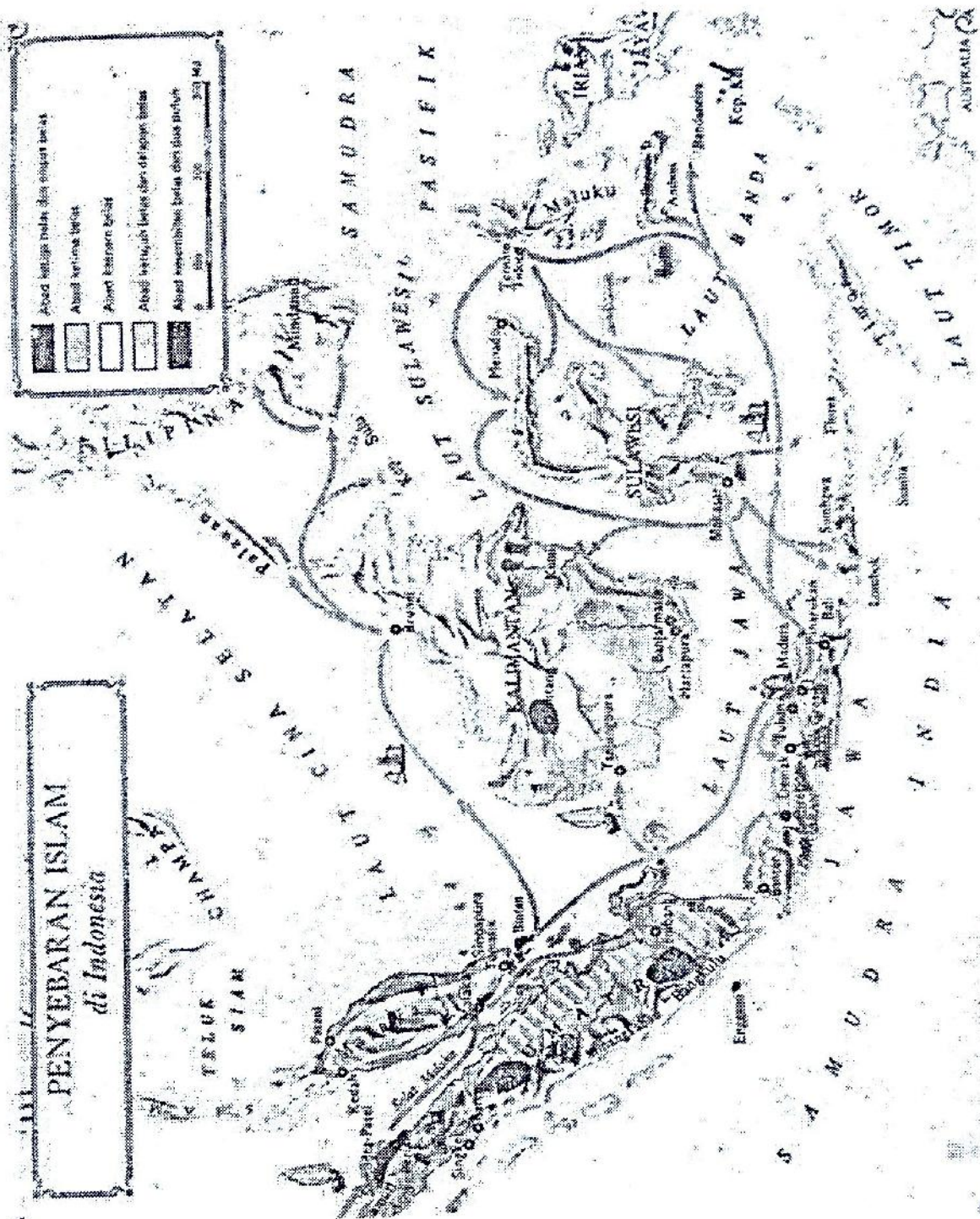
Bila diteliti melalui bukti-bukti sejarah yang nampaknya lebih mendekati kebenaran, bahwa masuknya Islam di Indonesia adalah sekitar abad 14 di Sumatera, Pasai (Oeman, 1982: 17). Tetapi Marco Polo yang berdiam selama lima bulan di Pantai Utara Sumatera dalam perjalanannya pulang dari Cina ke Venesia pada tahun 1292 menyatakan

bahwa sebagian besar penduduk masih menganut kepercayaan lama. Kecuali di dalam Kerajaan *ferlec* atau Perlak di Ujung Timur Laut pulau Sumatera terdapat banyak saudagar Muslim dari India di antara penduduknya telah ada yang menganut agama Islam (Atjeh , 1985: 8). Sedangkan menurut sumber-sumber Cina, pada awal tahun 1282 kerajaan *Sa-mu-ta-la* (Sumatra) telah mengirim kepada Raja Cina duta-duta yang disebut dengan nama-nama Muslim, yakni Husain dan Silaiman. Dengan demikian, meskipun tradisi menegaskan bahwa Perlak merupakan daerah pertama yang memeluk agama Islam, namun Sumatra meskipun lebih akhir dibandingkan dengan Perlak, jelas dapat dikatakan telah menerima pengaruh Islam sebelum tahun 1282, meskipun tahun 1292 belum teramati oleh Marco Polo (Azra, 1989: 3-4).

Terlepas dari hal di atas mengenai kapan secara tepat penyebaran pertama Islam ke Indoensia, pada prinsipnya pusat-pusat penyebaran Islam di Indonesia sejak abad ke-13 tidak lain dari pusat-pusat kerajaan Islam. Hal ini tidak mengherankan karena secara ideal penguasa-penguasa kerajaan Islam dengan gelar sultannya itu menyandang dua tugas utama, sebagai penguasa agama dan sebagai penguasa dunia. Tugasnya yang pertama, seorang sultan berkewajiban memelihara agama dan menyebarkannya kepada orang yang belum menganutnya serta memantapkan penghayatan para penganutnya sekaligus. Tugasnya yang kedua, sebagai penguasa dunia, seorang sultan berkewajiban memelihara ketentraman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyebaran Islam yang melibatkan penguasa-penguasa Islam di pusat kerajaan, tidak tepat dilihat dalam proses dan kerangka pemaksaan tetapi lebih tepat sebagai politik dakwa. Penyebaran Islam dengan dukungan fasilitas politik dan kekuasaan itulah yang lebih banyak mendatangkan hasil dibanding dengan lainnya.

Kenyataan, seperti yang direkam oleh sejarah, penyebaran Islam di Indonesia meskipun didukung oleh fasilitas politik dan kekuasaan tetap memperlihatkan cara-cara yang damai.

Sebuah penyebaran Islam dilihat dari segi sumbangnya terhadap penyebaran Islam ke daerah lain. Sudah barang tentu dengan tidak mengabaikan penyebaran Islam di daerah Sulawesi Selatan sendiri. Mengingat terjadinya konsentrasi dari beberapa kerajaan Islam pada suatu kawasan tertentu, maka pusat-pusat penyebaran Islam dapat diidentifikasi dengan kawasan-kawasan tersebut (untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3 tentang penyebaran Islam di Indonesia). Dengan demikian pusat-pusat penyebara Islam berawal dari terbentuknya kerajaan Islam dari abad ke 13 - 16 M. adalah sebagai berikut: Dengan demikian pusat-pusat penyebara Islam berawal dari terbentuknya kerajaan Islam dari abad ke 13 - 16 M. adalah sebagai berikut:



Munculnya Kerajaan Islam Samudra Pasai (Aceh Utara) pada pertengahan abad ke-13. Histografi tradisional lokal, Hikayat raja-raja Pasai dan Sejarah Melayu menyebutkan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik al-Shalih (Ambary, 1998, 56), beliau pulalah sebagai raja yang pertama dengan memakai gelar sultan

(Sewang, 2010: 49), dan menjadikan daerah tersebut sebagai pusat penyebaran Islam pertama untuk wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Bagian Utara dan Timur. Sebagai pusat penyebaran Islam pertama, daerah Aceh tentunya tetap mempunyai hubungan pula dengan penyebaran Islam secara menyeluruh di Indonesia (TextBook, 1984: 105).

Ketika Islam masuk di Jawa, dianut oleh orang-orang Jawa dan melembaga dalam masyarakat, beberapa tempat muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Sejak kapan Islam masuk di Jawa secara pasti tidak dapat diungkapkan oleh sejarah. Meskipun ada bukti-bukti arkeologis yang ditunjukkan oleh dua buah batu nisan di Loran (Gresik, Jawa Timur), yang pertama menunjukkan angka tahun 496 H./1102 M., yang ditulis dengan huruf Arab Kufi, yang oleh J.P. Mouquette dibaca Fatima Binti Maimun adalah Muslimah pertama yang datang di Jawa; batu nisan yang kedua tahun 1391 M., dengan nama Putri Suwari (Drewes, 1986: 28-29).

Pada dua buah bukti arkeologis tersebut di atas belum ada petunjuk yang jelas tentang terjadinya proses Islamisasi terhadap penduduk setempat. Petunjuk yang lebih pasti dapat ditemukan dengan mengkonfirmasi semua petunjuk-petunjuk di atas dengan berita Ma'huan tahun 1416 (TextBook, 1984: 105).. Dalam berita itu diceritakan tentang orang-orang Muslim yang bermukim di Gresik, suatu informasi yang membuktikan sudah adanya proses Islamisasi pada abad-abad tersebut, terutama di daerah-daerah pesisir Jawa, dan lebih khusus lagi daerah-daerah pelabuhan yang menciptakan masyarakat Muslim. Terciptanya masyarakat Muslim di daerah-daerah pelabuhan sekitar Majapahit itu erat kaitannya hubungan perdagangan maritim orang-orang muslim, yang kekuasaan politik dan ekonominya telah mulai tumbuh dan berkembang di Samudera Pasai maupun Malaka.

Penyebaran Islam di Jawa sesudah periodenya yang pertama, lebih tepat dilihat sebagai usaha perorangan. Islamisasi ditangani langsung oleh orang-orang yang disebut wali. Meskipun belum disepakati, ada Sembilan wali (Wali Songo) yang terkenal di Jawa dengan tempat dan wilayah operasinya masing-masing. Tempat-tempat para wali menyebarkan Islam itulah yang kemudian tumbuh sebagai pusat-pusat penyebaran Islam di Jawa.

Meskipun telah terjadi proses islamisasi sebelumnya, kedatangan Maulana Malik Ibrahim bersama beberapa orang kawannya membawa Gresik di Jawa Timur sebagai pusat penyebaran Islam. Bahkan kedatangan beliau itulah yang membuka lembaran sejarah Islamisasi yang lebih maju dibanding sebelumnya. Maulana Malik Ibrahim yang sering dianggap sebagai kepala wali-wali bukanlah seorang Jawa asli, secara nasab masih keturunan Ali Zainal Abidin al-Husein. beliau berasal dari Maghribi, Afrika Utara. Beliau memulai operasinya dari Gresik, Jawa Timur dan untuk seluruh Jawa, dari Jawa Timurlah dimulai penyebaran Islam oleh wali-wali tersebut. Maulana Malik Ibrahim mendapat gelar Maulana Mahgribi, Syekh Manghribi dan Sunan Gresik, wafat pada tahun 882 H/1419 M., seperti petunjuk yang terbaca pada batu nisan kuburannya di Gresik.

Melanjutkan perjuangan penyebaran Islam dari Maulana Malik Ibrahim, muncul Raden Rahmat, lebih dikenal dengan Sunan Ampel di Ampel (Saifullah, 2010:22). masih wilayah Jawa Timur juga, wali ini melakukan kegiatannya mendidik dan mengajar agama kepada siapa saja yang datang kepadanya. Di tempat ini beliau mendidik beberapa muridnya yang kemudian menjadi wali pula dan menjadi penyebar Islam di tempat atau daerah-daerah lain. Atas dasar itulah, Ampel tumbuh sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Proses pertumbuhan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa juga atas usaha Sunan Ampel di

Ampel Denta ini. Bahkan menurut catatan, seluruh anggota Wali Songo mempunyai andil dalam proses berdiri dan berkembangnya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa.

Giri, sebuah tempat di Jawa Timur juga, muncul sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa karena jasa Sunan Giri. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu dari tulisan ini, Sunan Giri mengambil Giri sebagai pusat kegiatannya dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat. Dari sinilah Sunan Giri berhasil mengirim muballigh-muballigh dan murid-murid yang telah berhasil dididiknya menyebarkan Islam ketempat-tempat di Jawa dan di luar Jawa. Daerah jangkauan Sunan Giri dalam penyebaran Islam di luar Jawa tercatat seperti Bawean, Madura, dan Ternate di Maluku Utara. Di Sedayu, Jawa Timur (Texbook, 1984: 109) muncul pula Sunan Drajat yang menjadikan daerah ini sebagai pusat operasinya.

Kudus yang muncul sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa adalah karena jasa dua orang wali penyebar Islam terkenal, Sunan Kudus dan Sunan Muria. Di Kudus dan sekitarnya, (Saifullah, 2010:24) kedua wali ini mengajar rakyat jelata dan orang-orang pegunungan tentang agama Islam dengan berbagai jalur, termasuk kesenian seperti Gamelan, menurut catatan, Sunan Muria tetap mempertahankan gamelan, suatu bentuk kesenian Jawa yang populer untuk menarik simpatik masyarakat kepada Islam. Sementara itu, Tuban dijadikan sebagai pusat operasi penyebaran Islam oleh Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang.

Cikal bakal munculnya Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa tidak dapat dilepaskan dari jasa Sunan Ampel di Ampel. Atas perintah Sunan Ampellah, Raden Patah mendirikan pusat pendidikan di Bintaro Demak (Text Book, 1993: 110). Jasa Demak sebagai pusat penyebaran Islam di

Penyebaran Islam di Jawa sesudah periodenya yang pertama, lebih tepat dilihat sebagai usaha perorangan. Islamisasi ditangani langsung oleh orang-orang yang disebut wali. Meskipun belum disepakati, ada Sembilan wali (Wali Songo) yang terkenal di Jawa dengan tempat dan wilayah operasinya masing-masing. Tempat-tempat para wali menyebarkan Islam itulah yang kemudian tumbuh sebagai pusat-pusat penyebaran Islam di Jawa.

Meskipun telah terjadi proses islamisasi sebelumnya, kedatangan Maulana Malik Ibrahim bersama beberapa orang kawannya membawa Gresik di Jawa Timur sebagai pusat penyebaran Islam. Bahkan kedatangan beliau itulah yang membuka lembaran sejarah Islamisasi yang lebih maju dibanding sebelumnya. Maulana Malik Ibrahim yang sering dianggap sebagai kepala wali-wali bukanlah seorang Jawa asli, secara nasab masih keturunan Ali Zainal Abidin al-Husein. beliau berasal dari Maghribi, Afrika Utara. Beliau memulai operasinya dari Gresik, Jawa Timur dan untuk seluruh Jawa, dari Jawa Timurlah dimulai penyebaran Islam oleh wali-wali tersebut. Maulana Malik Ibrahim mendapat gelar Maulana Mahgribi, Syekh Manghribi dan Sunan Gresik, wafat pada tahun 882 H/1419 M., seperti petunjuk yang terbaca pada batu nisan kuburannya di Gresik.

Melanjutkan perjuangan penyebaran Islam dari Maulana Malik Ibrahim, muncul Raden Rahmat, lebih dikenal dengan Sunan Ampel di Ampel (Saifullah, 2010:22). masih wilayah Jawa Timur juga, wali ini melakukan kegiatannya mendidik dan mengajar agama kepada siapa saja yang datang kepadanya. Di tempat ini beliau mendidik beberapa muridnya yang kemudian menjadi wali pula dan menjadi penyebar Islam di tempat atau daerah-daerah lain. Atas dasar itulah, Ampel tumbuh sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Proses pertumbuhan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa juga atas usaha Sunan Ampel di

Ampel Denta ini. Bahkan menurut catatan, seluruh anggota Wali Songo mempunyai andil dalam proses berdiri dan berkembangnya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa.

Giri, sebuah tempat di Jawa Timur juga, muncul sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa karena jasa Sunan Giri. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu dari tulisan ini, Sunan Giri mengambil Giri sebagai pusat kegiatannya dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat. Dari sinilah Sunan Giri berhasil mengirim muballigh-muballigh dan murid-murid yang telah berhasil dididiknya menyebarkan Islam ketempat-tempat di Jawa dan di luar Jawa. Daerah jangkauan Sunan Giri dalam penyebaran Islam di luar Jawa tercatat seperti Bawean, Madura, dan Ternate di Maluku Utara. Di Sedayu, Jawa Timur (Texbook, 1984: 109) muncul pula Sunan Drajat yang menjadikan daerah ini sebagai pusat operasinya.

Kudus yang muncul sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa adalah karena jasa dua orang wali penyebar Islam terkenal, Sunan Kudus dan Sunan Muria. Di Kudus dan sekitarnya, (Saifullah, 2010:24) kedua wali ini mengajar rakyat jelata dan orang-orang pegunungan tentang agama Islam dengan berbagai jalur, termasuk kesenian seperti Gamelan, menurut catatan, Sunan Muria tetap mempertahankan gamelan, suatu bentuk kesenian Jawa yang populer untuk menarik simpatik masyarakat kepada Islam. Sementara itu, Tuban dijadikan sebagai pusat operasi penyebaran Islam oleh Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang.

Cikal bakal munculnya Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa tidak dapat dilepaskan dari jasa Sunan Ampel di Ampel. Atas perintah Sunan Ampellah, Raden Patah mendirikan pusat pendidikan di Bintaro Demak (Text Book, 1993: 110). Jasa Demak sebagai pusat penyebaran Islam di

Jawa telah berhasil menjangkau Banten, Sunda Kelapa, Cirebon dan bahkan seluruh Jawa yang belum menerima Islam. Faletihan, Syarif Hidayatullah yang sering pula disebut sebagai Sunan Gunung Jati adalah seorang pemimpin Islam yang bergerak di bawah perlindungan dan fasilitas Demak. Banten kemudian menjadi kerajaan Islam pula, dan Syarif Hidayatullah berhasil mendirikan Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia sekarang.

B. Pola Penyebaran

Di Indonesia, Islam yang datang dengan jalur-jalur perdagangan dan dengan pola dan cara-cara yang damai, selanjutnya disebarkan dengan cara dan pola yang sama pula, yaitu dengan cara damai (Shihab, 1998: 26) dalam dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Kedua, penduduk dari luar yang berasal dari Arab, India, Persia dan Cina yang sudah Beragama Islam datang ke Nusantara dan melakukan proses penyebaran Islam (Ricklefs, 1991: 3).

Kraemer member komentar tentang segi-segi positif dan negatif dari pola dan cara Islamisasi yang damai tersebut. Segi positifnya ialah para penyebar Islam menggunakan pendekatan persuasif dengan kepercayaan dan adat istiadat setempat sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Islam bisa diterima dengan damai. Segi negatifnya ialah bahwa di Indonesia ini islamisasi itu belum selesai dan belum sempurna sampai sekarang dan mungkin seterusnya. Hal ini disebabkan karena konversi ke dalam agama Islam dapat dilakukan dengan perlahan-lahan saja, dengan tidak ada keharusan menyatakan keislaman yang lengkap. Biasanya seseorang yang akan memeluk agama Islam, mulai mengucapkan syahadat dengan ikhlas hatinya kemudian memulai pelajaran masalah-masalah keagamaan,

pelajaran itupun biasanya jauh sempurna (TextBook, 1984: 85-86).

Pola dan cara penyebaran Islam yang damai itu tentunya melalui berbagai sarana dan saluran pula. Sarana dan saluran tersebut dapat diikuti perwujudan dan efektifitasnya dalam sejarah seperti akan diuraikan berikut ini:

Proses kedatangan Islam di Indonesia pada awalnya lebih dominan melalui saluran perdagangan sebagaimana penulis jelaskan di atas. Hal ini memberi keuntungan, karena dari segi konsepsi, Islam tidak membedakan antara profesi penganutnya dari segi penyebaran ajaran Islam. Semuanya berkewajiban menyampaikan ajaran-ajaran yang diketahuinya kepada orang lain tanpa memandang profesinya. Di lain segi, profesi dagang itu memerlukan kemampuan tersendiri bagi subyeknya dalam berkomunikasi dengan orang banyak sebagai konsumennya, hal mana yang sangat menguntungkan bagi tersebarnya Islam. Dalam komunikasi lain itulah seorang muballigh dapat memberi contoh kepada orang lain tentang hal-hal yang baik dan menerima mereka mengikutinya. Proses Islamisasi selanjutnya memperlihatkan efektifitas dari jalur perdagangan tersebut. Daerah-daerah yang dapat menerima Islam di Indonesia sesudah periodenya yang pertama, juga adalah daerah-daerah pesisir, yang dekat dengan pelabuhan atau daerah-daerah pelabuhan itu sendiri, dan secara umum adalah daerah-daerah yang terjangkau oleh para pedagang, seperti Gowa, Ternate, dan daerah-daerah pesisir utara Jawa (Tjandrasasmita, 1976: 81).

Kesan bahwa Islamisasi melalui perdagangan ini hanya berhasil mengislamkan lapisan masyarakat bawah adalah keliru. Di antara para pedagang-pedagang itu banyak dari golongan raja-raja dan bangsawan. Bahkan mereka-mereka itulah yang memiliki armada-armada

perdagangan dan saham-saham yang besar. Selain itu menurut tradisi yang berkembang, seseorang yang telah memasuki daerah orang lain harus terlebih dahulu menyampaikan maksud kedatangannya itu kepada penguasa setempat. Biasanya, pertemuan antara muballih yang pedagang dengan penguasa itupun dapat digunakan oleh muballihg itu untuk tujuan-tujuan dakwah apabila situasi memungkinkan. Tradisi sosial Hindu yang berkastakasta itu, sangat ketat menguasai masyarakat Indonesia (terutama Jawa) pra Islam. Dari segi itu saja, kecil kemungkinannya bagi anggota masyarakat paling bawah untuk melakukan misi perdagangan. Dapat dipastikan bahwa anggota masyarakat yang ikut dalam kegiatan perdagangan adalah golongan elite, dan paling tidak golongan menengah. Apabila analisa ini benar, maka Islam yang disebarkan melalui saluran perdagangan ini diterima oleh anggota masyarakat yang bukan dari lapisan bawah atau golongan rendahan saja, tetapi juga dari golongan menengah dan golongan atas.

Menurut Tome Pires, bahwa ketika pesisir Utara Jawa belum Islam, di sana telah terdapat pedagang-pedagang Arab, Gujarat, Benggali dan lain-lain yang kebanyakan dari mereka beragama Islam. Di beberapa tempat penguasa Jawa mulai menganut agama Islam. Demikian pula halnya Kerajaan Gowa pada abad ke-16, sebelum raja memeluk agama Islam, telah dijumpai sekelompok pedagang Muslim dari Jawa dan Melayu (Pelras, 1996: 166-167). Seperti halnya masyarakat Muslim di pesisir utara Jawa, di sinipun telah dibangun sebuah masjid di Mangallekana untuk kepentingan ibadah mereka (Mattulada, 2011: 37). Keadaan yang sama terlihat pula di Ternate, di sini ada perkampungan khusus untuk orang-orang Jawa dan Melayu. Selain itu terdapat orang Cina yang masuk ke Ternate melalui Philipina (TextBook, 1984: 87).

Para pedagang inilah, sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, melakukan perdagangan cenkeh ke Jawa (Yusuf, 2006: 102).

Islamisasi melalui perdagangan sebagaimana disebutkan di atas dimulai dengan kedatangan sejumlah pedagang dari luar daerah, baik orang Indonesia sendiri maupun bangsa asing. Mereka mendiami suatu daerah pemukiman tertentu, membentuk suatu masyarakat Islam dengan masjid sebagai lambang utamanya dengan cara demikian lambat-laun timbullah kampung-kampung atau (TextBook, 1984: 87). Para pedagang muslim itu tentunya tidak mempunyai isteri atau tidak membawa serta isterinya. Karena kaya dan status sosial yang tinggi, maka tentu saja putri-putri bangsawan setempat tidak berkeberatan untuk diperisterikan mereka, calon-calon isteri itu tentu saja diislamkan terlebih dahulu dengan cara agar dia mengikuti dan mengucapkan kalimat syahadat (Sewang, 2010: 33-34). Dengan begini masyarakat Islam mulai bertambah, apalagi kalau perkawinan semacam itu telah menghasilkan keturunan.

Dalam hal penerimaan dan penyebaran Islam di Indonesia, aspek politik memainkan peranan penting. Elite penguasa tradisional yang telah mulai mengadakan konversi ke dalam Islam, paling tidak sekitar abad ke-13, dan disusul kemudian dengan penerimaan oleh rakyat mereka, merupakan dua gejala penting dari aspek politik dalam penyebaran Islam tersebut.

Seperti diketangkahkan dalam sejarah bahwa Kerajaan Sriwijaya setelah Berjaya beberapa abad lamanya, sekitar abad ke-13 telah mulai mengalami kemunduran. Karena itu, beberapa daerah kekuasaannya mulai mencari jalan untuk melepaskan diri. Untuk mendapatkan dukungan spiritual, sudah barang tentu mereka mencari peganggang hidup yang lain dari agama Budha, inti kepercayaan kepercayaan dari

Kerajaan Sriwijaya tersebut. Agama Islam yang sudah sejak lama dikenal oleh penguasa-penguasa tradisional di pusat-pusat perdagangan, karena pergaulan mereka dengan pedagang-pedagang Muslim, menjadi pilihan para penguasa tersebut. Islam, dengan demikian menjadi suatu kekuatan pembebasan politik (*a political liberating force*) dari kekuasaan Sriwijaya. Dengan masuk Islamnya sang raja, dengan sendirinya menjadikan sebuah kerajaan Islam dalam wilayah kekuasaannya. Demikianlah Tome Pires yang mengunjungi Indonesia dalam tahun-tahun 1512-1515 telah mencatat dalam Summa Orientanya bahwa di beberapa daerah bekas kekuasaan Sriwijaya yaitu daerah-daerah di bahagian pesisir Sumatera Utara dan Timur Selat Malaka atau Aceh sampai Palembang telah terdapat masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam.

Demikian pula halnya dengan pesisir utara pulau Jawa, sebagian penguasa tradisional setempat, telah memilih Islam sebagai keyakinan hidup mereka, di kala kerajaan Majapahit mengalami kegoncangan' kemudian muncullah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Gresik, Cirebon dan sebagainya. Disusul lagi dengan berdirinya kerajaan-kerajaan agraris seperti Mataram dan Pajang (Leur, 1955: 113).

Penerimaan penguasa terhadap Islam, mempermudah rakyat mereka untuk berpindah agama, mengikuti jejak rajanya. Penerimaan berlangsung secara suka rela, meskipun ada pula raja atau sultan secara formal mendekritkan Islam sebagai agama kerajaan. Raja Gowa, Sultan Alauddin misalnya, setelah menerima Islam pada tahun 1605, dua tahun kemudian menyatakan bahwa seluruh masyarakat wilayah kerajaannya telah menjadi Islam, dan agama ini diakui sebagai agama resmi kerajaan (Mattulada, 1996: 224). Penerimaan Islam dari "atas", melalui dekrit raja seperti ini, memang mempercepat

penyebaran Islam, tetapi corak Islam masyarakat tersebut sangat formalistis. Artinya pra Islam masih dilanjutkan, meskipun mereka secara sadar mengakui praktek semacam itu tidak termasuk ajaran Islam. Sebaliknya penyebaran Islam dari "bawah", melalui dakwah terhadap rakyat seringkali memperlihatkan masyarakatnya menganut agama yang bercorak sinkretis. Corak demikian biasa terjadi karena daya akomodatif Islam dalam menerima unsur-unsur tradisional, sehingga terjadilah percampur bauran antara ajaran Islam dengan tradisi. Pada corak sinkretis. Masyarakat menganggap unsur-unsur tradisi adalah juga bahagian dari agama.

Selain melalui jalur perdagangan dan politik itu, jalur yang lebih khusus dengan sasaran utama Islamisasi, juga direkam oleh sejarah. Jalur ini mungkin lebih tepat dikatakan jalur dakwah sebab dilakukan oleh para muballigh yang memang bertugas khusus untuk menyebarkan Islam.

Di Jawa, meskipun pada mulanya Islam disebarkan melalui perdagangan terutama dipesisir bahagian utara, tetapi penyebaran selanjutnya melalui kegiatan dakwah. Di sini penyebaran Islam itu terutama dilakukan oleh Sunan Ampel melakukan kegiatan dakwah di Surabaya dan sekitarnya. Demikian pula putra-putra Sunan Bonang dan Sunan Drajat. Di Jawa Tengah terkenal Sunan Kalijaga atau Jaka Said dan Sunan Giri. Sementara itu muballigh yang terkenal mengislamkan Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jadi atau Syarif Hidayatullah. Karena ia juga seorang raja, maka dijuluki Pandita Ratu. Beberapa muballigh menjadi guru bagi penguasa setempat. Demikianlah. Kyai Duku atau Pangeran Kesunyatan menjadi guru bagi Maulana Yusuf. Syekh Yusuf al-Makassary menjadi penasehat dan guru bagi Sultan Agung Tirtayasa sedang guru Joko Tingkmir adalah Kiyai Sela.

Penyebaran Islam melalui dakwah juga dilakukan di Kalimantan. Muballigh yang pertama kali menyiarkan Islam di daerah ini adalah Tuan di Bandang dan Tuan Tenggung Parangan. Keduanya berdakwah di Kutai. Penghulu Demak menyebarkan Islam di Banjar.

Di Maluku, menurut Naida dalam Hikayat Ternate, Islam telah disebarkan sejak tahun 1250. Pada tahun itu Islam telah tiba di Ternate sedang muballigh Arab yang bernama Jafar Shadik atau Jafar Muhammad. Hari bersejarah itu tercatat pada haru Senin 6 Muharram 634 Hijriyah. Sebelum Ternate, ia telah menetap dan kawin di Jawa. Di Ternate ia kawin lagi dengan seorang putrid setempat yang bernama Nur Sifa. Keturunannyalah yang menjadi raja di empat di Kerajaan di Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Empat orang muballigh lainnya yang menurut tradisi lisan setempat berasal dari Irak telah turut pula menyiarkan Islam di Maluku (Utara). Mereka itu adalah Syekh Mansur di Ternate, dan Halmahera oleh Syekh Yakub di Tidore dan Makian serta Syekh Amir dan Syekh Umar menyebarkan Islam di Halmahera Timur. Sementara itu seorang datu dari Jawa Maulana Husein telah mengajarkan Alquran dan aksara Arab dikalangan istana Sultan Ternate. Seorang muballigh lainnya yang juga berasal dari Jawa, Tuhubahahul yang menyertai Zainal Abidin (Sultan) setelah yang disebut terakhir itu mukim beberapa lama di Jawa untuk belajar di Pesantren Giri.

Kebijaksanaan kaum Muslimin dalam menyebarkan Islam kepada sasaran yang dianggap keraspun masih mencatat penuh kedamaian. Menurut catatan Islam disebarkan kepada orang-orang Batak di Sumatera dengan cara yang sangat hati-hati dan perlahan-lahan melalui dakwah. Pada perkenalan pertama, orang-orang Batak itu tidak langsung ditarik menjadi pemeluk Islam. Mereka dibiarkan oleh kaum Muslimin untuk melakukan tradisi dan

lembaga agamanya yang lama, berbeda dengan sikap Kristenisasi yang dilancarkan secara paksa meskipun kepada suku-suku liar yang masih biadab. Hanya dengan cara dan kebijaksanaan kaum Muslimin seperti itulah, orang-orang Batak tertarik dengan sendirinya kepada Islam. Permusuhan antara kaum Muslimin dengan orang-orang Batak tidak pernah terjadi. Suasana pergaulan akrab antara mereka meskipun berlainan agama itulah yang menguntungkan Islam. Orang-orang Batak tertarik dan menjadi Islam karena pergaulan dan keakraban mereka dengan kaum Muslimin yang mempunyai strategi dan tujuan dakwah yang jelas. Pergaulan yang baik dan akrab dengan umat Islam dari Aceh maupun orang Melayu dari pantai utara Sumatera itulah yang menjadikan mereka memeluk agama Islam tanpa paksaan.

Selain itu ajaran-ajaran Islam diperkenalkan kepada orang-orang Batak dengan melalui tradisi dan kebudayaan Batak yang sudah sangat tua. Kepercayaan orang-orang Batak kepada kekuatan benda-benda tidak segera hilang, tetapi melalui proses percampuran dengan ajaran-ajaran Islam. Mantra-mantra Batakpun mempunyai proses yang sama, tidak langsung dapat dihilangkan sekaligus, tetapi melebur dalam doa-doa menurut ajaran Islam meskipun dengan paham kedewaan, Tuhan Yang Maha Esa telah dapat menggantikan dewa-dewa pujaan Batak melalui proses tertentu. Dengan cara itulah Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. yang menurut Islam harus diakui dalam syahadah (penyaksian) tidak pernah ketinggalan dalam setiap doa dan pemujaan orang-orang Batak.

Intensifikasi penyebaran Islam di Indonesia mencatat efektifitas yang luar biasa melalui saluran tasawuf terutama disebabkan oleh penafsiran para sufi mengenai Islam yang sangat cocok dengan latar belakang mistik Hindu-Budha penduduk setempat Kelompok tasawuf diperkirakan masuk

di Indonesia pada abad ke-13 dan 18 M. Melalui saluran tasawuf ini bahkan memudahkan orang masuk Islam. Alwi Shihab (1998: 27) mengemukakan bahwa berkat keterampilan para sufi menafsirkan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada pada waktu itu, dalam cara yang pas dengan kerangka Islam dan ajaran-ajaran pokok Islam, maka Islam dapat menancapkan akarnya yang kukuh di wilayah ini.

Mengapa orang-orang Jawa mudah sekali menerima Islam, tidak perlu diherankan. Persoalannya harus dikembalikan pada kemampuan para penyebar Islam dalam ajaran Tasawuf ini. Mereka para ahli Tasawuf itu menyajikan Islam menurut kadar kemampuan obyeknya. Agama Hindu-Budha yang sudah lama berakar di kalangan masyarakat Indonesia, terutama Jawa tidak diberantas, bahkan dalam menyajikan Islam tradisi kedua agama tersebut kadang-kadang dijadikan perbandingan atau contoh untuk memudahkan masyarakat memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Guru-guru dan ulama-ulama tarekat itupun senantiasa memperlihatkan kesederhanaan, bahkan kadang-kadang Nampak sebagai sukarelawan yang menghayati kemiskinan, sehingga ditanggapi orang sebagai penghayat agama Budha. Dalam mencapai alam Nirwana (kesempurnaan) menurut agama Budha, seorang harus membelakangi dunia. Praktek-praktek seperti itu betul dilakukan pula oleh penganut-penganut tarekat sufi. Inti ajaran tarekatpun adalah mengejar kesempurnaan dengan membelakangi atau menjauhkan diri dari hal-hal dan pengaruh duniawi.

Perkawinan yang menjadi Islamisasi pada awal kedatangan Islam di Indonesia masih tetap memperlihatkan efektifitasnya pada periode penyebaran Islam masa selanjutnya. Jalur Islamisasi melalui perkawinan itu memberikan keuntungan yang besar. Perkawinan adalah

awal dari pembentukan suatu masyarakat. Perkawinan membentuk hubungan kekerabatan yang luas antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Bahkan perkawinan itu lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara muballigh atau ulama dengan seorang bangsawan, keluarga raja-raja dan penguasa lainnya. Keuntungan itu adalah, berupa peningkatan status sosial ekonomi, terutama politik raja-raja dan keluarganya ataupun struktur penguasa lain-lainnya yang waktu itu turut mempercepat proses tersebarnya Islam.

Dalam cerita-cerita Babad, hikayat dan tradisi sering diperoleh informasi mengenai perkawinan antara seorang penyebar Islam dengan anak bangsawan. *Babad Tanah Jawi* misalnya, menceritakan perkawinan antara Maulana Ishak yang datang di Blambangan dan kawin dengan putri raja negeri tersebut, yang kemudian dari perkawinan itu lahir Sunan Giri. Perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, putri Tumenggung Wilatikta juga didapati dalam Babad Tanah Jawi tersebut (Kartodirdjo, 1977: 76). Dalam Babad Cirebon diceritakan perkawinan putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati (Rinkes, 1913: 93). Begitu pula dalam Babad Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, putri Aria Dikara yang menjadi, Adipati Tuban dengan Syekh Abdul Rahman yang kemudian dari perkawinannya itu lahir seorang anak laki-laki yang bernama Syekh Jali atau Laleluddin (Kartodirdjo, 1977: 76). Apa yang sempat dikemukakan di sini adalah sebahagian kecil dari perkawinan yang terjadi antara penyebar-penyebar Islam dengan kaum bangsawan, dan lebih banyak yang lain yang memberi keuntungan tersendiri dalam mempercepat proses Islamisasi.

Pendidikan tercatat pula sebagai jalur Islamisasi yang efektif di antara jalur-jalur lainnya. Pendidikan sebagai jalur

Islamisasi ini berlangsung dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua di pondok-pondok pesantren yang diasuh ulama-ulama, kiyai-kiyai dan guru-guru agama. Dalam lingkungan rumah tangga, para orang tua mengajarkan agama kepada putra-putrinya dengan cerita-cerita dan dongeng-dongeng yang pada umumnya bertemakan akhlak atau tata kesopanan. Adapun rumah tangga para raja dan kaum bangsawan, pada umumnya mereka mendatangkan ulama-ulama, kiyai-kiyai dan guru-guru khusus untuk mendidik dan mengajar anak mereka. Bahkan di antara ulama-ulama itu ada pula yang menjadi penasehat agama penguasa. Dalam sejarah Banten misalnya, disebutkan bahwa Kiyai Dukuh adalah guru dari Maulana Yusuf (Djajadiningrat, 1963: 148), sementara Syekh Yusuf, ulama terkenal dari Gowa, Sulawesi Selatan adalah penasehat agama Sultan Agung Tirtayasa, dan kiyai Agung Sela adalah guru Jaka Tingkir (Kartodirdjo, 1997: 122). Selain itu masih banyak ulama, kiyai yang menjadi guru dan penasehat agama dalam rumah tangga para raja dan kaum bangsawan yang pengaruh mereka dalam bidang politik dan kekuasaan tidak dapat disangkal.

Adapun pondok pesantren adalah merupakan tempat belajar dan mendidik putra-putri di luar lingkungan rumah tangga. Putra-putri itu mendatangi pondok dan pesantren yang terkenal untuk belajar agama dan kemudian menjadi penyebar agama Islam di kampungnya atau daerah-daerah lain.

Di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah *Mangaji Tudang* suatu istilah dan sistem lain dari pondok. Para murid mendatangi seorang ulama tempatnya belajar, duduk bersila dihadapannya sementara sang guru memberikan pelajarannya.

Pada masa perkembangan Islam di Jawa, dikenal Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang mendirikan pondok

atau pesantren di Ampel Denta Surabaya. Sunan Giri terkenal dengan pesantrennya di Giri, tempat orang-orang dari berbagai daerah belajar masalah keagamaan pada Sunan Giri. Orang-orang yang jauh ke sebelah timur sekali pun, seperti dari Maluku, Hitu datang belajar pada Sunan Giri. Di samping itu beberapa ulama dan kiyai yang telah menyerap banyak-banyak pengetahuan agama diundang ke Maluku untuk mengajar. Mereka itu ada yang menjadi khatib, qadhi, imam dalam masyarakat Maluku dan diberikan upah berupa cengkeh (Kartodirjo, 1977: 122).

Efektifitas jalur pendidikan ini lebih nampak lagi dengan terbukanya pusat-pusat pendidikan dan pesantren. Pada akhir abad ke 19, banyak pemuda pergi mengaji dan belajar agama di Pulau Salemo, Pulau Karang, Balanipa (Mandar), Palopo, Wajo dan Bone. Ditempat-tempat tersebut terdapat ulama yang masyhur dan meluangkan waktunya untuk mengajar agama kepada pemuda-pemuda yang datang. Pulau Salemo adalah yang paling terkenal diantara semua tempat-tempat pendidikan pada waktu itu. Di pulau ini terdapat seorang ulama dari Gresik yang mempersiapkan waktunya mengajar dan keliling berdakwah dipulau-pulau yang terletak di Selat Makassar. Pondoknya banyak menarik pemuda di daratan Sulawesi Selatan dan berhasil mencetak ulama-ulama yang memiliki reputasi gemilang dalam ilmu agama di kemudian hari. Tempat-tempat dan pusat-pusat pendidikan seperti dikemukakan di atas inilah yang tersebar diseluruh Indonesia pada periode penyebaran dan pemantapan ajaran-ajaran agama di kalangan masyarakat Indonesia.

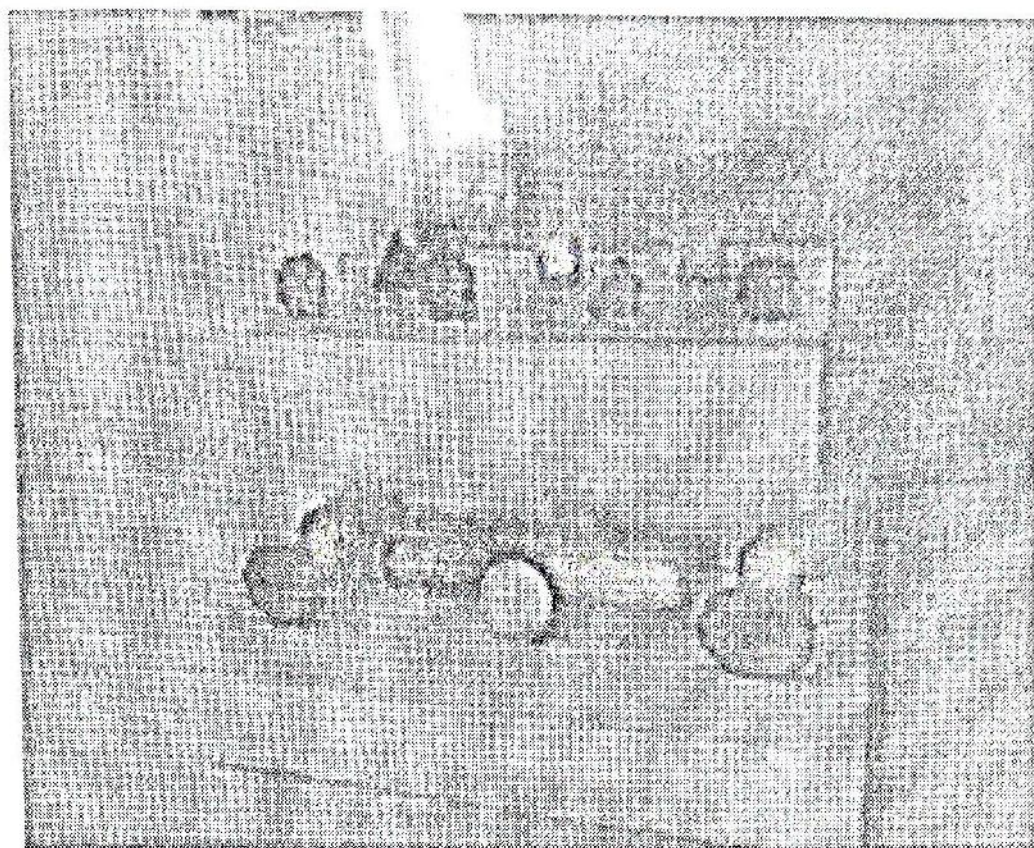
Penyebaran Islam melalui jalur kesenian juga tercatat dalam sejarah. Pertunjukan wayang, suatu tradisi kesenian yang paling digemari oleh orang-orang Jawa memegang peranan yang sangat penting. Sunan kali Jaga, seorang wali penyebar Islam terkenal sangat mahir dalam pertunjukan

wayang. Sehubungan dengan keahliannya itu, beliau memberi isi pada kesenian yang dipertunjukkannya itu dengan ajaran dan nasehat-nasehat keagamaan yang dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat penggemarnya. Di samping para penonton diminta oleh beliau untuk mengikutinya dengan mengucapkan kalimat syahadat, beliau berhasil pula menyesuaikan isi dan lakon-lakon wayang yang dipertunjukkan dengan ajaran-ajaran Islam. *Panah Kalimasada*, suatu senjata yang paling ampuh dimiliki Darmokusuma dalam cerita dan lakon wayang diartikan sebagai dua kalimat syahadat, syarat pertama bagi orang yang akan menjadi penganut agama Islam. Pandawa Lima dalam cerita pewayangan diartikan sebagai lima hukum Islam, yaitu mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat dan naik haji. Demikianlah Sunan Kalijaga dengan saluran kesenian, permainan wayang telah berhasil mengislamkan orang-orang Jawa.

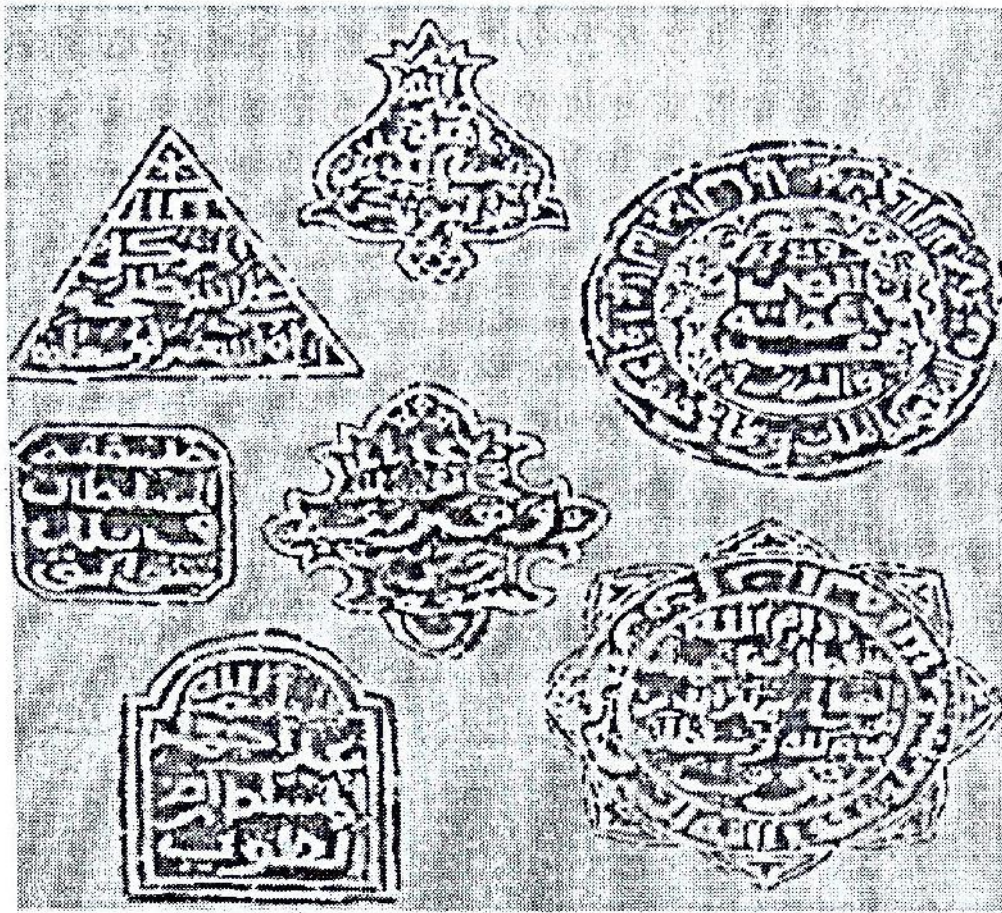
Seni sastra dan bahasa, dengan cara perlahan-lahan telah menjadi alat dan saluran Islamisasi. Naskah-naskah dari masa peralihan kepercayaan setempat, seperti karya Sunan Bonang yang mana kegiatannya diperkirakan antara 1475-1525 M, ditulis dalam bahasa Jawa. Kumpulan doa-doa, ilmu firasat, tafsir mimpi, ramalan tanda-tanda dan catatan soal-soal keagamaan yang di dalam bahasa Jawa disebut *Primbon* juga ditulis dalam bahasa Jawa (Djajadiningrat, 1963: 122). Proses berikutnya, hikayat-hikayat dan catatan-catatan yang meskipun masih ditulis dalam bahasa daerah, tetapi sudah ada pengaruh dari huruf-huruf Arab di mana naskah-naskah tersebut ditulis dalam huruf Arab di samping huruf bahasa daerah. Ajaran Hamzah Fanzuri misalnya dibuat dalam bentuk syair Melayu untuk memudahkan orang memahaminya, bahkan al-Attas mengatakan bahwa Hamzah al-Fanzuri adalah orang yang pertama menggunakan bahasa Melayu secara rasional dan sistematis

(al-Attas, 1990: 68). Dalam kerangka ini tampaknya, bahasa Melayu sudah merupakan *Lingua Franca* pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam (Azra, 1995 : 188). Hal ini dapat dilihat pada Hikayat Hitu, Hikayat Bugis, Hikayat Kutai dan beberapa naskah tua ditulis dalam bahasa Melayu.

Pada masa stabilitas Islam sebagai agama dan politik (abad 17-18) di Sulawesi Selatan, turut pula menampakkan pengaruhnya yang dalam pada seni sastra dan bahasa. Buku-buku Lontara yang sebelumnya ditulis dalam bahasa dan aksara Bugis-Makassar kebanyakan ditulis dalam bahasa Bugis atau Makassar dengan aksara Arab, dalam istilah Bugis tulisan bahasa Bugis-Makassar dengan huruf Arab disebut Uki Serang. Lontara yang ditulis pada periode ini pada umumnya terdiri dari campuran huruf Arab dan huruf daerah. Buku-buku Lontara yang berisi masalah keagamaan seperti tauhid, hukum-hukum Islam dan Tasawuf banyak ditulis dengan aksara Arab bahasa Bugis, bahkan stempel kerajaan ditulis dengan huruf Arab dalam bahasa daerah (Lihat Gambar 4 dan 5).



Gambar 4 : Sebagian Stempel Kerajaan Bone yang tersimpan di Museum Lagaligo Provinsi Sulawesi Selatan, Sumber Foto **Mahaji Noesa**, *Jejak Penyebaran Islam dalam Stempel Kerajaan Bone*. www.kompasiana.com



Gambar 5 : Sebagian Stempel Kerajaan Bone, Sumber Foto Mahaji Noesa, *Jejak Penyebaran Islam dalam Stempel Kerajaan Bone*. www.kompasiana.com

C. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan

1. Peranan Tokoh-tokoh Islam dalam Penyebaran Islam

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan terasa betapa kurangnya rekaman-rekaman sejarah baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, sementara Islam di Kerajaan Gowa secara resmi ditandai dengan kedatangan Abdul Makmur Khatib Tunggal bergelar Dato 'Ibadat, Sulaiman Khatib Sulung bergelar Dato' Pattimang dan Khatib Bungsu bergelar Dato Itiro adalah jelas (Mattulada, 1983: 23). Namun, keadaan itu tidak dapat dipungkiri suatu

asumsi bahwa sebelum kedatangan ketiga Dato tersebut, agama Islam sudah ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kerajaan Gowa. Bahkan Islam sudah mulai menanamkan akar-akarnya dan karenanya sudah dikembangkan sebelum kehadiran ketiga dato' tersebut.

Dalam tradisi penulisan sejarah penyebaran Islam di Indonesia pada pase pertamanya ialah dengan melihatnya dalam satu sekwen dari sejarah perdagangan di Nusantara. Demikianlah, kedatangan Islam di Gowa misalnya, tidak dapat dipisahkan dari kedatangan-kedatangan orang-orang Melayu (Palallo, 1966: 54) yang terlebih dahulu telah memeluk Islam di Nusantara. Dapatlah dibayangkan betapa mereka mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri yang dikunjunginya berdasarkan thesis dasar bahwa setiap Muslim adalah missi agamanya, dan dari sudut ini pula mereka harus dilihat dalam fungsi ganda, pedagang dan muballigh.

Dengan dasar pemikiran di atas mudahlah dipahami bahwa para muballigh Islam sudah bertebaran di dalam wilayah Kerajaan Gowa jauh sebelum periode ketiga dato tersebut. Hal ini jelas, sebab seperti diuraikan di atas, pedagang-pedagang Melayu dari berbagai tempat sudah berdatangan di Gowa sejak dekade pertama abad ke-16 (Mattulada, 130-131). Bahkan ketika orang-orang Portugis datang di Gowa pada tahun 1512 mereka mendapati bukan saja pedagang Melayu yang memegang kontrol perdagangan jalur lintas Maluku tetapi juga pedagang-pedagang dari Jawa. Dalam sebuah surat kiriman Antonio de Paiva kepada Penguasa Portugis di Gowa (India) dalam bulan Nopember 1545 yang memuat tentang hal ihwal negeri-negeri yang dikunjunginya dalam kegiatan missi perdagangan dan missi agama yang ditugaskan kepadanya oleh Ruy Vaz Pereira, ia menyebutkan:

Lawan saya adalah pedagang Melayu Islam ... dari Semtana (ujung Tanah), Peo (Pahang), dan Patane (Patani), yang berusaha supaya raja merobah maksudnya (untuk masuk Kristen) karena sudah lima puluh tahun lebih mereka datang berdagang di situ ... (Perlas, 1973: 48).

Dari keterangan di atas maka Jika dilaporkan oleh Antonio de Paiva itu benar, maka keterangan di atas adalah berita yang paling tua mengenai sejarah orang-orang Melayu di Sulawesi Selatan begitu pula tentang sejarah dakwah Islam di kawasan ini. Tetapi penilain itupun masih relatif berdasarkan spekulasi subyektivitas sejarah, sebab apakah keberatannya untuk melihat awal dari sejarah Islam di Sulawesi Selatan sejak beberapa abad sebelumnya, sejajar dengan persepsi mengenai kedatangan Islam pada banyak tempat lainnya di Nusantara. Bahwa mengapa pola umum penyebaran Islam di Indonesia yang berlangsung dalam dua tahap tidak dapat diaplikasikan dalam pola penyebaran Islam di Gowa. Tahap pertama, kontak dan kenalan awal dengan Islam, disusul penerimaan Islam utamanya oleh penduduk pelabuhan dan daerah pesisir. Ini berlangsung dalam masa lima abad sejak abad ke-1 H/ ke-7 M sampai abad ke-5 H/ ke-12. Tahap kedua, propagasi extensif dan penerimaan Islam secara universal bukan hanya sebatas di daerah pesisir tetapi sudah menembus dinding-dinding daerah dibelakang batas patani. Ini berlangsung dari abad ke-6 H/ ke-13 M.

Memang ada keberatan untuk memasukkan sejarah Islam di Gowa dalam lingkup kedua pase dari pola umum di atas, ialah karena tidak adanya bukti-bukti. Akan tetapi keberatan itu akan segera hilang apabila dimasukkan dalam kerangka pertimbangan geografis dan dari segi ini pulalah akan selalu muncul fakta abadi: Gowa lahir, hidup dan berkembang, mampu mencatat sejarah politik dan perdagangan internasional yang gemilang, dalam lingkup

daerah pantai. Di balik "*geographical viewpoint*" sorotan geografis, dilihat dari potensi alamiah, Gowa dan Sulawesi Selatan pada umumnya tidak kalah dengan tempat lain di Nusantara.

Atas dasar premis di atas dapatlah di duga dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya Islam sudah sampai di kawasan ini dalam tahap pertama dari perkembangan Islam di Nusantara yaitu antara abad ke-1 H/ke-7 M dan ke-6 H/13 M.

Generalisasi itu akan segera nampak kekuatannya apabila dilihat bahwa sampai abad ke-16 pun route perdagangan internasional masih menempuh jalur lintas Arab, Persia, Gujarat, India terus ke Malaka (sebelumnya boleh menyimpang ke Cailon) dan seterusnya Ke Canton (Cina). Dari Malakahlah jalur itu terpecah ketempat lain di Nusantara termasuk ke Sulawesi Selatan.

Jika route perdagangan itu dipahami sebagai hasil dari suatu proses perkembangan yang panjang, kiranya jalur lintas itu sudah berlaku sejak berabad-abad sebelumnya, yaitu semenjak perdagangan ke Timur hanya dikenal pedagang-pedagang Arab baik sebelum maupun sesudah Islam.

Sebagai bahan konfirmatif, perlu disebutkan bahwa dahulu kala, pada permulaan abad Islam (724 M), serombongan kapilah Persia telah berangkat menuju Tiongkok untuk tujuan berdagang dan mengembangkan agama Islam. Dalam rangkaian itu mereka menempuh jalur lintas dari Teluk Persia berkumpul di Ceylon, kemudian disitu membagi armadanya, ada juga yang menuju Malaya, Jawa, Brunai, Makassar, Kalimantan, Maluku, Aceh dan lain-lain (Boechari, 1971: 15).

Meskipun keterangan di atas tidak disebutkan secara jelas sumbernya, dan hanya dikatakan dari tarik Arab, namun telah membuka wawasan baru dalam sejarah

kedatangan Islam di di Sulawesi Selatan tepatnya di Makassar dan sekaligus merupakan data banding dari dugaan terdahulu.

Sayed Alwi B. Tahir al-Haddad, Mufti Kerajaan Johor Malaya ketika memberika keterangan tertulisnya disekitar awal datangnya Islam di Indonesia, dengan mengutip laporan perjalanan seorang saudagar dari kawasan Teluk Persia, berkata:

Sulaiman Assirafi, pedagang dari pelabuhan Siraf di Teluk Persia yang pernah mengunjungi Timur jauh berkata, bahwa di Sala (Sulawesi) terdapat orang-orang Islam pada waktu itu kira-kira pada akhir abad ke II Hijriah. Hal ini (menurut Al Haddad) tidak perlu dijelaskan lagi karena pedagang rempah dan wangi-wangian yang terdapat di Maluku sangat menarik pedagang-pedagang Muslimin untuk berkunjung ke Maluku dan tempat-tempat yang berdekatan dengan kepulauan itu (Boechari, 1971: 12).

Kecuali kalau harus ada data lokal, keterangan yang dikemukakan sudah cukup memberi gambaran betapa Islam sudah menginjakkan kakinya di kawasan ini semenjak tahap pertama dari periodesasi Islam di Indonesia. Dalam kaitannya dengan issue ini terdapat sebuah mitos yang amat menarik mengenai lini keturunan kekeluargaan Bugis, yang berbunyi demikian:

Ini adalah kenyataan kekeluargaan Bugis, yang asal nenek moyangnya bernama Bulqis Putri raja jin yang kemudian bersuami dengan nabi Allah Sulaiman bin Daud Alaihimassalam. Dari perkawinan itu lalu mendapat seorang putra bernama datuk Paligi. Ia mendapat putera yang diangkat jadi raja bernama La Pattatu'. Ia mendapat putera yang juga di angkat jadi raja bernama Batara Buah (Abdullah, 1977: 114).

Syekh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fattani, yang memperoleh daftar keturunan kekeluargaan Bugis itu dari

Sultan Pontianak, Sayyid Muhammad bin Sayyid Abdurrahman al-Qadhi, memulai cerita mitos itu dalam bukunya, *Hadiqatul Azhar*. Lebih jauh dikatakannya, seperti yang dikutip oleh wan Muhammad Shagir Abdullah, bahwa "Raja yang keempat puluh bernama Lamadasila. Beliau inilah yang pertama memeluk agama Islam di tanah Bugis. Tahun 800 H (1397 M). Kemudian dari itulah barulah seluruh keluarga Bugis masuk Islam (Boehari, 1977: 115). Walaupun awal berita itu sangat bersifat mitologis akan tetapi pada akhirnya sampai pada dimensi rasional yaitu memberikan petunjuk akan suatu fase kedatangan Islam dikawasan Sulawesi Selatan jauh sebelum apa yang selama ini dikenal.

Dengan membandingkan secara cermat kedatangan beberapa penyebaran Islam di Nusantara di sekitar dekade pertama abad itu (abad ke-10) yaitu kedatangan Syekh Abdul Qadir al-Mustansir al-Abbasy yang meninggal di Pasai 882 H/1419 M. Syekh Safiuddin al-Abbasy yang tiba di Paya-Pattani tahun 1400 M dan berhasil mengislamkan raja Budha bernama Antira yang kemudian bergelar Sultan Muhammad, masuk Islamnya Raja Malaka, Sultan Muhammad dalam tahun itu juga 1400 M, begitu pula dengan Maulana Malik Ibrahim di Gresik Jawa Timur tahun 1419 dan dengan kedatangan Islam di Sulawesi Selatan tahun 1391M, rupanya dengan melihat perbandingan tahun yang saling berdekatan, telah terjadi kampanye penyebaran Islam dalam periode itu secara serentak di Nusantara. Pada masa-masa perkembangan berikutnya dalam propaganda Islam dilakukan secara besar-besaran dengan membanjirnya pedagang-pedangan Melayu datang ke Gowa dan seiring dengan ditemukannya sistem aksara Lontara di Gowa, maka mulailah dikenal adanya nama-nama yang diduga sebagai muballigh-muballigh Islam.

Sumber Gowa sendiri memberitakan akan adanya seorang Jawa yang pernah menghadap kepada raja Tumapa'risi Kalonna. Sumber itu menyebutkan orang Jawa tersebut bernama I Galassi, "Latong anne nabattui Djawa nikana I Galasi" (G.J. Wolhoff, t.th: 19). Nama Jawa menunjukkan bahwa orang itu datang dari suatu tempat dibagian Nusantara disebelah Barat Sulawesi, jadi tidak perlu mesti dari Pulau Jawa, besar kemungkinannya dari Sumatera atau Malaka.

Berdasarkan pemahaman tentang fungsi ganda seorang saudagar Melayu, yakni seorang pedagang dan muballig, kiranya I Galassi dapat diyakini sebagai mubalig betapapun tidak ada keterangan yang jelas tentang maksud kedatangannya menghadap raja, sebab andaikata dia bukanlah orang yang mempunyai peranan terasa tidak mungkin namanya akan di tulis di dalam kronik Gowa. Kemungkinan besar dia adalah orang Melayu, karena sudah merupakan kebiasaan orang Bugis Makassar waktu itu menyebut semua orang dari luar Sulawesi Selatan sebagai orang Jawa.

Selanjutnya tercatatlah kedatangan Nahkoda Bonang yang berkaitan dengan kedatangan I Galassi, yaitu berturut-turut dari masa pemerintahan Tumapa'risi Kallonna Karaeng Tunipallangga. Muballig yang satu ini membawa serta bersamanya orang-orang Melayu dari Pahang, Patani, Campa, Minangkabau, Johor (Sewang, 1997: 106).

Tahun 1580 pada masa pemerintahan I Mangngorai Daeng Mammata Karaeng Bontolangkasa Tunijallo, datang ke Kerajaan Gowa Sultan Ternate yang bernama Sultan Babullah. Kedatangan Sultan ini dinyatakan oleh Abdur Razak Patunru sebagai berikut:

Pada masa pemrintahan baginda, yaitu dalam tahun 1580, Sultan Kerjaan Ternate yang bernama Babullah, datang

ke Sombaopu, ibu kota Kerajaan Gowa, berkunjung kepada Raja Gowa (Patunru, 1979: 8).

Rupanya kedatangan Sultan Babullah ke Gowa adalah sebagai realisasi dari suatu deklarasi yang pernah dicetuskan di Gresik, Jawa Timur, pada abad ke-15 M. Yang dikeluarkan dengan permusyawaratan antara Kerajaan Ternate, Demak dan Pidie. Ketiga kerajaan itu sepakat bahwa dalam rangka program Islamisasi di Nusantara perlu adanya pembagian atas tiga zona garapan. Nusantara bagian Timur dipercayakan kepada Ternate, Nusantara bagian Tengah ditangani oleh Kerajaan Demak dan bagian Barat diserahkan kepada kerajaan Pidie (Yakub, 1979: 8).

Seberapa jauh hasil yang telah dicapai oleh Sultan Babullah dalam misinya tidak diberitakan, kecuali bahwa Raja Gowa dengan adanya propagansi dari Ternate itu, telah berpikir-pikir dan menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan strategis bahwa apabila Islam diterima dari Ternate ada kemungkinan Gowa berada dibawah pengaruh Ternate. Demikianlah dalam hati kecilnya Baginda raja Gowa telah sudi menerima Islam, tetapi jangan hendaknya di bawah pengaruh Kerajaan Ternate yang dekat tempatnya (Hamka, 1976: 289).

Jika penolakan Raja Gowa Tunijallo, sebagaimana disebutkan di atas, adalah atas pertimbangan politis lebih dari karena Islam itu sendiri yang tidak berkenan dalam hati raja, maka dapat dimengerti bahwa penolakan itu hanya karena pihak Ternate yang mendakwahrkannya. Dengan kata lain, Islam sudah dapat diterima bersamaan dengan ketiadaan kekhawatiran politis. Dengan konstalasi ini, besar kemungkinan bahwa raja Gowa sudah rela masuk Islam atas ajakan muballig Melayu yang menurut raja mendakwahkan Islam tanpa propensialitas politis.

Keadaan semacam ini, dimana mubalig-mubalig datang silih berganti secara berkesinambungan, telah

berhasil membentuk komunitas Islam yang semakin hari semakin menunjukkan estensitas dan intensifitasnya sebagai dasar yang kuat akan berdirinya kesultanan Islam yang diproklamasikan dengan kedatangan Dato ri Bandang dalam dekade pertama abad tujuh belas.

2. Proses Masuknya Islam di Kerajaan Gowa (Sulawesi Selatan)

Sudah merupakan pendapat umum bahwa Raja Gowa dan Tallo yang mula-mula menerima agama Islam dengan resmi sebagai agamanya ialah I Mallinkang Daeng Manyonri selaku Raja Tallo yang juga menjabat sebagai Mangkubumi dalam Kerajaan Gowa bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam dan I Mangarangi Daeng Manrabria selaku Raja Gowa ke 14 bergelar Sultan Alauddin (1593-1639). Bahkan keduanya dipandang sebagai cikal bakal dari raja bergelar sultan sesudahnya (Ali, 1966: 10). adanya dwi tunggal tersebut di pandang sebagai raja yang pertama masuk Islam dari kalangan raja-raja Gowa dan Tallo. Apa yang perlu diulang disini, adalah petunjuk akan adanya kemungkinan seorang raja yang masuk Islam sebelum kedua raja tersebut dapat ditelusuri melalui petunjuk arkeologis. N. A. Baloch, melihat adanya kemungkinan tersebut:

We have one in to this digression to underline the fact Islam was known and favoured by the more intelligent and influential sections of the people on the Celebes long before the reign of Sultan Alauddin. Not only his uncle, but probably his forefathers had favoured Islam and some of Gowa was one of them (Baloch, 1980: 45).

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa golongan intelektual yang berpengaruh dari kalangan masyarakat Sulawesi Selatan telah menaruh respek kepada Islam jauh sebelum I Mangnga'rangngi Daeng Manrabria

yang bergelar Sultan Alauddin Tuminanga ri Gaukannya menerima Islam sebagai agama resmi Kerajaan Gowa. Termasuk dalam golongan itu leluhur-leluhur Sultan Alauddin yang bahkan beberapa diantara mereka telah menerima Islam, diantaranya ialah I Tadjibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta (1565-1575), Raja Gowa ke-11.

Apa yang melatar belakangi pendapat di atas, yang pertama ialah ditinjau dari letak makam sebagai data dan bukti arkeologis. Dalam gugusan makam raja-raja Gowa di Tamalate Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, di samping makam Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin dan Sultan-sultan lainnya terdapat dua buah makam dibawah satu kubah. Berdasarkan petunjuk yang ada dimakam tersebut adalah makam dua raja bersaudara, yaitu I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1547-1565) dan I Tadjibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta (1565-1575) masing-masing sebagai raja Gowa ke-10 dan ke-11. Kedua makam tersebut membujur dari Utara ke Selatan, sebagaimana halnya tata penguburan Islam. Hal ini merupakan petunjuk arkeologis yang dapat berbicara bahwa kedua raja yang bersemayam di dalamnya sudah masuk Islam di masa hidupnya, namun akan lebih jelas lagi apabila makam itu dibuka untuk dilihat kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di duga bahwa sejak abad ke 15 agama Islam sebenarnya sudah sampai ke wilayah Kerajaan Gowa, sebagaimana yang tercatat dalam *Lontarak Pattorioloang* bahwa Kerajaan Gowa kira-kira pada tahun 1561, yaitu pada masa pemerintahan raja Gowa 10, Tunipallangga I Marigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Ulaweng (1546-1565), sudah ditemukan sebuah perkampungan Muslim di Makassar, penduduknya terdiri atas pedagang Melayu yang berasal dari Campa,

Patani, Johor dan Minangkabau (Sewang, 1997: 106). Para pedagang tersebut mengutus Datuk Anakoda Bonang untuk menghadap pada raja Gowa agar mereka dapat diberi sebuah kawasan perkampungan untuk menetap di Makassar, seperti yang terdapat dalam *Lontara*:

Latommi napappalakki empoang Jawa nikanaya Anakoda Bonang. Naia erang-eranna ri Karaenga, nappala'na empoang, kontua anne: kamaleti sibatu, belo sagantuju pulona sowonganna, sakalla' sikayu, bilu'lu sikayu, cinde ilau sitangga kodi. Nakana Anakoda Bonang ri Karaenga Tunipalannga; "appaki rupana kupala'-palaka rikatte karaeng; "nakamo karaenga: "apa?" Nakanamo: "kipalaki, tanipantamaia embammang, tanigayanga punna nia'anammang, tani rappung punna nia' salammang." Naniioi ri Karaenga; nakanan karaenga; tedongkujanjo maposo nakuparamme, mabattala' nakutaroi, alaikaupaseng parangku tau, naiajia tamammunoako ributtaku punna kuasenga (Sewang, 1997: 106).

Artinya:

Dialah yang meminta tempat kediaman pada orang Jawa yang disebut Anakoda Bonang. Adapun persembahannya kepada raja ketika ia meminta tempat kediaman, ialah: sepucuk sepucuk bedil yang bernama "*Kamaleti*", 80 *junjungan* "*belo*" (pinacu), satu kodi kain *sekelat*, satu kodi kain *beludu* dan setengah kodi "*cinde ialu*" (sutra berbunga). Kata Anakoda Bonang pada Raja Tunipalangga: "Empat macam kami harap-harapkan dari Tuanku; "maka menyahutlah Raja itu "apa itu?" Ia menjawab: kami minta supaya jangan dimasuki pekarangan kami [dengan begitu saja]; janganlah kami dikenakan peraturan "*nigayanag*" bila ada anak kami; dan janganlah kami dikenakan

peraturan "*nirappung*" bila ada kesalahan kami. Maka diperkenankanlah [permintaan itu] oleh Raja, dan berkatalah Raja: Sedangkan kerbauku bila lelah kuturunkan ke dalam air, bila bebannya berat saya turunkan sebagian, apalagi engkau seorang manusia, akan tetapi janganlah engkau melakukan pembunuhan dalam kerajaanku di luar pengetahuanku.

Keterangan tertulis dari *Lontarak Pattorioloang ri tu Gowaya* di atas, memberikan informasi bahwa kedatangan orang-rang Melayu mendapat perlindungan istimewa dari kerajaan untuk menempati daerah sekitar pelabuhan Somba Opu di Kampung Mangalekana. Adapun yang dimaksud dengan orang Jawa dalam *lontarak* di atas adalah orang-orang Melayu yang terdiri dari orang Pahang, Patani, Campa, Minangkabau dan Johor. Hal ini dapat ditelusuri dari pada dialog Anakoda Bonang dengan raja:

Nanakanatodong, "Siapai rupanna nupailalang kana-kana?"
Nakanamo Anakkoda Bonang, "Sikontukang Ikambe ma'lipa' baraya kontui Pahangan, Patania, Campaya, Marangkaboa, Johoroka" (Sewang, 1997: 107).

Artinya:

Berkatalah Raja: "berapa macam orang kau masukkan ke dalam permintaanmu itu? "berkatalah Anakkoda Bonang, "Semua kami yang bersarung ikat ialah orang Pahang, Patani, Campa, Minangkabau dan Johor.

Hubungan baik antara pedagang Melayu dengan penduduk setempat, menyebabkan mereka mendapatkan tempat istimewa di hati raja. Jadi, tidak mengherankan jika Raja Gowa berikutnya, yaitu Karaeng Tunijallo (1565-1590) memberikan fasilitas tempat ibadah dengan mendirikan masjid di tempat pemukiman mereka, di Mangallekana.

Mesjid Mangallekana merupakan masjid pertama yang dikenal dalam sejarah Sulawesi Selatan. Mesjid ini hancur, menyusul penghancuran Benteng Somba Opu sebagai akibat kekalahan Gowa dalam Perang Makassar antara Sultan Hasanuddin dan VOC, belakangan lokasi mesjid tersebut terkikis oleh aliran Sungai Jeneberang.

Dalam *Lotara Lontarak Pattorioloang ri tu Gowaya* tercatat sebagai berikut:

Iapa anne karaeng ampambangungangi masigi ri Mangallekana, nikellainna majannang mammempo ansuroi manaik hajji (Sewang, 1997: 107).

Artinya:

Raja inilah yang mendirikan masjid di Mangallekana, bagi para pedagang, agar mereka mau tinggal menetap dan memberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah haji.

Selain dibangun Masjid Mangallekana, mereka juga diberikan kebebasan berdakwah dan lebih dari itu Karaeng Tunijallo sendiri yang memerintahkan mereka untuk ke Mekkah di samping untuk menunaikan ibadah haji juga untuk mengambil guru dari sana untuk menuntun mereka dalam Islam.

This religion so much ground here that the Macassars by means of the Malays dispatched an embassy to Mecca to fetch an stadja, or priest from that place for the purpose of instructing them in the religion of the Arabian imposter (Stavorinus, 1798: 206).

Dari keterangan di atas dapatlah dibayangkan betapa besarnya perhatian Karaeng Tunijallo terhadap perkembangan Islam di wilayah kerajaannya, suatu hal yang tidak mungkin diberikan oleh orang yang bukan dari kalangan keyakinan yang sama (Islam).

Kehadiran para pedagang muslim Melayu tersebut, tentunya akan membawa implikasi sosial, seperti terjadinya pertukaran budaya melalui interaksi sosial diantara pedagang dengan penduduk setempat. Dengan demikian bisa saja terjadi penduduk setempat sudah ada yang tertarik untuk memeluk agama Islam, sebelum raja Gowa dan Tallo menerimanya pada tahun 1605. Hal yang sama bisa juga terjadi pada para pedagang Makassar diperantauan, ketika mereka melakukan interaksi dengan penduduk setempat di rantau yang sudah lebih dahulu menganut agama Islam (Palallo, 1966: 54). Hal ini dimungkinkan terjadi akibat dari hubungan keakraban antara orang Melayu yang Islam dengan orang-orang Makassar dan Bugis sebelum Islam, memungkinkan terjadinya pra-kondisi yang melancarkan penerimaan Islam oleh masyarakat Bugis Makassar. Dapat diduga bahwa agama Islam sudah dianut secara perseorangan dikalangan orang Bugis dan Makassar baik melalui pergaulan dengan pedagang Melayu Islam yang datang ke Makassar, maupun dengan pertemuan para pedagang Makassar dan Bugis sendiri di negara-negara Islam yang mereka datangi (Mattulada, 1983: 132).

Sumber Gowa menyebutkan, bahwa awal abad ke 16 telah ditemukan pemukiman orang Bugis-Makassar di beberapa tempat di Nusantara yang penduduknya sudah menerima agama Islam seperti di Banten, Ternate dan daerah lainnya. Patut dicatat bahwa imigran-imigran pertama Sulawesi Selatan dikenal dengan nama "Makassar" sebagaimana yang tercermin pada nama pemukiman mereka, sedangkan pemukiman-pemukiman berikutnya disebut. Kampung Bugis, kendatipun di antara yang bermukim di situ terdapat juga orang Makassar.

Dengan demikian bila surut kebelakang untuk mengkaji kontak pertama masyarakat Sulawesi Selatan dengan Islam maka sebelum agama Islam dijadikan agama

resmi di Kerajaan Gowa dan Tallo, agama Islam telah meluas di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Pada waktu kerajaan Malaka jatuh ketangan Portugis pada tahun 1511, banyak terdapat pedagang-pedagang Islam yang mencari pelabuhan lain untuk menjalankan perdagangan. Salah satu tempat yang mereka kunjungi adalah Sulawesi Selatan. Keadaan itu menurut Mattulada (2011: 46) mematangkan diterimanya Islam oleh Raja Gowa dan Tallo, pada permulaan abad ke 17. Islam diterima sebagai agama Kerajaan bukanlah suatu keajaiban melainkan suatu yang telah bertumbuh dan lahir secara wajar sesuai hukum-hukum perkembangan suatu jalan hidup keagamaan.

Dari eksposisi di atas ternyata Raja Gowa dan Tallo, I Mallinkang Daeng Mannyonri - I Mangnga'ranggi Daeng Manra'bia hanyalah puncak dari proses pengislaman yang telah membawa Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan masuk Islamnya pun akan dilihat dari sudut ini. Mengenai tanggal resmi masuknya Islam kedua raja tersebut seperti yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan, diantaranya Roelof Blok (1848: 11), S.T. Raffles (1817: CLXXXVI), A.J.L. Couver (t.th.: 15) dan Erkelens (1897: 83), B. Schrieke (1960: 65) serta A. Ligtoet (1880: 68) yang mengutip dari *Lontara Bilang* atau *Dag Boek* (catatan harian) Kerajaan Gowa ditulis penerimaan Islam Raja Gowa sebagai berikut:

Raja yang memeluk Islam pada tanggal itu ialah Raja Tallo yang juga menjabat sebagai mangkubumi dalam kerajaan Gowa, yakni I Mallinkang Daeng Manyondri, dan bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam yang bersamaan dengan Raja Gowa I Mangnga'rangngi Daeng Manrabia juga mengucapkan syahadat dan bergelar Sultan Abdullah.

Hera 1603 Hijara' sanna' 1015 22 Septembere', 9
Jumadele'awala', malam Juma' Namantama Islam
karaenga rua sisari'battang".

Artinya:

1603 Masehi, 1015 Hijriyah, 22 September, 9 Jumadil Awal, malam Jumat, kedua raja bersaudara memeluk agama Islam.

Pendapat kedua yang mengatakan Islam masuk di Kerajaan Gowa pada tahun 1605, hal ini dikemukakan oleh Crawford, Matthes yang mengambil pijakan dari Kronik Tallo (Abdurrahim dan Ridwan Borahima, 1974: 15). Sementara pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Islam baru masuk di Kerajaan Gowa pada 1607, sebagaimana dalam, *Makasaarche Historien* (Bleeker, 1855: 120).

J. Noorduyn (1956: 253) dalam usahanya memecahkan mengenai beberapa versi tentang awal masuknya Islam di Kerajaan Gowa mengatakan bahwa sebenarnya itu hanya merupakan satu perbedaan, jadi hanya kesalahan penulisan, hasil rumusan dan analisisnya serta perhitungan yang akurat dengan mengambil dasar dari *Lontara Bilang* atau *Dag Boek* (catatan harian) Kerajaan Gowa, maka dia berkesimpulan bahwa waktu yang tepat masuknya Islam di Kerajaan Gowa adalah 1605 M/1014:

These data are sufficient to account that the figure 3 in the diary as well as the 6 in the chronicle of Gowa are both scribes errors and that the year 1605 (in the chronicle of Tallo) was meant in cases. (Noorduyn, t.th.: 146).

Bahwa angka 3 dalam catatan harian begitu pula angka 6 dalam kronik Gowa menunjukkan kesalahan sedangkan sebenarnya yang dimaksud adalah 1605 seperti yang ada dalam kronik Tallo. Bagaimana cara penyelesaian itu dilakukan, membawa dia kepada tahun diangkatnya kedua raja tersebut sebagai tolak ukur.

Dalam *Lontara' Patturioloanga ri Tugowaya* disebutkan: Nasampulonnanruwa bulang Sappara' ri sampulona allima mese'na Juni ri bangnginna Arabayya ri tette sagan tuju garagantaya namatempo karaenga Tumenanga ri gaunkanna, hijrah 1049 ri hera 1639 ... 956 (ruantaungi assagantuju bulang anruwampulo angngannang (allonna) bangnginna nanapilaritodong karaenga tumenanga ri gaunkanna (Wolhoff, t.th: h. 61).

Sedangkan menurut *Kronik Tallo* disebutkan:

"Ilalanna bulang akatoboro', sipattangna bulang Jumadili Awala' riallonna ahaka ritette' sampulo asse're garantaya ri alloa nanapilarimo gaunkanna ... (Rahim, 1975: 24).

Jika diadakan perhitungan semenjak sejak meninggalnya Karaeng Matoaya sampai meninggalnya Sultan Alauddin yang berselang waktu 956 hari (2 tahun, 6 bulan 26 hari) seperti disebutkan dalam *Kronik Gowa* ternyata waktu wafatnya Karaeng Matoaya jatuh pada tahun 1636 M/1046 H, bulan Oktober bersamaan dengan bulan Jumadil Akhir. Adapun menurut perhitungan Syamsiah hanya menghitung bulannya saja tanpa memperhitungkan harinya sedangkan menurut Qamariyah baik perhitungan menurut hari maupun bulan keduanya dapat diberikan justifikasi. Kalau Sultan Alauddin meninggal dalam usia 53 tahun dan Sultan Abdullah dalam usia 63 tahun dan kalau yang pertama masuk Islam pada usia 19 tahun dan yang kedua usia 32 tahun, mestinya keduanya sudah menjadi muslim masing-masing 34 dan 31 tahun ketika mereka meninggal dunia. Maka menurut J. Noordoyn, jikalau angka yang ditaksir ini dikurangi dengan tahun wafatnya kedua raja tersebut baik menurut tahun masehi maupun hijriyah,

hasilnya adalah 1605 M/1015 H. Akan tetapi dengan pengurangan itu, 1015 harus dikurangi satu tahun lagi berdasarkan kenyataan bahwa antara tahun masehi dan hijriyah selalu ada perbedaan (Noordoyn, 1972: 120).

Dengan cara penyelesaian di atas, maka berdasarkan sumber-sumber yang ada, tanggal 22 September/9 Jumadil Awal pada hari Kamis malam/malam Jumat tahun 1605 M/1014 H dapat diterima kredibilitasnya sebagai penanggalan resmi masuknya Karaeng Matoaya dan Tumenanga ri Gaukanna kedalam Islam.

Jika cara penyelesaian di atas diambil sebagai tolak ukur bagi konversi kerajaan secara formal ke dalam Islam, maka tiada alasan untuk tidak menerima persepsi bahwa Karaeng Matoaya dan Tumenanga ri Gaukanna masuk Islam pada waktu yang sama, namun dengan keyakinan bahwa Karaeng Matoaya sebagai pengambil inisiatif. Ini dapat dilihat dari nama Islam yang diberikan kepadanya sebagai Sultan Abdullah Awwalul Islam dan I Mangnga'rang Daeng manram'bia diberi gelar Sultan Alauddin.

Namun masalah yang belum terpecahkan dalam hubungannya dengan Sultan Abdullah ialah pemberitaan baik *Kronik Tallo* maupun catatan harian Kerajaan Gowa yang menyebutkan: "*Karaeng antama Isilang rua assaribattang*", raja yang masuk Islam dua bersaudara. Berbagai kemungkinan dapat timbul dari siapa sebenarnya sebagai saudara yang ditemani oleh Sultan Abdullah yang namanya tidak disebutkan dalam sumber itu. Tetapi tanpa menutup kemungkinan lain, kemungkinan itu kiranya harus dikaitkan dengan peristiwa konversi formal kedalam Islam yang terjadi bagi diri Raja Tallo bersama Raja Gowa sekalipun tidak mesti terjadi pada jam yang sama.

Sepanjang pengertian Islamisasi formal Gowa itu disepakati terjadi sejak bulan Sultan Abdullah/Alauddin masuk Islam, maka partner Abdullah harus dicari dari

orang yang terdekat dengan keduanya dalam arti bukan saja saudara Abdullah tetapi juga mestinya orang terdalam dari Alauddin baik karena hubungan darah ataupun dan lebih dari itu, karena kompetensinya dalam istana. Dengan demikian timbul kesan seakan ada trio yang terlibat, tetapi dengan Abdullah dengan saudaranya itu yang terdekat di hati palontara.

Kecenderungan ini akan melibatkan seorang tokoh wanita, janda Tunijallo, saudara Abdullah dan ibu Alauddin, I Sambo I Daeng Niasseng Karaeng Pattingalloang. Setelah karaeng ri Makkoayang wafat I Sambo (anaknya) inilah yang menggantikannya selaku Ma'gau ri Tallo di samping selaku Mangkubumi/Perdana menteri di Gowa. Ia pernah ma'bali gau suaminya Tunijallo ketika yang terakhir ini menjabat sebagai Somba di Gowa. Melihat dari segala sudut latar belakangnya kiranya dialah (I Somba) Saudaranya Abdullah yang dimaksudkan sebagai partnernya. Hal ini diperkuat dalam *Lontara Patturioloanga ri Tu Talloka* disebutkan "Karaeng baineya Assa'ribattangi tumenanga ri agamana" (Noordoy, 1972: 14).

Kiranya tidak terdapat perbedaan pendapat berdasarkan sumber-sumber yang ada, tentang siapa yang meng-Islam-kan raja. Dalam histografi tradisional "*Lontarak Wajo*" ulama Islam yang meng-Islam-kan kedua raja tersebut dan rakyatnya ialah Abdul Makmur Khatib Tunggal (kemudian lazim disebut sebagai Dato ri Bandang) yang berasal dari kota Tengah Mingkabau. Dalam *Lontarak Patrioloanga ri Tu Goaya* disebut "*Marangkabo Ampasahadaki, Kota wanga arenna pa'rasanganna, Katte' tunggala' areng kalenna Dato ri Bandang*" (Wolhoff, t.tp: 57).

Dato ri Bandang di utus oleh Sultan Aceh, Sultan Sidi Mukammil, atas permintaan Raja Gowa. Persiapan mubalig Islam untuk menghadang misi Kristen yang telah menyebarkan agamanya yang sudah sedemikian intensif

pada waktu itu sehingga raja Gowa menjadi bingung tidak dapat menentukan pilihannya. Dalam keadaan demikian maka raja lalu meminta pertimbangan dari rekannya raja (Arung) Wajo yang terkenal arif dan bijaksana, Lamungkatje, Arung Matowa ke-14. Menurut berita-berita lokal yang ada, dalam pertemuan itu mempersoalkan sekitar apakah Allah itu tunggal atau banyak dan ataukah Allah mempunyai ayah dan ibu. Berhubung Arung Matowa sendiri bukan Muslim sehingga tak dapat memberikan ketegasan buat diperpegangi oleh Raja Gowa, maka yang disebut terakhir ini meminta kepada para propagator untuk masing-masing mendatangkan ulama dan pendeta dari pusat (Aceh dan Maluku). Peristiwa itu diceritakan sebagai berikut:

Karena merasa belum puas mereka meminta bantuan guru-guru agama masing-masing pendeta dari Maluku dan ulama Islam dari Aceh, dengan ketentuan mereka akan memeluk dari guru yang lebih dahulu datang. Bangsa Portugis sebenarnya sangat kuat dalam agamanya, tetapi rupa-rupanya, Dom Ruis Perera, Gubernur Maluku, tidak begitu tertarik dalam soal keagamaan, ternyata sangat memperlambat pengiriman pendeta yang sangat diharap-harapkannya itu. Sebaliknya Raja Aceh begitu menerima permintaan ulama dari rakyat Sulawesi langsung mengirim sebuah perahu penuh dengan ulama yang dalam waktu singkat dapat menegakkan agama Islam dengan kokohnya dikalangan rakyat (Arnold, 1979: 39).

Demikianlah Dato Ri Bandang bersama dua orang temannya atau lebih dari itu, Khatib Sulaiman yang lazim disebut Dato ri Patimang, Khatib Bungsu Dato ri Tiro, di utus Sultan Aceh ke Sulawesi Selatan untuk kepentingan

pengislaman. Ketiganya masing-masing mengambil lokalitas tertentu, Dato Bandang di Gowa, Dato Patimang di daerah Palopo (Patimang) dan Dato ri Tiro di Tiro Bulukumba. dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Islam ke daerah Sulawesi Selatan.

Kembali kepada masuk Islamnya raja Gowa ada beberapa persepsi yang mungkin timbul karena tidak ada petunjuk yang jelas maka persepsi itu hanya merupakan dugaan. Kecuali gaya tarik ajaran dan aqidah Islam yang begitu kuat serta pengaruhnya yang intens ke dalam jiwa seseorang, maka ada juga tentunya motif-motif yang bersifat insidental, seperti motif politik dan ekonomi, menyebabkan tidak sedikit penguasa yang masuk Islam. motif-motif itu bukan tidak mungkin timbul, tetapi tidak dapat dianggap dominan. Berdasarkan alasan-alasan politik memang banyak dugaan yang bisa muncul, terutama dengan bercokolnya orang-orang asing di Gowa. Tetapi bukankah Portugis, misalnya, pada waktu itu sudah memasuki era kemundurannya ketimbang suatu kekuatan yang harus dikhawatirkan, apalagi interaksi antara Gowa dengan Portugis sudah berlangsung lama. Sedangkan Belanda belumlah lagi dapat dibayangkan sebagai suatu kekuatan yang akan merepotkan dikemudian hari. Kecuali itu, konversi ke dalam Islam mungkin juga dapat dianggap sebagai alasan yang paling tepat untuk menguasai negeri-negeri Bugis berdasarkan kesepakatan bersama, "siapa yang mendapatkan ke baikan maka harus menyampaikan kebaikan itu kepada saudaranya". Tetapi kalau hal ini yang menjadi dasar, bukankah alasan itu sudah sejak dahulu ada, ketika Tunipalangga, dan bahkan lebih dahulu lagi. Ketika Islam mulai datang di Gowa sehingga nafsu supremasi itu tidak perlu ditunda-tunda. Kecuali itu, masih ada lagi satu kemungkinan politis internal ialah bahwa rupa-rupanya kaum Muslimin sudah demikian besarnya di Gowa sebagai

komunitas Islam yang merupakan kekuatan sosial politik yang sudah perlu diperhitungkan. Situasi aktual seperti itu dapat dijadikan sebagai suatu alasan yang memaksakan raja masuk Islam tetapi dominannya pasti tidak dapat mengatasi motif karena watak Islam itu sendiri.

Namun demikian suatu justifikasi secara umum tidak dapat dibenarkan karena situasi pengislaman di Gowa dengan di Jawa amat berbeda. Islam datang di Gowa menyaksikan imperium yang kuat tak terkalahkan sedangkan Islam di Jawa menyaksikan imperium yang sedang menunggu keruntuhannya.

Di sisi lain, kontak antara raja dengan Islam sudah sedemikian mendalam sehingga Islamnya dapat dimengerti muncul dari keyakinannya terhadap agama itu tanpa tendensi dan propensialitas lain. Hal ini dapat dilihat dari integritas pribadi raja Tallo, misalnya sebagai inisiator pengislaman di Gowa dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

Taena mammelakkai awattu passambayangngang sanggenna antama Isilang nasanggenna mate, passangalinha rewasa akkambana bangkenna naniballei ballo ri anggarrisika, sampuloi assagantuju bangnginna tamassambayang (Rahim, 1975:19).

Jika sembahyang dapat dijadikan tolak ukur bagi kesalehan seseorang maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Islamnya raja semata-mata karena dorongan politis. Sedang motif ekonomi mungkin bisa timbul dari hasrat raja untuk memperoleh dukungan saudagar-saudagar Muslim yang menguasai perniagaan laut sebelum kedatangan imperium Barat, khususnya di wilayah Nusantara. Motif ekonomi di Kerajaan Gowa dapat dilihat sejak perpindahan pedagang-pedagang Muslim dari Malaka, ketika bandar itu jatuh ketangan Portugis pada tahun 1511. Akan tetapi kalau faktor itu yang menjadi motif ke Islaman

raja bukankah perhubungan dagang dan persahabatan antara Gowa dengan orang-orang Muslim dari kota-kota niaga dan kerajaan Islam di Nusantara sudah berlangsung sekian lama jauh sebelum Gowa beralih ke agama Islam.

Kesimpulan

Penyebaran dan kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Kedatangan Islam awalnya melalui perdagangan Internasional dan penyebaran atau penyampaiannya secara lebih mendalam oleh para muballigh yang berasal dari luar atau dari Indonesia sendiri. Penyebaran Islam di Indonesia bahkan di wilayah Asia Tenggara melalui berbagai jalur: perdagangan, pernikahan, memasuki birokrasi, sufisme, pendidikan (Pesantren) dan Kesenian.

Setidak-tidaknya terdapat tiga pola penyebaran Islam di Indonesia, yaitu: pertama, kota menjadi pusat perdagangan dan sebagai basis komunitas muslim dan dari sinilah penguasa setempat di-Islam-kan. Dalam hal ini istanalah yang mengambil tepat penyebaran Islam, seperti Kerajaan Gowa-Tallo, Bone, Wajo dan Bima. Kedua, kaum para pembesar kerajaan yang berguru ke pusat pendidikan Islam, seperti Ternate yang berguru ke Giri, Gresik. Dan ketiga, kesultanan Islam memberikan bantuan kepada suatu kerajaan untuk menaklukkan kerajaan lainnya seperti Kerajaan Demak membantu Kerajaan Banjar dalam rangka menaklukkan Kerajaan Daha, dengan syarat peguasanya harus terlebih dahulu masuk Islam.

Di semenanjung Sulawesi tepatnya di Sulawesi bagian Selatan ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam ialah dikenal dengan nama *Datuk Tellua*. Dalam Lontara disebutkan bahwa *Datuk Tellua* itu yaitu

Abdul Makmur Khatib Tunggal bergelar Dato 'ri Bandang, Sulaiman Khatib Sulung bergelar Dato' Pattimang dan Khatib Bungsu bergelar Dato Itiro. Kerajaan yang mula-mula menerima Islam di Sulawesi Selatan sebagai agama resmi kerajaan ialah Kerajaan Gowa-Tallo. I Mallinkang Daeng Manyonri selaku Raja Tallo yang juga menjabat sebagai Mangkubumi di Kerajaan Gowa bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam dan I Mangarangi Daeng Manrabia selaku Raja Gowa ke 14 bergelar Sultan Alauddin pada hari Kamis tanggal 22 September 1605 M/9 Jumadil Awal 1014 H.

BAB 3

KONTEKS SOSIAL POLITIK KERAJAAN BONE

A. Asal-usul Lahirnya Kerajaan Bone

Bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Terbentuknya Kerajaan Bone sampai sekarang belum dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi untuk menentukan kapan terbentuknya Kerajaan Bone, hanya dapat diperkirakan berdasarkan sumber atau data-data yang ada dengan cara menggali dan mencari keterangan-keterangan tentang Kerajaan Bone agar dapat membantu data atau sumber yang telah ada.

Dalam Lontara yang berisi pemberitahuan tentang daerah Bone diperoleh keterangan bahwa Kerajaan Bone terbentuk pada awal abad ke 14 sekitar 1326 dengan raja yang pertama bernama *To Manurunge ri Matajang* yang digelar "*Mata Silompoe*" (mata yang tajam) (Andi Muhammad Ali, 1984: 1). Gelar *Mata Silompoe* ini diberikan oleh rakyatnya dikarenakan keahliannya dalam menghitung orang yang sedang berkumpul di lapangan betapapun ramainya, sebagian pula menamainya "*Mattasi Lompo*" (Si Lautan Pandang). Dari perbedaan sebutan itu sebenarnya mengandung pengertian yang sama yaitu pandangan yang tajam dan luas (Rahman, *et. all.*, 1985: 12).

Peristiwa penerimaan *To Manurunge* sebagai raja sekaligus Bone menjadi kerajaan, yang berdasarkan suatu perjanjian antara *To Manurunge* dengan para *matowa* (Rahman, 2011: 48). Dalam lontara disebutkan bahwa:

*Iyana mai kilowang riko lamarupe maelokeng tamaseng
tamaraddena mai ri tanata ajanatallajang tudanni mai na
idi'na kipopuang Elomu elo rikkeng passuromu kuwa na*

*mau na anammeng na pattaronnieng rekkurwa muteaiwi ki
tea toi sa narekko tudamme namai na ikona puattakeng
mudongiri temma tippakkeng musalipuri
temmadingikkeng muampiri temmaka rekeng (Ali, 1969:
2-3).*

Artinya:

Hanyalah ini maksud kedatangan kami menghadap di bawah duli tuanku, dengan penuh pengharapan yang amat tinggi; kami mohon kiranya tuanku hendaklah tidak balik kekayaan lagi. Tinggallah tuanku ini dinegeri kami agar tuankulah merajai kami semua. Segala kehendak tuanku, perintah tuanku kami laksanakan. Walaupun anak kami; istri kami; jika tuanku tidak menginginya kami juga ikut tidak menyukainya, asalkan engkau menjaga keselamatan kami dan menjaga harta benda kami.

To Manurunge yang mendengarkan ucapan dari para *matowa* itupun menjawab:

*Ujujungu upari botto ulu upate ri pakka-pakka ulaweng
ada-adamu tau maegae si wettu mabbulo sipeppa'nu maelo
mupancajika Arung (Ali, 1969: 3).*

Artinya:

Demi kesatuan dan persatuan, saya menghargai permintaanmu untuk menjadikan saya sebagai raja.

Tanya jawab antara *To Manurunge* dengan para *matowa* itu kemudian memutuskan untuk mengangkatnya sebagai raja, dan *To Manurunge* menyetujuinya. Dengan kedatangan raja yang pertama itu, dimulailah masa yang dikenal oleh rakyat Bone sebagai masa kerajaan yang

berlangsung sampai tahun 1905 (Sessu, 1986: 9). *To Manurunge* sebagai raja Bone yang pertama memerintah kira-kira 32 tahun yaitu tahun 1326-1356 yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Bone (Mattulada, 1995: 67).

Sebelum berdirinya Kerajaan Bone, tanah Bone adalah gabungan unit-unit politik inti atau persekutuan masyarakat kaum yang disebut dengan *Anang* yang dipimpin oleh *Matowa Anang* (ketua kaum), kemudian setiap *Anang* terbentuk menjadi *wanua* (negeri) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982: 6). Terdapat tujuh *wanua* yang dipimpin oleh seorang *matowa*. Ketujuh *wanua* itu, yaitu: 1) *Wanua Ujung*; 2) *Wanua Ponceng*; 3) *Wanua Ta*; 4) *Wanua Tobojong*; 5) *Wanua Tanete Riattang*; 6) *Wanua Macege* dan 7) *Wanua tanete Riawang* (Mattulada, 1995: 409).

Dalam perjalanannya setiap *wanua* tersebut, terikat oleh rasa seketurunan dari nenek moyang yang sama dan membentuk persekutuan teritorial lainnya dalam sistem kepemimpinan *patrilineal* (kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah). Keadaan seperti itulah yang mengakibatkan munculnya permusuhan di antara satu *wanua* dengan *wanua* lainnya, sampai datangnya *To Manurunge* yang melahirkan konsep kepemimpinan dan peletak dasar dan perubahan-perubahan kehidupan dan perkembangan tanah Bone. Karena dianggap dapat mengakhiri permusuhan di kalangan kelompok-kelompok persekutuan. Dalam perkembangan berikutnya ketujuh *wanua* menyatukan diri dalam satu ikatan yang disebut *kawerrang* (ikatan) (Mattulada, 1995: 410). *Kawerrang* sebagai gabungan dari tujuh *wanua* tersebut kelak yang disebut Tana Bone.

Tanah Bone merupakan suatu kerajaan yang terikat dengan inti kerajaan yang disebut *Watampone* (pusat kerajaan). Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerajaan

dikembangkan berdasarkan kekuasaan sentral dan berpusat pada raja yang disebut *Arung Mangkau* (raja yang berdaulat).

Perjanjian antara *To Manurunge* dengan ketua *wanua* sebagai penetapan hak dan kewajiban diantara mereka dan sekaligus membentuk suatu badan musyawarah atau dewan penasehat dalam menjalankan roda pemerintahan yang disebut dengan *Matowa Pitue* (Mattulada, 1995: 411). Selain menjadi anggota dewan pemerintahan *kawerrang Tanah-Bone* juga masih tetap menjalankan pemerintahan atas *wanua* asalnya secara otonom dan mengkoordinasi *wanua-wanua* lainnya yang tergabung padanya.

Matowa Pitue ini membantu raja Bone, *To Manurunge ri Matajang* di dalam membantu kemaslahatan rakyat Bone (Ali, 1969: 4). Selain menjadi anggota dewan pemerintahan *Kawerrang Tanah-Bone* juga masih tetap menjalankan pemerintahan atas *wanua* asalnya secara otonom dan mengkoordinasi *wanua-wanua* lainnya yang tergabung padanya, seperti *wanua Cina*, *Barebbo*, *Awang Pone* dan *Wanua Palakka* menuju pusat perkembangan suatu negara kesatuan Tanah Bone yang berpusat di *Watampone* (Mattulada, 1995: 410).

Sistem *kawerrang* tersebut berlangsung dari Raja Bone *To Manurunge* pertama sampai Raja Bone ke 9, *La Pattawe Matinroe ri Bettung* pada abad ke 16 sekitar tahun 1590 (Mattulada, 1995: 410). Pada masa pemerintahan raja Bone ke 10, *We Tenri Tuppu* yang bergelar *Maddusila Matinroe ri Sidenreng* menambah alat pemerintahan yang disebut *To Marilalang* (Hamzah, 1979: 71). Raja inilah yang melakukan banyak perubahan dalam sistem pemerintahan seperti intensifikasi pemusatan kekuasaan dalam satu bentuk kekuasaan Tanah Bone, *kawerrang* tidak lagi rangkap jabatannya di samping sebagai *kawerrang* Bone dan kepala *wanua*, *Matowa Pitue* dirubah menjadi *Ade Pitue*, yakni:

1. *Matowa* Ujung menjadi Arung Ujung dan menjadikan ketua dari Adat Tujuh dengan gelaran Tomailaleng;
2. *Matowa* Pongceng menjadi Arung Pongceng;
3. *Matowa* Ta' menjadi Arung Ta';
4. *Matowa* Tibojong menjadi Arung Tibojong;
5. *Matowa* Tanete Riattang menjadi Arung Tanete Riattang;
6. *Matowa* Macege menjadi Arung Macenge, dan
7. *Matowa* Tanete Riawang menjadi Tanete Riawang (Ali, 1969: 23)

Gelar anggota-anggota *Ade Pitue* di atas, masih tetap mengingatkan kepada keadaan semula, yaitu nama-nama *wanua* yang ikut dalam perjanjian dengan *To Manurunge* ketika membentuk *kawerrang Tana-Bone*, tetapi dengan menentukan pembagian lapangan tugas masing-masing sebagai kementrian-kementrian dalam negara sebagai berikut:

1. Arung Macege, urusan pemerintahan Umum
2. Arung Pongceng, urusan keamanan dan pertahanan
3. Arung Tobojong, urusan kehakimaan;
4. Arung Tanete Riattang, urusan pembangunan dan pekerjaan umum;
5. Arung Tanete Riawang urusan keuangan dan ekonomi,
6. Arung Ta', urusan pengajaran dan pendidikan,
7. Arung Ujung, urusan penerangan dan kerohanian (Mattulada, 1995: 411).

Jadi jelas, *Ade Pitue*, bertugas untuk membantu Raja Bone dalam menjalankan pemerintahan di Kerajaan Bone, seperti yang tergambar dalam isi pidato raja Bone ke 10 We

Tenri Tuppu pada saat pelantikan Ade Pitue, disenutkan tentang tugas dan fungsi masing-masing:

Ia mennang upetettonimu Arung Pitu, maElo'ku mua muampiri rilaonrumaE enrengngE duppainna toanana Bone apa makkunraia, enrengngE ia topa maElo'ku musapparang lise'na Sala'saE tatere-tere. Naia kia upatettonimu Arung Pitu, temmulaing, ri tanaE ri Bone, temmuaddimpa massurung, temmappammanna'ko ri ana'mu rekkuwa tekkumisengngi, sangadinna narekko situdangengngi idi maneng wijanna MappajungngE ri Bone pasalisayya'ko inappa toni sia lalo pammanna'mu ri ana'mu ri eppomui (Ali, 1969: 24).

Artinya:

Saya mengangkat engkau menjadi Arung Pitu dengan maksud untuk membantu saya, untuk mengawasi pertanian, mengatur dan menerima tamu kerajaan Bone dan mencari (memelihara) harta benda (perlengkapan) istana yang tersiar. Tetapi engkau sekali-kali tidak berhak memindahkan jabatan yang engkau pangku, kepada anak cucumu sebelum mendapat persetujuan saya, kecuali kalau sudah disetujui oleh Raja Bone yang berkuasa.

To Marilaleng yang memimpin Ade Pitu selaku *pabbicara* mengembangkan kegiatan kenegaraan secara keseluruhan. Raja dengan kesibukan protokoler istana dikelilingi oleh para petugas istana, yakni *ata ri bolang*, para *anakarung* dengan *anregurunya* masing-masing, berkembang menjadi lingkup hidup tersendiri. Untuk melaksanakan hubungan-hubungan agar pengaruh Raja Bone masih tampak dalam kekuasaan pemerintahan umum yang dipimpin oleh To Marilaleng dan Ade Pitu diadakan pula satu

jabatan yang menjadi saluran penyampaian kehendak raja yang harus dilaksanakan oleh *pampawa adê*. Jabatan itu disebut *pakkêdda* dan pejabatnya dinamakan *pêtta makkadaunge Tana*. Pejabat ini adalah semacam raja muda atau kuasa raja dalam urusan pemerintahan negara yang menghubungkan raja dengan *pampawa ade* di satu pihak, dan dia jugalah yang sehari-hari mendampingi raja dalam lingkup istana (Mattulada, 1995: 410).

Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bone makin luas dengan bertambahnya beberapa kerajaan-kerajaan lain yang berada disekitar kekuasaan. Kerajaan-kerajaan kecil itu secara sukarela menyatakan bersedia bergabung dan ada juga yang bergabung karena dikalahkan dalam satu perang. Kerajaan-kerajaan ini disebut dengan *palili*, wilayah yang dikuasai karena perang, antara lain:

1. Citta dengan pemukiman-pemukiman utamanya adalah Lempong, UwungaE, Belawa, kampiri, Data Talloq, Mardewala dan Barang.
2. Bone Tangnga terdiri dari:
 - a. Wilayah Palakka, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Cinennung, Passempa, Urang, yang secara keseluruhan juga disebut Tellumpanuae (tiga negeri)
 - b. Wilayah Awmpone, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Pacing, Matuju, Jalling, Cumpiega dan Unra, yang secara keseluruhan disebut juga LimampanuaE.
 - c. Wilayah Cina, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Kamplebu, Ula Pao, Welanreng, Buki, Laju, Pationgi, yang secara keseluruhan disebut Attangala.

- d. Wilayah Barobo, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Wawonglangi, Cinnong, Mene Galung, Lampoko, dan Bajo secara keseluruhan disebut juga Awangala.

3. Lili ri Aja atau Ajanggala, yang terdiri atas:

- a. Wilayah "*Ettu Payung Tanre*" (tujuh payung tinggi) dengan pemukiman-pemukiman utama: Mampu, Sailong, Timurung, Amali, Ulaweng, Bengo dan Panre.
- b. Wilayah Limampanua (lima negeri) dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Otting, lanca, Ulo, Palongki dan Tajong.
- c. Wilayah PattangkaiE, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Mampu ri Aja, Mampu ri Awa, Kung dan Sijalling.
- d. Wilayah TelumpanuaE, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Sura-sura, Alunge dan Teamusu.
- e. Wilayah Lappa ri Aja, juga dinamai *Ennengergi* Bila-bila, dengan tempat pemukiman-pemukiman utama adalah Libureng, Macerra, Bulu, Tea, Campaga dan Bariegeng.
- f. Wilayah PattampidangE, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Lamoncong, Sanrego, Teko dan Beru.
- g. Wilayah Ennenge Bila-bila ri Lau dengan tempat-tempat pemukiman utama adalah Balli, Mico, Sancerang, Sonrong, Toja dan Saweng.

4. Lili ri Lau terdiri atas:

- a. Wilayah-wilayah Sibulu, dengan tempat-tempat pemukiman utamanya adalah Pati-ro, Kaju, Cinnong, Sampobia, Kalibong, Panelli, Bulu dan Balieng.
- b. Wilayah Wawo Bulu ri Awang dengan tempat-tempat pemukiman utamanya adalah Towang, Pationgi, Lemo, Paoaka, Sunaba, Alla dan Cenrana.
- c. Wilayah Tellu Limpo ri Awang, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Mare, Salangketo dan Tonro.
- d. Wilayah Awang Tangka, dengan pemukiman-pemukiman utama adalah Meru, Salomekko, Cina, Pattimpeng, Bulu Tana, Cani dan Gona

Selain yang disebutkan di atas, terdapat 14 tempat pemukiman lainnya yang bukan atau termasuk *palili* yakni: Malle, Pajakka, Karalla, Aralla, Bulu, Awo, Kawarrang, Callu, Biru, Balakang, Bulu, Maloi, Maduri dan Saga.

Untuk memantapkan dan memperluas wilayah kekuasaan keturunan *To ManurungE*, pemerintah pusat melakukan pengiriman putra-putri bangsawan ke daerah-daerah. Pada umumnya mereka dikawinkan dengan penguasa-penguasa lokal. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan kecil memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pemerintah pusat. Meskipun demikian, dalam banyak hal ketaatan itu lebih banyak dipengaruhi wilayah yang berdekatan dengan kerajaan inti tersebut. Makin dekat dengan kekuasaan pusat, makin dekat pula hubungan emosional dan pengontrolannya, demikian pula sebaliknya.

Dalam perkembangannya kemudian, kerajaan Bone menjadi kerajaan terpenting di Sulawesi Selatan. Pada abad

ke 17 kerajaan ini pernah menjadi taklukan Kerajaan Gowa. Kerajaan ini kemudian dapat membebaskan diri dari penguasaan Kerajaan Gowa berkat persekutuan yang dilakukan antara Kerajaan Bone dengan VOC. Setelah kejatuhan Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone bangkit menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar. Sampai awal abad ke 20, Kerajaan Bone memainkan peran penting dalam sejarah politik di Sulawesi Selatan.

B. Kebudayaan dan Kepercayaan dalam Domain Masyarakat Bone pada masa Pra Islam

1. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial dianggap sangat penting untuk dipergunakan dalam mencari latar belakang pandangan hidup, watak, dan sifat-sifat, berdasar dari suatu masyarakat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat biasanya terjadi dengan sendirinya, akibat pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Bentuk stratifikasi sosial itu berbeda-beda sesuai dengan pertumbuhannya. Makin kompleks suatu masyarakat, makin banyak pula stratifikasi yang tercipta. Bagi masyarakat yang sederhana ukuran pelapisannya masih sangat kecil karena jumlah anggota masyarakatnya yang masih kurang, sedangkan masyarakat yang kompleks ukuran pelapisannya bermacam-macam. Hal itu mungkin dilihat dari segi kekayaan, pendidikan, reputasi, dan mungkin dari segi pengaruh politik (Mappanganra, 2003: 40).

H.J. Friedericy sebagaimana yang dikutip oleh Mattulada (1995: 26) menggambarkan stratifikasi sosial lama Bugis Makassar berdasarkan buku kesusasteraan asli *La Galigo*, *Sure'galigo*. R. A. Kern mengatakan bahwa *Sure'galigo* termasuk kesusasteraan dunia yang paling besar pada zamannya. Tentang jumlah halaman *Sure'galigo*

dikatakan bahwa Matthes telah berhasil mengumpulkan sejumlah kurang lebih 2.848 halaman polio. Bila jumlah ini ditambahkan dengan apa yang telah dikumpulkan kemudian, antara lain oleh J.C.C. Jinker, maka akan tercapai jumlah paling sedikit 7.000 halaman folio. Menurutny pada dasarnya masyarakat Sulawesi Selatan, baik masyarakat Bugis, Makassar, Mandar maupun Tana Toraja mempunyai persamaan dalam pelapisan sosial, yaitu terbagi dalam tiga lapisan pokok, yaitu:

- a. *Anakarung* (*anak Karaeng* dalam bahasa Makassar) adalah lapisan kaum kerabat raja-raja
- b. *Tumaradeka/Biasa* ialah lapisan orang merdeka yang merupakan sebagian besar dari rakyat Sulawesi Selatan;
- c. *Ata* adalah lapisan orang budak, orang yang dipekerjakan karena tidak dapat membayar hutang.

Dari ketiga lapisan masyarakat tersebut masih terbagi-bagi menjadi beberapa poin, *Anakarung* atau *Arung/puang* (bangsawan) dibagi menjadi:

- a. *Anakarung Matowa* (anak bangsawan penuh)
 - 1) *Anakarung Masalla* (putra putri mahkota)
 - 2) *Anakarung Matase* (putra putri raja)
- b. *Anakarung Riolo* (bangsawan Istana)
 - 1) *Anakarung sipue* (bangsawan separuh)
 - 2) *Anakarung Cerak* (bangsawan berdarah campuran)

Sedangkan *Tomaradeka* (orang merdeka) dibagi menjadi:

- a. *To Deceng* (keluarga orang baik-baik)
- b. *To Sama* (orang kebanyakan)

Demikian pula halnya dengan *Ata* dibagi menjadi:

- a. *Ata Mana* (sahaya warisan)
- b. *Ata Mabuang* (sahaya baru).

Dalam usahanya untuk mencari latar belakang terjadinya pelapisan masyarakat, Friedericicy berpedoman kepada peranan tokoh-tokoh yang disebut dalam La Galigo dan ia berkesimpulan, bahwa masyarakat Bugis dan Makassar pada mulanya hanya terdiri dari dua lapisan masyarakat (Mattulada, 1995: 28). Lapisan *Ata* merupakan suatu perkembangan kemudian yang terjadi dalam zaman perkembangan dari organisasi-organisasi pribumi di Sulawesi Selatan.

Sesudah kedatangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan, stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat sudah hilang, terutama lapisan ketiga. Secara struktural golongan *Ata* memang sudah tidak dikenal lagi pada zaman sekarang, namun secara fungsional masih didapati, baik di desa maupun di kota dengan istilah *pembantu rumah tangga* (dalam bahasa Makassar disebut *pajama* = pekerja), misalnya *pajama tana* 'pekerja sawah', *pajama sassa* 'pekerja mencuci/tukang cuci', *pajama batu* 'pekerja batu/buruh bangunan'. Namun pada sisi lain pandangan masyarakat tentang status sosial atau stratifikasi sosial mengalami banyak perubahan disebabkan karena semakin majunya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jika seorang ingin meningkatkan statusnya dalam masyarakat melalui pendidikan yang diperolehnya maka hal ini dapat meningkat. Dengan demikian pendidikan dapat meningkatkan status sosial seseorang dari kedudukan yang rendah ketingkat kedudukan yang lebih tinggi. Hal semacam ini berlaku didalam masyarakat yang sudah mengetahui atau sudah mengalami pendidikan atau pada masyarakat yang sudah berpendidikan.

Lain lagi yang terjadi dalam masyarakat adat lama kedudukannya ditentukan oleh stratifikasi atau status sosialnya dalam masyarakat seperti keturunan atau keluarga

raja statusnya lebih tinggi dari pada status yang bukan raja, keturunan bangsawan dan seterusnya.

Kabupaten Bone sebagai salah satu wilayah yang berada pada saat sekarang ini masih mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan sosial masyarakat atas dibagi menjadi dua tingkatan yaitu:

- a. Bangsawan (puang/andi)
- b. Non bangsawan (orang biasa) (Hamzah, 1979: 93).

Hal tersebut dapat dilihat dari stratifikasi sosial salah satu dari tingkatan sosial sudah tidak ada lagi yaitu tingkat ketiga yang disebut "Ata" (hamba). Ini dikarenakan pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi kerajaan kususnya di kerajaan Bone, Walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih berpegang teguh pada status sosial di atas.

Lapisan bangsawan, adalah lapisan tingkatan yang teratas, sedangkan bangsawan adalah lapisan menengah atau bawah. Dan yang termasuk lapisan bangwasawan adalah mereka yang berasal dari keturunan raja, Karaeng bila di Makassar atau Puang bila di Bugis (Abdullah, 1985: 110).

Pada lapisan bangsawan yang pernah memegang jabatan dalam istana kerajaan dahulu dianggap oleh masyarakat lebih tinggi kedudukannya dari yang tidak pernah menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan kerajaan.

Lapisan non bangsawan dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Non bangsawan menengah atas
2. Non bangsawan menengah
3. Non bangsawan bawah.

Mereka yang tidak termasuk non bangsawan menengah atas, adalah para pemimpin atau yang duduk dipemerintahan formal, seperti camat, mereka itu bukan keturunan bangsawan namun anggapan masyarakat seperti layaknya orang bangsawan karena kedudukannya yang menentukan sebagai seorang camat, non bangsawan seperti halnya kepala desa, dan para pemimpin informal yaitu seorang pemimpin yang sudah diakui oleh masyarakat walaupun tidak mendapatkan kedudukan dalam suatu pemerintahan, seperti halnya pallontara (orang-orang tua yang dapat meramal musim). Apakah ini musim hujan, musim kemarau, musim angin barat dan musim angin timur dan lain-lain. Sedangkan kelompok non bangsawan bawah adalah mereka yang termasuk petani biasa yang tidak termasuk pada kedua kelompok di atas. Pada umumnya mereka itu termasuk petani penggarap dengan sistem pembagian hasil panen.

Jika diperhatikan sistem kekerabatan, maka dapat dilihat pada struktur sosial yang ada pada masyarakat di kerajaan Bone, dan secara garis besarnya terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok bangsawan dan kelompok non bangsawan. Berdasarkan struktur sosial ini maka sistem kekerabatan merkapun mengikuti struktur tersebut, seperti juga pada masyarakat lainnya. Kelompok bangsawan sendiri ataupun pada kelompok yang paling bawah dengan kata lain mereka bebas menentukan jodohnya.

Apabila kelompok bangsawan mengambil istri atau memilih jodohnya pada golongan non bangsawan, maka anak dari hasil perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan dari bapaknya, sedangkan apabila mereka memilih jodohnya dikalangannya sendiri maka mereka mengikuti garis keturunan dari salah satu diantaranya dari ibu atau dari bapaknya.

Jika pada zaman dahulu perkawinan yang terjadi antara bangsawan dan non bangsawan jarang sekali terjadi karena menurut mereka perkawinan yang demikian itu adalah perkawinan yang tidak boleh terjadi, alasannya mereka itu menjaga kemurnian dari keturunan mereka sendiri, bahkan perkawinan yang sangat ideal adalah kawin sepupu sekali baik dari bapak maupun dari ibu.

Perkawinan dalam msyarakat Bone dari dahulu sampai sekarang telah banyak mengalami perubahan karena masyarakat sudah tidak terlalu berpegang pada adat yang lama disebabkan telah terjadi pembauran antara bangsawan dan non bangsawan maupun masyarakat pendatang sehingga mereka sudah saling memberi dan menerima anak gadisnya dalam perkawinan. Kalau pada zaman dahulu perkawinan mereka itu bersifat asimetris (hanya dapat menerima gadis). Maka pada saat sekarang ini berubah menjadi simetris, yaitu sudah dapat memberi dan menerima anaknya dalam suatu perkawinan, lain halnya jika mereka dalam perantauan baik bangsawan maupun non bangsawan mereka mencari jodoh pada tempat yang lain kemudian melangsungkan perkawinannya.

2. Bahasa dan Kesusasteraan

Bahasa-bahasa diberbagai kepulauan Nusantara dari semenanjung Melayu sampai Polinesia menunjukkan banyak kesamaan, oleh karena itu, masuk ke dalam satu rumpun bahasa yang dikenal dengan rumpun bahasa Melayu-Polinesia yang huruf-hurufnya berasal dari huruf Sansekerta (Slametmuljana, 1992: 17). Ini berarti semua bahasa yang ada di Sulawesi Selatan, baik itu Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja memiliki kata-kata seasal serta mempunyai tata bahasa yang strukturnya amat besar persamaannya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka pada suku Bugis dikenal adanya pemakaian huruf spesifik yang disebut aksara *Ugi*, atau yang lebih dikenal dengan nama aksara *lontara*'. Dinamai aksara *lontarak* karena memang dulu peristiwa-peristiwa ditulis pada *daun lontar*. Frasa *daun lontara* sepadan dengan *raung* = daun dan *talak* = lontar menjadi *rauttalak* atau *rontalak* dalam bahasa Makassar. Kata *rontalak* mengalami proses metatesis menjadi *lontarak*. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *lontarak* mengandung arti bermacam-macam sesuai dengan konteks kalimatnya, pengertian *lotarak* sebagai aksara, naskah, bacaan dan catatan (Maknun, 2010: 38).

Asal mula huruf *Lontarak* berbentuk belah-ketupat, kemudian dipecah-pecahkan dalam bentuk lingkaran belah ketupat tersebut (Mattulada, 1995: 9). Aksara *Lontarak* merupakan suatu pertanda bahwa masyarakat Bugis-Makassar telah mencapai taraf kebudayaan yang telah maju, sejalan dengan beberapa suku lainnya yang ada di Indonesia. Apabila hal itu ditinjau dari sudut ilmu, maka aksara *Lontarak* menunjukkan adanya perkembangan yang telah maju (Farid, 1970: 14).

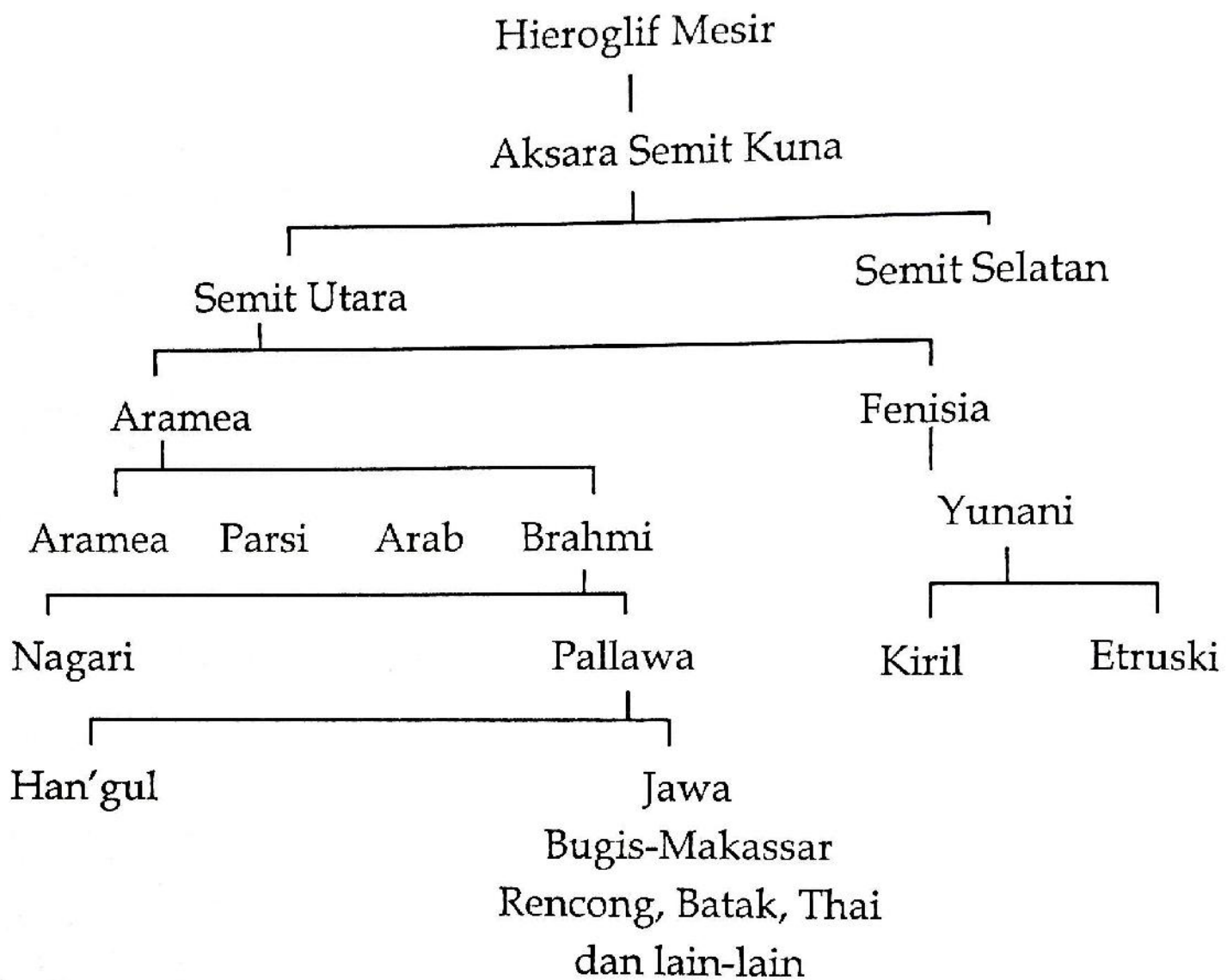
Pada mulanya tulisan *lontarak* hanya terdiri dari 18 buah huruf dan nanti \pm 100 tahun kemudian baru ditambah huruf "*ha*" sehingga menjadi 19 buah huruf sebagaimana yang berlaku sekarang (Hadimuljono, 1979: 13). Dari hasil penelusuran pustaka yang tersedia dijumpai beberapa pendapat tentang perkembangan aksara Bugis-Makassar. penelusuran pustaka tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. R. H. Kern berpendapat bahwa aksara Bugis-Makassar bersumber dari huruf Sanskrit yang disebut Dewanagari. Aksara Dewanagari dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut:

Gambar 6: Aksara Dewanagari


















ka = क	ga = ग	nga = ङ	
pa = प	ba = ब	ma = म	
ta = त	da = द	na = न	
ca = च	ja = ज	nya = ण	
ya = य	ra = र	la = ल	
wa = व	sa = स	a = अ	ha = ह

- b. Kridalaksana menyusun silsilah aksara Bugis - Makassar yang penting dapat dilihat pada gambar 7 seperti berikut:







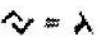



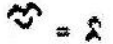

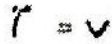





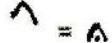











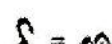





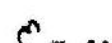



Berdasarkan silsilah tersebut terlihat bahwa aksara Bugis Makassar bersumber dari aksara Pallawa, hal ini dapat dilihat pada gambar 8 berikut:

Gambar 8: Silsilah Aksara Bugis Makassar bersumber dari aksara Pallawa

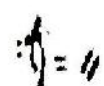
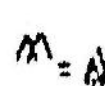
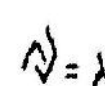




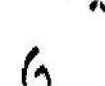

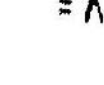

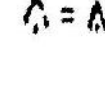
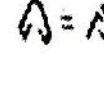

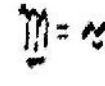
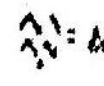

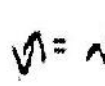
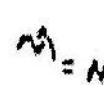
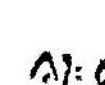
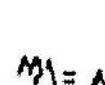
ka = 	ga = 	nga = 
pa = 	ba = 	ma = 
ta = 	da = 	na = 
ca = 	ja = 	nya = 
ya = 	ra = 	la = 
sa = 	ha = 	

- c. Hole menunjukkan bentuk aksara yang dikemukakan oleh B.F. Matthes dan Raffles dapat dilihat pada gambat berikut:

Gambar 9: Bentuk aksara Bugis - Makasar yang dikemukakan B.F. Matthes.

 = 	 = 	 = 
 = 	 = 	 = 
 = 	 = 	 = 
 = 	 = 	 = 
 = 	 = 	 = 
 = 	 = 	 =   = 

Gambar 10: Bentuk aksara Bugis - Makasar yang dikemukakan Raffles

 = u	 = a	 = λ
 = a	 = ɛ	 = v
 = a	 = ʊ	 = a
 = a	 = a	 = a
 = a	 = a	 = a
 = a	 = a	 = a
 = a	 = a	 = a

Bentuk aksara yang dikemukakan, baik Matthes maupun Raffles biasa juga disebut lontarak kuno. Lontarak kuno tersebut terbagi dua kategori, yaitu ada yang disebut *Lontarak Jangang-jangang* (burung) dan *Lontarak Bilang-bilang* (Rahman, 1996: 65). Bila dibandingkan antara lontarak kuno dengan lontarak baru dapat dikatakan jauh berbeda sehingga perlu dipertanyakan apakah lontarak kuno yang mengalami proses perubahan sehingga menjadi lontarak baru. Aksara kuno memiliki persamaan dengan aksara yang terdapat di India, Kamboja dan Kawi (Jawa), sedangkan aksara baru lebih mirip dengan aksara Sumatra seperti yang terdapat di Rejang, Lampung dan Pasemah (Enre, 1983: 32).

Mattulada merasa yakin bahwa aksara Bugis Makassar berasal dari aksara Dewanagari yang diperbaharui oleh Daeng Pamatte (Mattulada, 1982: 13). Daeng Pamatte ini berasal dari Lakiung dan merupakan seorang syahbandar yang merangkap pula sebagai *Tumailalang* Gowa (juru bicara Kerajaan Gowa). Ia Diperkirakan hidup pada masa pemerintahan Raja Gowa ke 9, Daeng Matanre Karaeng

Manguntungi dengan gelar *Tumapa'risi Kalonna* (orang yang sakit lehernya). Raja ini memulai masa pemerintahannya pada tahun 1510 (Rahman, 1995: 63). Pada masa itu Daeng Pamatte mulai mencatat secara teratur segala peristiwa yang penting dan peraturan-peraturan kerajaan, yang kesemuanya itu mula-mula ditulis di atas daun *Lontarak* dan setelah ditulis dikertas tetap disebut *Lontarak*. Daeng Pamatte jugalah yang menciptakan huruf *Lontarak* Makassar. (Pelras, 2006: 230).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam *Lontarak Patturioloang ri To Gowaya* (naskah sejarah Gowa) disebutkan:

... iapa anne karaeng uru apparek rapang bicara, timu-timu ri bunduka. Sabannarakna minne karaenga nikana Daeng Pamatte. Dia sabannarak, dia Tumailalang, iatommi Daeng Pamatte ampareki lontarak Mangkasarak.

Artinya

(... Dialah raja yang mula-mula membuat peraturan, hukum dalam perang. Syahbandar raja inilah yang disebut Daeng Pamatte. Dia syahbandar, dia juga *Tumailalang* (Menteri Dalam Negeri), dia jugalah Daeng Pamatte yang membuat *lontarak*).

Dalam petikan *lontarak* di atas terdapat kata *ampareki*, yang dapat berarti "membuat atau menciptakan", "menjadikan atau menyederhanakan". Jadi, apabila kata *ampareki* diartikan membuat/menciptakan, dapatlah diasumsikan bahwa aksara Bugis-Makassar kuno dibuat oleh Daeng Pamatte. Penyebutan Daeng Pamatte (sapaan

dalam bahasa Makassar) ada kemungkinan panggilan atau sapaan terhadap B.F. Matthes (Maknun, 2010: 5). Dalam sejarah Sulawesi Selatan diberitakan bahwa B.F. Matthes, adalah seorang misionaris Belanda yang mengumpulkan naskah-naskah kuno di Sulawesi Selatan termasuk cerita tentang I La Galigo yang disalin oleh Colliq PujiE. Matthes juga berjasa di dalam pengumpulan *Lontarak Latoa* pada awal abad ke 9. Matthes jugalah yang mengumpulkan sumber-sumber sejarah Gowa dan memberikan penjelasan mengenai ditemukannya pemukiman orang-orang Makassar sejak awal abad ke 16 di beberapa tempat di Nusantara.

Selanjutnya, jika kata *ampareki* diartikan “menyederhanakan/ memodifikasi”, dapat diasumsikan bahwa Daeng Pamatte menyederhanakan atau memodifikasi dari aksara yang sudah ada sebelumnya yakni aksara Dewanagari/Pallawa (Noorduyn, 1995: 134).

Sejak abad ke 17, setelah Islam berpengaruh dalam kebudayaan Bugis-Makassar, dikenal pula pemakaian huruf Arab dan dikenal dengan *Ukirik Serang* (Young, 2011: 74). Menurut perkiraan Mattulada (1995: 10)., kata “*serang*” berasal dari kata “*Seram*” nama sebuah pula di Kepulauan Maluku. Hal ini terjadi karena orang Bugis-Makassar pada mulanya lebih banyak berhubungan dengan Seram yang lebih dahulu menerima Islam.

Huruf lontara’ ini pada umumnya dipakai untuk menulis tata-aturan pemerintahan dan kemasyarakatan ke dalam naskah yang terbuat dari daun lontara yang ber-*ukirik serang* biasanya dipakai dalam hubungannya dengan pelajaran agama Islam (Hadimuljono, 1979: 14).

3. Kepercayaan

Sebelum masuknya Islam di Sulawesi Selatan, penduduknya telah mengenal dan menganut kepercayaan asli, suatu faham dogmatis yang terjalin dengan adat-

istiadat. Pokok kepercayaannya merupakan apa saja adat/kebiasaan hidup yang diperoleh dari warisan nenek moyang (Mappanganra, 2003: 29). Kepercayaan asli tersebut umumnya bersifat *animisme* dan *dinamisme*.

Sistem kepercayaan orang Bugis-Makassar pada zaman pra-Islam, sebenarnya sudah menganut suatu kepercayaan kepada satu dewa yang tunggal dengan penyebutan beberapa nama seperti *Patoto-e* = Dia yang menentukan nasib), *Dewata Seuwa-e* (Dewa yang tunggal), dan *Turi-e Ara'na* (Dewa yang berkehendak tinggi/mencipta) (Mattulada, 1995: 271).

Konsep kepercayaan ketuhanan seperti itu terdapat dalam ajaran *Attorioloang* dan *Tolotang*. Selanjutnya, ajaran *Attorioloang* dan *Tolotang* mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa yang disebut *Patotoe* (Tuhan yang menentukan nasib atas segala sesuatunya) atau *Puang Mappancajie* (bahasa Bugis) artinya Tuhan Yang Maha Menciptakan segala sesuatunya. Dalam masyarakat Makassar disebut *Karaeng Mappajaria* (Tuhan Yang Maha Pencipta) atau dikenal juga dengan sebutan *Karaeng Loe* (Tuhan Yang Maha besar) (Pelras, 2006: 220). Perlu ditambahkan bahwa khususnya ajaran *Tolotang* yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang memilih menjadi penganut agama Hindu ketika Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi agama-agama di Sulawesi Selatan.

Selain mempercayai adanya Tuhan *Patotoe* atau *Puang Mappancajie*, mereka juga mempercayai adanya Tuhan-tuhan lain sebagai pembantunya. Tuhan-tuhan dalam ajaran *Attorioloang* dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Dewa yang berada di langit yang disebut *Dewata Bittarae*, dewa ini diharapkan mendatangkan hujan yang

sekaligus membawa kemakmuran. Di samping itu, dewa ini juga dapat membawa kerusakan kepada umat manusia dengan jalan menurunkan petir atau mendatangkan kemarau panjang. Dalam persembahan sesajen, manusia harus menyediakan empat warna makanan yang ditempatkan pada sebuah tempat khusus yang diletakkan di bagian atas loteng rumah;

2. Dewa yang berada di bumi yang disebut *Dewata Malinoe*, dewa yang banyak menempati tempat-tempat tertentu di dunia, seperti di belokang jalan, pohon besar dan tempat-tempat keramat. Manusia sering memberikan sesajian dengan meletakkan dan menggantungkan beberapa macam buah-buahan, makanan, lauk-pauk, dan binatang sebagai persembahan agar tidak mengganggu ketentraman manusia.
3. Dewa yang berada di bawah air yang disebut *Dewa Uwae*, Dewa air yang bertempat tinggal di lautan, sungai dan danau. Untuk memberikan sesajian kepada dewa air ini, penduduk sering membuat sebuah rumah miniatur yang di dalamnya berisi daun-daunan, makanan, dan beras warna-warni kemudian dilabuhkan di laut (Mappanganra, 2003: 30-34).

Kepercayaan kepada dewa-dewa tersebut dalam pandangan antropologi, dipersonifikasikan dengan tenaga-tenaga alam gaib yang di luar kontrol manusia, menjadi dewa-dewa. Segala sesuatu yang di luar kekuasaan manusia, diserahkan kepada dewa. Mereka menjadi sasaran kultur ritual, sesajen dan permohonan. Untuk keperluan tertentu dipuja dewa tertentu pula, yang dinyatakan melebihi dewa-dewa lain.

C. Hubungan dan persaingan dengan Kerajaan-kerajaan lain

1. Domain Kerajaan Gowa-Tallo

Secara politik hubungan pertama antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa sekitar pertengahan abad ke 16 yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian *Ulukanaya ri Tamalate* atau *Sitettongenna Su'danga Lateariduni*. Dalam *Lontara' Sokku' na Wajo* diberitakan mengenai proses terjadinya perjanjian tersebut yang antara lain disebutkan adanya saling mengunjungi antara Raja Gowa ke 9, Daeng Matanre Karaeng Mangngutungi Tumapa'risi Kalonna (1510-1546) dengan Raja Bone ke 6, La Ulio Bote'e (1543-1558) (Farid, 1976: 396).

Rumusan perjanjian *Ulukanaya ri Tamalate* ini merupakan suatu perjanjian bilateral dalam bidang pertahanan dan keamanan antara kedua kerajaan, yang salah satu diktum isinya sebagai berikut:

Narekko engka peri'na Bone maddaungngi tasi'e naola Mangkasa'e, nnarekko engka peri'na Gowa makkumpelleli bulue naola to Bone. Tessinawa-nawa madja'ki, tessi patingngarai kanna Bone-Gowa. Tessi atjinnaijangngi ulaweng matasa' pattola malampe'. Ijasi somperangngi Gowa ijasi mana'i ada to rioloe lettu' ri torimunritta, nigi-nigi temmaringerang ri ada to rioloe mareppa'i urikkurinna, lowa'-lowa'na, padai ittello riaddampasangnge batue ri Tanana (Ali, 1969: 16).

Artinya:

Jika ada kesulitan yang menimpa Bone, Gowa akan mengarugi untuk datang membantu dan kalau ada kesulitan yang menimpa Gowa, Bone akan segera

melintasi pegunungan untuk segera datang membantu. Saling berniat baik, pantang berhadapan prajurit Bone dengan prajurit Gowa dimedan perang. Saling menghormati hak milik masing-masing. Perjanjian ini akan ditaati oleh kedua belah pihak kerajaan sampai turun-temurun. Barang siapa tidak mengindahkan perjanjian ini maka akan mendapat kutukan dan kehancuran bagi kerajaannya.

Perjanjian *Ulukanaya ri Tamalate* di atas tidak bertahan lama. Hal ini dapat dilihat dalam Kronik Gowa yang memberitakan bahwa masa Raja Gowa ke 10, I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung yang bergelar Tunipallanga Ulaweng (1546-1565) bersama dengan Mangkubuminya, Nappakata'tana Daeng Padulung (Raja Tallo), menetapkan politik ekspansi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. Untuk itu, beliau memperkuat benteng-benteng pertahanan kerajaan dengan menjadikan benteng Somba Opu sebagai benteng utama. Benteng-benteng lainnya yang diperkuat dengan pagar keliling adalah benteng Barombong dan benteng Anak Gowa (Mattulada, 1982: 28). Politik ekspansi itu ternyata berjalan dengan baik, beliau dapat menguasai daerah-daerah pedalaman Bugis dan perairan Bone. Kerajaan yang tidak mau tunduk pada Gowa dianggap sebagai saingan yang harus ditaklukkan. Karena itu ia kembali menyerang Kerajaan Bone yang waktu itu di bawah kekuasaan Raja Bone ke 7, La tenrirawe Bongkae Matinroe ri Gucina (Wolhoff, t.th: 23).

Setelah Tunipallangga mangkat, ia digantikan oleh I Taji Barani Daeng Marompa Karaeng Data "Tunibatta" (1565) Raja Gowa ke 11 (Mattulada, 1982: 29). Baru sekitar 23 hari naik tahta ia langsung melakukan ekspansi ke Bone

untuk memimpin dan meneruskan peperangan melawan Bone. Maka dalam pertempuran itu, Tunibatta tewas terpancung, sehingga beliau digelar "Tunibatta" (orang yang terpancung) peristiwa itu diperkirakan terjadi dalam tahun 1565. Atas izin dari Raja Bone ke 7, La Tenrirawe dan pula atas saran Kajao La Liddong yang pada waktu itu menjabat sebagai penasehat utama Kerajaan Bone (Patunru, 1989: 43), maka Arung Teko bersama Arung Bila, Arung Lamoncong dan Arung Sanrego (pembesar-pembesar dari kerajaan Bone) membawa jenazah Raja Gowa itu ke Gowa.

Kajao La Liddong merupakan penasehat Kerajaan yang memberi saran agar mengembalikan jenazah Tunibatta, agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengakhiri

permusuhan yang berkepanjangan antara Gowa dengan Bone. Sebab ternyata setelah upacara berkabung selesai di Kerajaan Gowa, maka dilanjutkan perundingan perbatasan antara kedua kerajaan, di Kampung Caleppa yang masih dalam wilayah Kerajaan Bone. Kedua kerajaan tersebut antara Raja Bone La Tenritawe Bongkange dengan Kajao La Liddong di satu pihak dengan Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo yang bernama I Mappakatana Daeng Padulung "Tumenanga ri Makkoyang" di pihak Gowa.

Di dalam perundingan itu, Kajao La Liddong dengan mempergunakan taktik diplomasi mengemukakan tuntutan antara lain sebagai berikut:

- a. Bone meminta kemenangan-kemenangan, yaitu kepadanya harus diberikan daerah-daerah sampai ke Sungai Walanae di sebelah barat dan sampai daerah Ulaweng di sebelah utara.
- b. Sungai Tangka terletak di perbatasan Bone dan Sinjai (akan menjadi daerah perbatasan daerah kekuasaan Bone dan daerah kekuasaan Gowa,

yaitu: sebelah utara masuk Bone dan disebelah selatan masuk Gowa.

- c. Supaya negeri Cenrana masuk menjadi kekuasaan Bone karena dahulu Cenrana sudah ditaklukkan oleh Raja Bone VI, La Tenri Sukki MapajungE, yaitu sebagai hasil kemenangannya dalam peperangan melawan Raja Luwu yang bernama Raja Dewa yang sejak sekian lama menguasai Cenrana (Mattulada, 1982: 32).

Walau pada mulanya perundingan itu berjalan tidak lancar, namun akhirnya tercapai suatu perjanjian perdamaian secara informal perjanjian itu disebut oleh rakyat Gowa, "*Ulukanayya ri Caleppa*" (Mattulada, 1982: 32). Dengan adanya perjanjian *Ulukanayya ri Caleppa*, menunjukkan adanya rumusan status dan bentuk hubungan kenegaraan yang akan menjadi kontrol politik terhadap wilayah perbatasan. Dengan Perjanjian *Caleppa (Ulu Kanayya ri Caleppa)* atau kesepakatan di *Caleppa* selesai dilaksanakan, oleh kedua belah pihak, maka Perjanjian ini diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa.

Setelah perjanjian *Caleppa* selesai dilaksanakan berangkatlah mangkubumi Kerajaan Gowa I Mappakatana Daeng Padulung bersama I Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bontolangkasa (putra dari Karaeng Tunibbata) ke Gowa. (Mattulada, 1982: 33). Raja Bone bersama dengan penasehatnya, Kajao La Liddong ikut serta ke Gowa untuk mengikuti proses pelantikan Raja Gowa ke 12, Karaeng Tunijallo, yang dilaksanakan di Benteng Kale Gowa di Bukit Tamalate. I Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bontolangkasa Tunijallo yang memerintah selama 1565-1590, langkah pertama yang dilakukannya adalah memperkokoh

persahabatannya dengan kerajaan Bone yang menjurus kepada pembentukan aliansi.

Pembentukan aliansi ini, dimungkinkan terjadi oleh karena pengaruh pribadi Karaeng Tunijallo yang memahami betul Kerajaan Bone, ia pernah tinggal beberapa tahun lamanya dalam lingkup istana Kerajaan Bone.

Keadaan damai kedua kerajaan ini, di manfaatkan oleh Raja Bone ke 7, La Tenrirawe, untuk menanamkan pengaruhnya terhadap kerajaan Bugis lainnya. Perjanjian persekutuan antara Bone dengan Gowa tersebut berbunyi:

Musuh salah satu di antara kedua Kerajaan (Gowa dan Bone), menjadi musuh kedua kerajaan. Orang Gowa yang datang ke Bone, diperlakukan dan memperlakukannya diri seperti di negerinya sendiri. Dan orang Bone yang datang ke Gowa juga diperlakukan dan berlaku seperti di negerinya sendiri (Patunru, 1993: 15).

Demikianlah inti persekutuan Gowa dan Bone untuk kedua kalinya. Dan juga seperti aliansi *Ulukanaya ri Tamalate*, kedudukan kedua kerajaan dinyatakan tetap sejajar, yang disimbolkan dengan "*sitettongenna su'danga lateariduni*" (ditegakkannya bersama *Su'dana*, pedang kebesaran Bone, ketika perjanjian diucapkan). Aliansi tersebut di atas terjadi dalam kurun 1565, dan sempat melahirkan perdamaian antara keduanya selama kurang lebih satu dasawarsa.

2. Tri Aliansi *Tellumpoccoe* Kerajaan Bugis (Bone-Soppeng- Wajo)

Istilah "*Tellumpoccoe*" berasal dari bahasa Bugis yang terdiri dari dua buah kata, yaitu "*tellu*" dan "*bocco*". Dalam kaidah bahasa Bugis dikatakan bahwa apabila huruf "*m*" bertemu dengan huruf "*ba*" maka berubah menjadi "*mpa*".

Jadi *tellu-bocco* berubah menjadi *Tellumpoccoe* yang berarti tiga puncak. (Nur, 2000: 39). Tri Aliansi *Tellumpoccoe* merupakan persekutuan tiga kerajaan Bugis. Pada tahun 1582, tepat pada bulan purnama (*tepunna Ukennge*) di Desa Bunne daerah Timurung (Mattulada, 1974: 12), Kerajaan Bugis Wajo dan Soppeng bergabung dengan kerajaan Bone dengan membuat perjanjian pertahanan yang dikenal dengan perjanjian *Lamumpatue ri Timurung* (Mattulada, 1983: 226). Dalam perjanjian ini terbentuk suatu ikatan persaudaraan dimana Bone merupakan saudara sulung, Wajo saudara tengah, dan Soppeng saudara bungsu (Patunru,, 1993: 34). Ketiga kerajaan itu kemudian membentuk aliansi yang disebut *Tellumpoccoe* (tiga puncak kerajaan) untuk menghadapi ancaman agresi Kerajaan Gowa (Mattulada, 1983: 226).

Perjanjian persekutuan tiga kerajaan Bugis tersebut selain dihadiri oleh Raja Bone, Soppeng dan Wajo, juga dihadiri pula oleh ahli pikir masing-masing sebagai pendamping raja, yaitu Kajao Laliddong sebagai pendamping Raja Bone, Tau Tongen Topacalepa sebagai pendamping Datu Soppeng dan Arung Matoa Wajo didampingi oleh To Maddualeng (Rahim, 1985: 99).

Dengan terbentuknya aliansi *Tellumpoccoe*, maka terdapat dua kekuatan yang mengendalikan kekuasaan politik di Sulawesi Selatan, yaitu kerajaan Gowa yang berpengaruh di kalangan orang-orang Makassar dan Kerajaan Bone yang berpengaruh di kalangan orang-orang Bugis. Dalam perkembangannya aliansi *Tellumpoccoe* mempunyai pengaruh yang tidak sedikit bagi kepentingan kerajaan masing-masing juga terbinanya persaudaraan antara tiga kerajaan akan secara langsung menjalin timbulnya gangguan keamanan dari masing-masing kerajaan, di samping itu telah tercipta satu kesatuan kekuatan yang memungkinkan untuk setiap kerajaan senantiasa

mempertahankan diri terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya. Lebih lanjut tujuan utama dari aliansi *Tellumpoccoe* adalah untuk menghadang politik ekspansi Kerajaan Gowa yang selalu berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah-wilayah Bugis.

Raja Gowa pada masa itu Tunijallo, memandang aliansi *Tellumpoccoe* sebagai ancaman langsung terhadap supremasi Kerajaan Gowa yang tertanam sejak lama. Hal ini diperpuruk lagi karena Kerajaan Wajo dan Soppeng yang masih berada dalam pengaruh Gowa, ikut dalam aliansi *Tellumpoccoe* tersebut. Karena itu, kedua kerajaan tersebut dianggap sebagai kerajaan bawahan yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan kerajaan Gowa. Menurut pandangan Gowa, aliansi *Tellumpoccoe* yang dibuat Bone merupakan pertanda perlawanan terhadap kekuasaan Gowa. Dalam keadaan demikian, perang tidak dapat dihindarkan lagi. Pada tahun 1583, Raja Gowa melancarkan serangan terhadap kerajaan Wajo. Tetapi serangan ini dapat dipukul mundur oleh pasukan-pasukan *Tellumpoccoe*. Tujuh tahun kemudian, yakni tahun 1590 serangan dilanjutkan kembali, tetapi Gowa tetap tidak dapat mengalahkan *Tellumpoccoe*. Tunijallo sendiri tewas diamuk oleh seorang pengikutnya, I Lolo Tammakkana.

Setelah mangkatnya Tunijallo, maka digantikan oleh raja ke 13, Tepukaraeng Dg Parabbung Tunipassulu (1590-1593), yang telah melanjutkan upaya untuk menghadapi *Tellumpoccoe*. Akan tetapi dalam hal ini hampir tidak dapat ditemukan hal-hal penting dalam sejarahnya kecuali dalam melaksanakan kebijakannya yaitu memecat I Daeng ri Tamacinna selaku *Tumailalang* dan di ambil semua hak istimewanya dan sebagai penggantinya diangkat Karaeng ri Patte'ne, seorang budak pribadi raja.

Apa yang melatar belakangi pemecatan pada diri I Daeng ri Tamacinna tidak diketahui dengan pasti. Akan

tetapi dapat diduga bahwa kudeta itu berlatar belakang politik akhirnya Tunipassulu yang merupakan raja Gowa yang ke 13 ini dikenal sangat kejam sehingga para pendatang termasuk anak-anak Karaeng Tu Gowa banyak yang melarikan diri. Karena watak pemerintahannya yang demikian itulah sehingga ia mengalami nasib malang sebagai korban kudeta yang diduga dipelopori oleh I Daeng ri Tamacinna.

Pada masa pemerintahan Raja Gowa ke 14, I Manngarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin, sedang berlangsung persaingan antara Gowa dan *Tellumpocoe* untuk menguasai hegemoni politik di kawasan Sulawesi Selatan. Dalam keadaan demikian, Islam masuk dan di mulailah penyebaran Islam di daerah Sulawesi Selatan, hingga ke Kerajaan Bone.

Untuk melihat pemahaman tentang perkembangan Kerajaan Bone, sejak masa pemerintahan *To Manurunge ri Matajang* sampai pemerintahan Raja Gowa terakhir, dapat dilihat pada daftar nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Bone pada lampiran.

Kesimpulan

Kerajaan Bone terbentuk pada awal abad ke 14 sekitar 1326 dengan raja yang pertama bernama *To Manurunge ri Matajang* yang digelar "*Mata Silompoe*" (mata yang tajam), dengan kedatangan *To Manurunge*, dimulailah masa kerajaan yang berlangsung sampai tahun 190. *To Manurunge* sebagai raja Bone yang pertama memerintah kira-kira 32 tahun yaitu tahun 1326-1356. Sebelum lahirnya Kerajaan Bone, terdapat *Matowa* yang memimpin tujuh *wanua*, yaitu: *Wanua Ujung*; *Wanua Pongeng*; *Wanua Ta*; *Wanua Tobojong*; *Wanua Tanete Riattang*; *Wanua Macege* dan *Wanua Tanete Riawang*. Para *matowa* tersebut dalam pertumbuhannya,

kemudian berubah menjadi *Ade Pitu* (Tujuh pemangku adat) di himpun dan disatukan ke dalam Kerajaan Bone. Oleh karena itu, maka tempat dimana terbagun istana sebagai pusat kerajaan disebut *Watampone*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerajaan dikembangkan berdasarkan kekuasaan sentral dan berpusat pada raja yang disebut *Arung Mangkau* (raja yang berdaulat).

Dalam bidang stratifikasi sosial di Sulawesi Selatan pada dasarnya mempunyai persamaan masyarakat Bugis, Makassar, Mandar maupun Tana Toraja, yaitu terbagi dalam tiga lapisan pokok, yaitu: a) Golongan *Anakarung* (*anak Karaeng* dalam bahasa Makassar) adalah lapisan kaum kerabat raja-raja; b) Golongan *Tumaradeka/Biasa* ialah lapisan orang merdeka yang merupakan sebagian besar dari rakyat Sulawesi Selatan; c) Golongan *Ata* adalah lapisan orang budak, orang yang dipekerjakan karena tidak dapat membayar hutang. Dalam bidang bahasa, Kerajaan Bone dikenal adanya pemakaian huruf spesifik yang disebut huruf *Ogi* yang lebih dikenal dengan huruf *Lontara*. Huruf *lontarak* ini berasal dari huruf Dewana giri yang disederhanakan oleh Daeng Pamatte, syahbandar yang merangkap sebagai mangkubumi di Kerajaan Gowa pada abad 16 M. dalam perkembangannya huruf *lontara* dipakai untuk menulis tata-aturan pemerintahan dan kemasyarakatan ke dalam naskah yang terbuat dari daun *lontara*, setelah Islam berpengaruh dikenal pula pemakaian huruf Arab yang ber-ukirik *serang* biasanya dipakai dalam hubungannya dengan pelajaran agama Islam. Sedangkan dalam bidang kepercayaan, pada zaman pra-Islam kepercayaan orang Bugis-Makassar menganut suatu kepercayaan kepada satu dewa yang tunggal dengan penyebutan beberapa nama seperti *Patoto-e* = Dia yang menentukan nasib), *Dewata Seuwa-e* (Dewa yang tunggal),

dan *Turi-e Ara'na* (Dewa yang berkehendak tinggi/mencipta). Konsep kepercayaan ini dalam tradisi Bugis kuno disebut dengan *Puang Mappancajie* artinya Tuhan Yang Maha Menciptakan segala sesuatunya.

Pada pertengahan abad ke 16 Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa-Tallo telah membuat suatu perjanjian *Ulukanaya ri Tamalate* atau *Sitet tongenna Su'danga Lateariduni*. *Lontara' Sokku' na Wajo* memberitakan isi perjanjian tersebut yang antara lain adanya saling mengunjungi antara dua Kerajaan, Raja Gowa ke 9, Daeng Matanre Karaeng Mangnguntungi Tumpa'risi Kalonna (1510-1546) dengan Raja Bone ke 6, La Ulio Bote'e (1543-1558) (Farid, 1976: 396). Perjanjian *Ulukanaya ri Tamalate* ini tidak bertahan lama, Kronik Gowa yang memberitakan bahwa masa Raja Gowa ke 10, I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung yang bergelar Tunipallanga Ulaweng (1546-1565) bersama dengan Mangkubuminya, Nappakata'tana Daeng Padulung (Raja Tallo), menetapkan politik ekspansi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. Pada masa Raja Bone ke 7, La Tenritawe Bongkange diadakan lagi perjanjian dengan Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo yang bernama I Mappakatana Daeng Padulung. Perjanjian *Ulukanayya ri Caleppa*, dengan adanya perjanjian perdamaian secara informal dan menunjukkan adanya rumusan status dan bentuk hubungan kenegaraan yang akan menjadi kontrol politik terhadap wilayah perbatasan, perjanjian *ri Caleppa* ini diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa.

Selain adanya aliansi antara kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone juga menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan Bugis, tri aliansi *Tellumpoccoe* (Bone, Soppeng, Wajo) pada tahun 1582 yang dikenal dengan

perjanjian *Lamunipatue ri Timurung*. Tujuan utama dari perjanjian ini untuk menghadang politik ekspansi Kerajaan Gowa. Dalam keadaan persaingan hegemoni politik tersebut, Islam telah masuk di Kerajaan Gowa dan dari sinilah awal mula penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

BAB 4

PENYEBARAN ISLAM DI KERAJAAN BONE

A. Gowa Sebagai Pusat Penyebaran Islam Di Sulawesi Selatan

Dua tahun setelah kerajaan Gowa-Tallo resmi menerima Islam, seluruh rakyat Gowa dan Tallo dinyatakan memeluk agama Islam, maka dilaksanakan sholat Jumat untuk kali pertama di Tallo, yakni pada tanggal 9 Nopember 1607 M/18 Rajab 1016 H. Pada waktu yang bersamaan di Bandar Makassar yang sudah memeluk Islam di sekitar Benteng Somba Opu, di Masjid Mangallekana juga diselenggarakan sholat Jumat dan doa Syukur. Dalam khotbah didoakan keselamatan Baginda dan kesempurnaan Kota Raja Makassar sebagai ibu Kota Kerajaan Islam yang bernama Sulawesi Selatan (Mattulada, 2011: 46). Menurut A. Sewang (1997: 139) sholat Jumat yang pertama ini memiliki arti penting dalam proses penyebaran Islam, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sultan Alauddin yang mendekritkan di hadapan jamaah bahwa Kerajaan Gowa sebagai Kerajaan Islam dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, atau boleh dikatakan resminya kerajaan Gowa beralih dari *daar al-harb* menjadi *daar al-Islam* (Noorduyn, 1987: 316). Dari sini, penyebaran Islam sebagaimana teori yang dikemukakan oleh J.P. Williams, bahwa Kerajaan Gowa telah sampai pada tingkat masyarakat, yaitu keyakinan keagamaan raja sama dengan keyakinan rakyatnya (Sewang, 1997: 140).

Untuk merealisasikan Gowa sebagai pusat penyebaran Islam maka dengan memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan politik Kerajaan Gowa menjadi pusat

pengislaman daerah sekitarnya pada awal abad ke 17 (Mattulada, 2011: 47).

Bahwa seruan pengislaman itu selain didasarkan menurut syariat Islam, bahwa setiap muslim adalah pendakwah. Tapi juga dikatakan telah didasarkan atas konvensi raja-raja terdahulu, Konvensi itu adalah suatu ikrar (*paseng*) di antara mereka yang berisi bahwa setiap penguasa yang menemukan suatu jalan baru, dan lebih baik, berkewajiban memberi tahu para penguasa lainnya mengenai penemuannya tersebut kepada raja-raja sekutunya (Patunru, 1993: 33).

Kapan dan bagaimana proses kemunculan konvensi itu tidak diberitakan, namun dapat di duga kesepakatan itu diadakan ketika kerajaan-kerajaan yang terlibat di dalamnya masih dapat menciptakan kawasan damai di Sulawesi Selatan yaitu pada awal-awal munculnya kerajaan-kerajaan kawasan ini.

Konvensi tersebut sangat memudahkan jalannya penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, seruan kerajaan Gowa kepada kerajaan-kerajaan tetangga dan raja-raja negeri sahabat segera mendapatkan sambutan yang positif, seperti Sawitto dan Balanipa sehingga penyebaran Islam di daerah-daerah itu diterima dengan damai (Mattulada, 1983: 225). Begitu pula penyebaran Islam ke daerah selatan Kerajaan Gowa, seperti Bantaeng dan Selayar juga berlangsung melalui jalan damai.

Selama masa pemerintahan Sultan Alauddin, ia aktif menyebarkan Islam ke seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan pun sempat menjadi sasarannya. C.M.H. Clark, seorang sejarawan Australia, sebagaimana dikutip oleh Alwi Shihab (1998: 29) menyatakan bahwa seandainya saja para penguasa kolonial tidak datang ke wilayah ini untuk menghentikan penyebaran agama Islam, maka "kerajaan (Islam) itu akan

terus bergerak ke Irian Jaya dan dari sana menyeberang ke pesisir utara Australia."

B. Proses Penyebaran Islam di Kerajaan Bone

1. Himbauan Raja Gowa

Dalam upayanya menyebarkan Islam, Raja Gowa ke 14, Sultan Alauddin, mengirim utusan kepada Raja Bone untuk menghimbaunya menerima Islam. Modal utama yang dipegang Sultan Alauddin adalah perjanjian raja-raja terdahulu antara Raja Gowa ke 9, Karaeng Manguntungi Tumapa'risi Kalonna (1512-1446) dengan Raja Bone ke 6, La Uliyo Bote'e (1517-1542). Perjanjian terkenal dengan sebutan "*Sitet tonganna Sudanga Lateya Riduni*" (Mattulada, 1982: 33-34). Kemudian diperkuat kembali pada masa pemerintahan Raja Bone ke 7, La Tenri Rawe dengan Raja Gowa ke 12, I Mangngorai Daeng Mammata Karaeng Bontolangkasa Tunijallo (1565-1590) Bunyi perjanjian tersebut seperti yang tercantum dalam *Lontarak* bahwa *Nigi-nigi lolongan deceng mita tajam iyana mappaita*", (Mattulada, 1985: 225). Artinya siapa-siapa yang menemukan kebaikan melihat kebenaran ia harus memberi petunjuk kepada yang lainnya.

Perjanjian di atas disebut *uluada*, yang menurut arti kulturalnya, *uluada* memuat pernyataan ikrar (Bugis = *paseng*) yang amat penting yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ia didasari tekad kuat untuk mengikat persahabatan antar kerajaan. Berhubung karena dipesankan untuk di taati bersama-sama maka sanksinya amat berat bagi pelanggarnya. Bukan saja pihak yang terlibat pada zamannya tetapi juga anak cucu dari masing-masing pihak yang menaatinya (Rahim, 2011: 78). *Uluada* adalah perjanjian persahabatan antar kerajaan, baik dalam usaha mempersatukan kerajaan yang bersangkutan maupun penyelesaian daru suatu perang). Pelanggaran pada *uluada* dapat mengakibatkan perang, sekurang-kurangnya

menimbulkan rusaknya hubungan persahabatan antar kerajaan. (Rahim, 2011: 67).

Uluada yang disampaikan oleh Raja Gowa ke 14, Sultan Alauddin kepada Raja Bone untuk menyebarkan Islam kewilayah Kerajaan Bone ternyata tidak diterima dengan baik. Bone menganggap bahwa *uluada* yang disampaikan oleh Gowa itu tidaklah murni pada persoalan *uluada* antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Bone pada masa silam, tapi usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa ini dianggap oleh Kerajaan Bone sebagai Pax Sulawesiana. Bone menganggap menerima ajakan Gowa untuk menerima Islam setidaknya secara langsung mengakui perjuangan Kerajaan Gowa, suatu hal yang tidak bisa diterima mengingat sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

2. Penolakan Raja Bone

Ajakan Raja Gowa untuk menyebarkan Islam oleh kerajaan-kerajaan Bugis yang tergabung dalam persekutuan Tellumpoccoe, yaitu Bone, Soppeng dan Wajo mendapatkan penolakan, karena persekutuan tersebut menganggap bahwa seruan itu hanya sebagai taktik untuk menanamkan kembali dominasi kekuasaan Raja Gowa atas kerajaan-kerajaan Bugis pada umumnya dan Kerajaan Bone pada khususnya. Sebab dalam lontara Bugis-Makassar tercatat, bahwa kerajaan Gowa sebagai lawan yang sejak abad ke 16 telah terjadi berbagai kegiatan politik yang terkadang meningkat dalam bentuk perang antara kerajaan Bugis dan Makassar dengan maksud untuk memperebutkan kedudukan kepemimpinan di Sulawesi Selatan (Mattulada, 1975: 47.). Jadi Kerajaan Bone yang tergabung dalam persekutuan Tellumpoccoe menganggap bahwa ajakan Raja Gowa untuk menempuh jalan baru "Islam" bukanlah

keinginan murni untuk menyampaikan kebaikan (Islam) sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian.

Bahkan Kerajaan Bone menganggap bahwa masa damai yang diciptakan Raja Gowa ke 12, Tunijallo, selama 10 tahun lebih telah dilanggar, kemudian Raja Gowa ke 13, Tunipasulu, juga melakukan serangan-serangan dan penaklukan kepada raja-raja kecil yang termasuk daerah pengaruh Kerajaan Bone, makaseruan atau ajakan raja Gowa ke 14, Sultan Alauddin, bersama mangkubuminya, tak dapat diterima begitu saja, mengingat pengalaman-pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat seperti Bone, Wajo, Soppeng, Ajatapparang dan lain-lain, tidak menerima ajakan itu (Mattulada, 2011: 48).

Ajakan untuk menerima Islam, menurut persekutuan Tellumpoccoe adalah sebagai siasat Gowa untuk menguasai mereka. Untuk itu mereka sepakat menolak ajakan tersebut, tetapi penolakan itu menjadi alasan bagi Gowa untuk mengangkat senjata guna memerangi Kerajaan Bone yang juga masuk dalam persekutuan Tellumpoccoe, sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Noorduyn (1975: 146), "*It is true that Goa sent military expedition to the Buginese countries to force them to embrace Islam, after they had rejected Goa's exhortation to do so voluntarily*". Memang benar bahwa Gowa mengirim tentara ke daerah-daerah Bugis untuk memaksa mereka memeluk agama Islam setelah mereka menolak ajakan Gowa untuk memeluk agama Islam dengan sukarela.

Adanya penolakan dan penentangan yang keras dari raja-raja Bugis, sebenarnya dianggap sesuatu yang wajar melihat kebesaran dan kemajuan yang dialami oleh Kerajaan Gowa. Selain ketidak tahuan tentang ajaran Islam itu sendiri yang dikhawatirkan akan mengganggu tatanan sosial yang sudah ada, juga dikarenakan kekhawatiran akan potensi ekonomi yang dimiliki akan didominasi oleh Kerajaan Gowa yang berupaya untuk membangun pusat perdagangan yang

besar di Sombaopu ibu Kota Kerajaan Gowa. Kekhawatiran itu ditunjukkan dengan cara menolak ajakan itu dan merasa yakin bahwa Kerajaan Gowa tidak dapat memaksakan kehendaknya mengingat kekuatan aliansi ketiga Kerajaan Bugis ini (Mappangara, 2003: 92).

Penolakan untuk menerima Islam tanpa alasan yang jelas dari raja-raja Bugis, dimana Kerajaan Gowa dipandang sebagai suatu tantangan. Sebagai satu kerajaan yang besar di Sulawesi Selatan, penolakan itu tidak saja dipandang sebagai ancaman dalam pengembangan Kerajaan Gowa di masa depan, tetapi juga ada kekhawatiran bahwa agama Kristen akan dapat dengan leluasa masuk ke daerah-daerah pedalaman Sulawesi Selatan. Jika hal ini terjadi, maka secara pelan tapi pasti pada gilirannya akan mengganggu perkembangan Kerajaan Gowa dengan Bandar pelabuhannya Sombaopu (Mappangara, 2003: 92).

Adanya penolakan dan penentangan yang keras dari pihak raja-raja Bugis, maka hal itulah yang mengobarkan api permusuhan lama kembali berkobar. Sehingga untuk pertama kalinya dalam karir politik Karaeng Matoaya meninggalkan kebijakan berdamai dengan Kerajaan Bugis karena keyakinan pada manfaat yang lebih besar untuk menyebarkan Islam. Kerajaan Gowa pada mulanya menuntut Kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo agar menerima Islam demi persahabatannya dengan Gowa.

Ajakan untuk menerima Islam menurut Tellumpoccoe adalah sebagai siasat Gowa untuk menguasai mereka. Olehnya itu mereka sepakat menolak ajakan tersebut. Penolakan itu menjadi alasan bagi Gowa untuk untuk menempuh jalan lain, dan jalan lain itu ialah mengangkat senjata untuk memerangi kerajaan-kerajaan Bugis yang tidak menerima ajakan. Empat kali Gowa mengirim tentaranya ke Kerajaan Bugis, pertama pada 1608 yang dengan sukses tentara Gowa dikalahkan oleh pasukan-

pasukan pertahanan kerajaan-kerajaan Bugis yang tergabung dalam persekutuan Tellumpoccoe. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya, selama empat tahun berturut-turut, Kerajaan-kerajaan Bugis itu dikalahkan dan di-Islam-kan: Sidenreng dan Soppeng (1690), Kemudian Wajo (1610), dan Bone sebagai kerajaan terbesar di antara mereka juga mengikuti jejak rekannya dalam tahun 1611. Demikianlah peperangan Kerajaan Gowa melawan kerajaan-kerajaan Bugis selama empat tahun lamanya, yang dalam sejarah Lontarak Bugis dikenal sebagai "*Musu Selleng*" atau Perang Pengislaman.

3. Peperangan (*Musu Selleng*)

Ajakan Kerajaan Gowa untuk menyebarkan Islam dipandang oleh raja-raja Bugis sebagai upaya Kerajaan Gowa untuk memperluas kekuasaan wilayahnya dengan membonceng agama Islam sebagai legitimasi ajakan, kendati pun seruan raja Gowa didasari isi perjanjian lama, namun kenyataannya kerajaan-kerajaan Bugis utamanya yang tergabung dalam persekutuan Tellunpoccoe menolak ajakan tersebut (Mappangara, 2003: 92).

Dengan adanya penolakan itu, maka Kerajaan Gowa melancarkan sejumlah perang untuk memaksa beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan agar menerima Islam. Berturut-turut di Islamkan seperti, Rappeng sebagai salah satu kerajaan besar yang tergabung dalam Lima Ajattappareng, setelah mendapat serangan dari Kerajaan Gowa secara praktis menyatakan diri memeluk agama Islam yang diikuti oleh seluruh rakyatnya pada tahun 1609. Kerajaan Gowa, yang khawatir akan diperbaharuinya persekutuan *TellumpoccoE* (tiga puncak), yaitu Bone, Wajo, dan Soppeng terhadapnya, menyatakan perang suci terhadap kerajaan-kerajaan tersebut (Mangemba, 1956: 91). Tindakan Kerajaan Gowa dalam penyebaran agama Islam tersebut ditegaskan

oleh Samuel Denis dalam suratnya tahun 1612 bahwa Raja Gowa dengan paksa telah menundukkan orang-orang Bugis dan kini mereka menjadi Moor (Muslim).

Soppeng yang tergabung dalam persekutuan *TellumpoccoE* setelah terjadinya pertempuran di Tanete Soppeng mengalami kekalahan dari pasukan Kerajaan Gowa pada tahun 1609 (Pananrangi Hamid, 1991: 128). Dalam *Lontara Bilang* Raja Gowa dan Tallo disebutkan bahwa "*Namantama Islam Tu Soppeng, Bundu ri Pakenya*" (Orang-orang Soppeng memeluk agama Islam, setelah perang di Pakenya) (Kamaruddin, 1985: 9). Kurang lebih satu tahun kemudian Raja Gowa bersama Datu Soppeng (1601-1620), mengirim utusan menemui Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau untuk mengajaknya masuk Islam secara damai, akan tetapi Arung Matowa Wajo menolaknya, maka peperangan pun tak dapat dihindari, pasukan gabungan Gowa, Rappeng menyerbu Wajo, Calekko dikuasai dan Tatinco, Tempe, Sengkang dan Tampangen diserang oleh pasukan Ajattappareng. Maka dalam waktu yang relatif singkat Wajo ditaklukkan, yang kemudian Arung Matowa Wajo mengutus Pilla, Patola dan Cakkuridi (Bate Lompo) untuk menyampaikan permintaan gencatan senjata (Hamid, 1988: 20).

Sehari setelah diadakannya gencatan senjata Arung Matowa Wajo kembali mengutus La Mappepulu To Appamale dan To Ali untuk menemui Karaeng Barombong untuk datang ke Wajo dan Arung Matowa Wajo bersedia menerima Islam. Kemudian Karaeng Gowa menuju ke Tosara untuk menemui undangan Arung Matowa Wajo, namun setibanya di Topaceddo (sebelah barat Tosara), disanalah Arung Matowa Wajo, La Sangkuru Patau menerima Islam (Mattulada, 1982: 440). Kerajaan Bone menjadi kerajaan terakhir yang diserang oleh Kerajaan Gowa karena menolak menerima agama Islam.

Perang penaklukan yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa ke Kerajaan Bone dengan alasan Islamisasi yang dalam istilah Bugisnya "*Musu Selleng* atau *Islamic Wars*, *Musu Selleng* lebih dapat diartikan sebagai ekspansi politik ekonomi, terutama jika dihubungkan posisi Kerajaan Gowa sebagai kerajaan Maritim yang menuntutnya mencari daerah-daerah penghasil komoditi. Dengan alasan itu dapat dipahami bahwa alasan dalam menaklukan kerajaan Bone mempunyai nilai ganda dalam pernyataan politik, sebagai pernyataan simbolis tentang penerimaan Islam, juga sebagai pernyataan politik. Dalam *Hikayat Tallo* dikemukakan beberapa catatan bahwa ketika Kerajaan Gowa dalam penyebaran agama Islam, tidaklah melakukan tindakan kekerasan yang berlebih-lebihan, hal ini tergambar lewat penuturan *lontarak* yang menceritakan perilaku Mangkubumi Kerajaan Gowa, Karaeng *Matoaya*, disebutkan bahwa:

... Ketika beliau mengalahkan orang-orang Bugis, beliau tidak memperbolehkan tentaranya merampas harta benda rakyat, bahkan tidak mengambil harta rampasan perang dari daerah-daerah yang ditaklukkannya, tidak menuntut ganti rugi apapun atau memungut upeti sebagai tanda takluk kepadanya, karena beliau tidak ingin melihat rakyatnya menderita karena pembayaran upeti. Beliau pernah berkata kepada Tumenanga ri Bonto Biraeng (Putra *Matoaya*, *Pattingalloang*) bahwa ketika beliau mengalahkan persekutuan *TellumpoccoE* (Bone-Wajo-Soppeng), jangan merampas hartanya, daun kayunya pun tidak dipetikinya; bahkan beliaulah yang membagi-bagikan kepada rakyat yang ditaklukkannya beberapa macam pakaian dan harta lainya sebagai hadiah ... (Mappanganra, 2003: 105).

Bahwa dalam serangan Gowa terbawa-bawa nama agama, dapat dilihat dari ungkapan "*ampasombai tu Soppenga sipalili, ambetai Bone, tunabetayya napantamai Isilang, tumannyombaya napantamai Isilang ...*" (Abdurrahim, 1975:16). J. Noordoynd melihat adanya unsur pemaksaan dalam kaitannya dengan penyebaran Islam yang dikampanyekan oleh Gowa, suatu persepsi yang mungkin muncul dari konstalasi Islamisasi itu sendiri. Dalam hubungan itu J. Noordoynd menyebut, "pengislaman resmi yang dilaksanakannya dalam lapangan politik dan militer sudah berakhir ketika para raja-raja bersama rakyatnya telah menerima Islam dengan mengucapkan syahadat" (Noordoynd, 1964: 90).

Pengerahan pasukan oleh Kerajaan Gowa untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam persekutuan *TellumpoccoE* (tiga puncak), dalam lontara Bugis tercatat sebagai *Musu' Selleng* (Mattulada, 1982: 41), yang oleh Christian Pelras diterjemahkan dengan *Islamic Wars*. (Pelras, 1985: 109), adalah fase yang sudah umum dalam memberikan label terhadap proses sejarah dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Secara humaniora, yaitu melibatkan Islam sebagaimana adanya, tidak ada persoalan karena *Musu' Selleng* dalam Islam tidak ada, sehingga dengan itu pula akan mudah menunjukkan bahwa perang itu bukan konfigurasi dari tugas suci ataupun perang suci. Akan tetapi apakah pendekatan itu dapat diterima berdasarkan kenyataan sejarah adalah soal lain, karena adanya pengislaman secara militeristis atau politis seperti yang disebutkan J. Noordoynd (1964: 90), Dengan demikian, kembali kepada humaniora saja belumlah cukup untuk meratakan jalan tanpa melihat kembali latar belakang sejarah Kerajaan

Gowa dengan persekutuan *TellumpoccoE*, suatu perjalanan sejarah yang penuh pergolakan dalam kerangka prestise.

Jauh sebelum kekuasaan Sultan Alauddin, serangan-serangan dan invasi militer sudah merupakan kebanggaan bagi setiap raja di Gowa dan dalam setiap perang yang terjadi Gowa senantiasa pada posisi yang menguntungkan selikapun terkadang juga harus mengalami kekalahan. Seorang raja perkasa, seperti Sultan Alauddin, tentu saja berupaya untuk melestarikan kebanggaan betapapun ia telah menerima Islam, apalagi jika dilihat bahwa kerajaan-kerajaan besar Bugis telah berhasil membentuk persekutuan *Tellumpoccoe* yang bagi Gowa tidak lain merupakan ancaman besar terhadapnya. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan, apakah *Musu' Selleng* yang dilakukan oleh Gowa terhadap persekutuan *Tellumpoccoe* semata-mata karena mereka menolak pengislaman, ataukah hanya karena Gowa ingin mendapatkan hegemoni kekuasaan di Sulawesi Selatan, atau mungkin sekedar memperlambat Islam dengan tujuan mencari bahan komoditi dalam menunjang Kerajaan Gowa sebagai kerajaan niaga yang terbesar di kawasan timur Nusantara.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Louis Gottschalk mengemukakan teori tentang pembahasan masalah penyebab yang mendorong terjadinya suatu peristiwa dengan membedakan "sebab langsung" dan sebab tidak langsung". Menurutny, "sebab langsung", bukanlah sebab yang sesungguhnya; "sebab langsung" langsung hanyalah merupakan suatu titik dalam suatu mata rantai peristiwa yang sekaligus menjadi pemicu dari penyebab yang sesungguhnya atau "sebab tidak langsung". (Gottschalk, 1985: 154-155).

Apa yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk bila dikaitkan dengan *Musu' Selleng*, maka "sebab langsung" adalah *Musu' Selleng*, sedangkan "sebab tidak langsung"

adalah keinginan Sultan Alauddin untuk menjadikan Gowa sebagai kerajaan yang kuat dari segi politik dan ekonomi. Oleh karenanya, sekalipun *Musu' Selleng* merupakan "sebab langsung" terjadinya invasi terhadap persekutuan *TellumpoccoE*, dampak dari perang itu sangat menguntungkan dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, sebab diiringi dengan pengislaman terhadap raja-raja yang ditaklukkan, seperti yang terbuat dalam *Lontara Tallo*:

112. ... *tunabettaya iangaseng napantamai Isilang, tumannyombaya napalilikangi; nappatamai Isilang, tunabettaya napalilikangi; ammaradekangi Tempe sipue, Bulucenrana, Wawania, Bilokka, Pekkalla'bu; nabettanaa Bugisika ri tallumbocco-boccoa, tama'rappai tamangngalei sa'bu kati, tamappalakkai ra'ba-bae, teami natea.* (Ahmad M. Sewang, 1997: 152).

Artinya:

112. ... semua orang yang dikalahkan dimasukkan Islam, orang-orang yang menyembah [kepadanya] dimasukkan Islam, yang dikalahkannya dijadikan daerah takluknya, ia memerdekakan sebagian daerah Tempe, Bulu'cinrana, Wawonia, Bilokka, Lemo, Campaga, Pattiongi dan Pakalla'bu. Pada waktu mengalahkan Kerajaan Bugis yang tergabung dalam persekutuan *TellumpoccoE*, ia tidak merampas atau mengambil rampasan perang, dan tidak mengambil ganti rugi perang.

Setelah Kerajaan Bone dapat ditaklukkan pada tahun 1611, maka seluruh wilayah Sulawesi Selatan dinyatakan telah menerima Islam, kecuali daerah Tana Toraja. Dengan demikian, untuk pertama kalinya Gowa berhasil menundukkan Kerajaan Bugis secara tuntas, khususnya

Bone, yang dalam banyak kesempatan sering bersebelahan. Pertimbangan politik tampaknya menjadi alasan mengapa hal itu terjadi. Gowa telah berhasil menciptakan supremasi politiknya di Sulawesi Selatan yang telah menghabiskan waktu dari bagian terbesar sejak abad ke 16 untuk merebunya tanpa pernah mendapat hasil yang sempurna.

Kerajaan Gowa semakin agresif mengadakan ekspansi ke beberapa kerajaan, di antaranya Bima dalam tiga kali penyerangan (1616, 1618 dan 1626), Kerajaan Sumbawa dalam dua ekspedisi (1616 dan 1626), Dompu ditaklukkan pada 1626). Buton yang ditaklukkan pada tahun 1626 telah masuk Islam sebelumnya. Memenangkan Lombok (Salaparang), Kutai dan Berau pantai Timur Kalimantan, membuat kontrak dengan Bali dan menanamkan pengaruh hingga pulau Timor dan kepulauan Aru-Kei. Sampai tahun 1660, daerah-daerah di Luar Sulawesi Selatan yang tunduk pada kekuasaan Gowa dan Tallo terpetakan: Bima (1616), Sumbawa, Salapangan/Lombok (1618), Pulau laut (1618), Kutai (1618), Berau (1618), Buton (1626), Banggai dan pulau-pulau Sula (1626), pulau-pulau Solor-Sandowo (Flores)-Sumba (1626), Gorontalo dan Manado (1634), pulau-pulau Obi (1640), Buru (1640), Australia Utara (1640). (Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 11, Daerah-daerah taklukan yang mengakui Kerajaan Gowa sebelum Perang Makassar Pecah).

diam berangkat ke Sidenreng untuk bertemu dengan Adattuang Sidenreng La Patiroi yang sudah memeluk Islam. Maksud kedatangan We Tenri Tuppu tersebut untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam (Abidin, 1999: 232). Namun tidak beberapa lama berada di Sidenreng, ia jatuh sakit dan meninggal, kemudian dikenal dengan gelar *Matinroe ri Sidenreng* (raja yang meninggal dunia di Sidenreng), sedangkan Bone waktu itu belum masuk Islam (Rasdiyanah, 1982: 65).

“... the queen *Matinroe ri Sidenreng*, had gone to the newly Islamized Sidenreng in the year after the Islamization on Wadjo, which took place in 1610. She too adopted Islam there but shortly afterwards fell ill and died (Noordoy, 1964: 148).

Pada tahun 1611 We Tenrituppu, digantikan oleh La Tenriruwa sebagai Raja Bone yang ke 11. Mengetahui adanya pergantian raja di Kerajaan Bone, maka Sultan Alauddin, Raja Gowa ketika itu berkunjung ke Bone untuk memberi penghormatan atas pelantikan itu. Dalam kunjungan itu juga dibicarakan tentang bagaimana sebaiknya sikap Kerajaan Bone terhadap Islam (Rasdiyanah, 1982: 66). Pada prinsipnya ajakan yang dilontarkan ajakan Sultan Gowa secara pribadi dapat diterima oleh, La Tenriruwa kemudian menyatakan masuk Islam setelah bersama-sama dengan pasukan kerajaan Gowa menyerang Kerajaan Bone, pada tahun 1611 (Rasdiyanah, 1995: 65). Namun ia sendiri tidak dapat memutuskan karena ada *Ade Pitue* (Dewan Adat) di Kerajaan Bone yang memutuskan segala sesuatu tentang jalannya pemerintahan di Kerajaan Bone (Mattulada, 1985: 226).

Dalam salah satu pertemuan yang dilakukan antara raja Bone dan *Ade Pitue* dengan pembesar-pembesar

kerajaan lainnya. Dalam sebuah *Lontarak* Raja Bone mengatakan bahwa:

Makkedani Arung Pone Netotebbe'ne ... Engkai Suro Karaengnge tanrereangngi deceng iana ritu Asellengeng maderengngi mennang taceppa Apa iariakku Masennissa Iyanae Agama tongeng-tongen masompa ri Dewata seuwae Marole ri Nabie. Naengka manengtosa akkulle adengngena nabie, Apa kuolanisa sibawa to tebbe kudecenna, rekkua natarima muannengngi to Bone Adakue, Dua mua Maraja Mappada Ada Tongeng, Bone muana Gowata pada makkasiwiang ri Dewata Seuwae apa iana papoata.

Mendengar ajakan Raja Bone itu, tidak mendapat tanggapan positif dari *Ade Pitue*, para pembesar kerajaan dan juga rakyatnya. Sebagai seorang Raja, penolakan terhadap seruan itu adalah cerminan dari ketidak setiaan rakyatnya. Oleh karena itu, Raja Bone meninggalkan *Lalebbata-Watampone*, dan pindah menetap di *Pattiro* bersama keluarganya dan orang-orang yang masih setia kepadanya. (Mattulada, 1995: 71). Setibanya di *Pattiro* Raja Bone menyerukan agar rakyatnya mengikuti anjuran Sultan Gowa untuk memeluk agama Islam, namun rakyat *Pattiro* juga menolak ajakan itu, maka beliau hanya tinggal di istana (*salassa*) (Ali, 1969: 26).

Tindakan yang dilakukan oleh Raja Bone itu mendapat reaksi dari *Ade Pitue*, yang mengadakan musyawarah dan memutuskan untuk menuzulkan raja Bone, *La Tenri Ruwa* dari tahtanya (Mattulada, 1982: 42). Kemudian *To Alaungeng* di utus untuk menyampaikan hasil musyawarah dari *Ade Pitue* di Bone.

Bahwa hamba ini diutus oleh rakyat Bone menghadap *Puatta MangkauE*, menyampaikan

bahwa dalam hal ini bukanlah rakyat yang tidak menyukai Puatta, tetapi Puattalah yang tidak menyukai kami sekalian. Puatta adalah lebih mengetahui dari pada kami sekalian, bahwa dewasa ini negeri Bone sedang dalam kesusahan, tetapi meskipun demikian Puatta tiggalkan juga (Abdurrazak, 1993: 109).

Setelah dilakukan perundingan dengan antara *Ade Pitue* dengan para pembesar kerajaan akhirnya diputuskan untuk mencari pengganti La Tenri Ruwa dengan dinobatkannya La Tenri Pale Tuakkepeang, Arung Timurung sebagai Raja Bone ke 12 (Ali, 1969: 27). Sultan Hasanuddin yang mengetahui La Tenri Ruwa telah diturunkan dari tathtanya, mengutus Karaeng Pettuang bersama sejumlah pasukan Kerajaan Gowa ke Pattiro untuk menjemput dan melindungi La Tenri Ruwa beserta keluarganya. Kedatangan La Tenri Ruwa di Palette di sambut oleh raja Gowa Sultan Alauddin, Raja Bone La Tenri Ruwa yang telah memeluk agama Islam akhirnya diberi gelar Adamulmarhum Kalinul Islam.

Penolakan Bone dalam menerima agama Islam, selain menuzulkan rajanya, Bone juga memperlihatkan tingkah laku yang menentang Gowa. Melihat keadaan yang demikian, Kerajaan Gowa memutuskan untuk menyerang Kerajaan Bone. Perang ini diakhiri dengan kekalahan di pihak Kerajaan Bone (Ali, 1969: 28). Sebagaimana biasanya, setelah suatu kerajaan dikalahkan, maka raja dan rakyatnya memeluk Islam. Demikian halnya Kerajaan Bone, setelah dikalahkan dalam perang, Raja Bone La Tenri Pale Tuakkepeang, bersama rakyatnya secara resmi masuk Islam pada tanggal 23 November 1611, sebagaimana disebutkan dalam Lontara' Bilang Raja Gowa-Tallo:

Hera 1611

Hijara' sanna 1020

23 Noembere', 23 Rumallang, Salasa. Nabeta ri bunddu'
kasallangnga

Artinya:

1611 Masehi,

1020 Hijriah

23 November, 23 Ramadhan, Selasa Bone
dikalahkan dalam perang peng-Islaman.

Jadi dengan demikian setelah Kerajaan Bone dapat ditaklukkan dan resmi memeluk agama Islam, maka perang pengislaman yang dilakukan oleh Gowa dapat dianggap sudah berakhir. Penerimaan Islam oleh kerajaan Bone juga memberikan arti tersendiri bagi kerajaan Gowa, sebab untuk pertama kalinya Gowa dapat menguasai kerajaan-kerajaan Bugis secara keseluruhan hal ini sebagai mana dikemukakan oleh J. Noorduyn (1956: 76):

For Goa the result of its military enterprise meant more than the fulfillment of a holy duty. Now for the first time it had succeeded in definitively subjecting all Buginese princedoms ... and particularly Bone, its old rival on the peninsula.

Artinya:

.. Bagi Gowa, arti pengiriman pasukan itu bukan hanya soal memenuhi kewajiban suci. Dalam hal ini, untuk pertama kali Gowa berhasil menaklukkan Kerajaan Bugis secara telak ... dan terutama Bone, musuh lamanya di semenanjung itu ...

A. Tahap berikutnya adalah proses sosialisasi dan akulturasi Islam ke dalam struktur kerajaan dan kehidupan masyarakat. Nampaknya, proses ini berjalan dengan tidak banyak menimbulkan pertentangan. Hal

ini terjadi, agaknya, lebih disebabkan karena sejak semula, penyebaran Islam dilakukan dengan prakarsa Raja dan kemampuan adaptasi yang melibatkan oleh para penganjur Islam. Dengan diterimanya Islam oleh La Tenripale maka saat itulah beliau digelar dengan Sultan Abdullah yang memerintah pada waktu itu sehingga agama Islam diterima menjadi agama resmi kerajaan. Sebagai agama yang dianut oleh masyarakat kerajaan Bone maka agama Islam tersebut berkedudukan sebagai agama resmi kerajaan yang mana Islam dianut secara universal artinya dari atas ke bawah atau rajanya dahulu yang menganut Islam kemudian rakyatnya.

D. Usaha-usaha Penganjur Agama Islam di Kerajaan Bone

Usaha-usaha La Tenripale dalam menyebarkan Islam ialah beliau sendiri bersama dengan beberapa orang dari Kerajaan Bone yang datang ke Gowa tepatnya di Bontoala dimana berpusat pengajaran Islam, tempat Khatib Tunggal Dato ri Bandang mengajarkan Islam yang menekankan pada ajaran syareat dan ilmu Kalam. Kemudian beliau bersama dengan orang-orang yang menyertainya kembali ke Bone yang selanjutnya menyampaikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat Bone.

Pada masa La Tenripale inilah penyebaran Islam telah merata dikalangan masyarakat, namun dakwah Islamiyah masih terintegrasikan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Nanti pada masa Lamaddaremmang (1631-1640) Raja Bone ke 13 dengan gelar Sultan Muhammad Saleh, beliau adalah kemenakan Raja Bone ke 12 Latenri Pale berusaha mengangkat kedudukan Islam dengan jalan mengembangkan struktur pemerintahan dengan

memasukkan perangkat Qadi yang menangani urusan pengembangan dan pemantapan pelaksanaan syariat Islam.

Pada hakekatnya pengembangan Islam di Kerajaan Bone dilakukan oleh raja atau orang-orang yang telah mempelajari agama Islam. Setelah La Tenri Pale memerintah maka beliau digantikan oleh La Maddaremmeng Saleh. Beliau adalah kemenakan La Tenri Pale. La Maddaremmeng memerintah pada tahun 1625-1640. Raja La Maddaremmeng termasuk seorang raja yang aktif dalam mencari usaha-usaha untuk kemajuan perkembangan kerajaan.

Adapun usaha-usaha beliau dalam mengembangkan agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Pada masa pemerintahan La Maddaremmeng dibentuk organisasi pejabat-pejabat *sara'* yang termasuk dalam aspek *pangngadereng* seperti Kali, Imam, Khatib, Bilal, Mukim dan Amil.
2. Memberikan tugas kepada orang-orang yang telah mempelajari pengetahuan agama Islam di Gowa untuk memberikan pengajian kepada masyarakat di pelosok-pelosok kerajaan Bone mulai dari tingkat dasar sampai tingkat membaca lancar demikian pula diajarkan syariat Islam dan tasawuf.
3. Beliau pula mengadakan penghapusan kepercayaan kepada roh-roh atau animisme.
4. Menghapuskan segala sistem penghambat atau perbudakan karena menurut beliau sesungguhnya manusia itu mempunyai tingkat derajat yang sama.

Setelah La Maddaremmeng memerintah maka ia digantikan oleh saudaranya yang bernama La Tenriaji To Senrima sebagai Raja Bone yang XIV pada tahun 1640-1643. Tidak lama beliau memerintah maka datanglah serangan dari kerajaan Gowa yang mengadakan pertempuran secara

besar-besaran ke kerajaan Bone. dari pertempuran ini akhirnya kerajaan Bone mengundurkan diri ke Pasempe. Dan di Pasempe inilah kerajaan Bone dapat dikalahkan, dengan kekalahan ini La Tenriaji To Senrima maka kerajaan Bone menjadi Bagian dari kerajaan Gowa.

Adapun raja Bone XV yaitu la Tenritatta yang digelar Arung Palakka, Dato Mario, Petta MalampeE Gemmena, To Appatunru, Petta To Risompe, Sultan Saadiddin Matinroe ri Somba Opu. Beliau naik tahta dikerajaan Bone setelah beberapa tahun mencari bantuan untuk membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan Gowa.

Setelah menduduki tahta kerajaan maka beliau dalam mengembangkan kerajaan Bone adalah sebagai berikut:

1. Membina dan mempersatukan kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.
2. Segala lembaga-lembaga kerajaan berfungsi kembali *panggadereng* yang didalamnya termasuk *syara'* dan kelengkapannya.
3. Mendirikan masjid yang bernama al-Muhajirin dan masyarakat Bone menamainya "Masigi Toae" artinya masjid tua atau masjid yang tertua dikerajaan Bone.
4. Diberikan kebebasan kepada ulama-ulama untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehingga kesempatan ini dipergunakan oleh para ulama seperti syeh Nuruddin Abdul Fatta, Abdul Basir dari Rappang dan Qadir Karaeng Jenno, ketiganya adalah murid dari Syeh Yusup dan lain-lain, untuk mengembangkan Islam dan lebih leluasa mengembangkan Dakwah Islam ke negeri-negeri Bugis.

Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan oleh La Tenri Tatta Arung Palakka sebagai raja Bone XV dalam mengembangkan Islam.

Kesimpulan

Kerajaan di Sulawesi Selatan yang mula-mula menerima Islam ialah Gowa-Tallo, pada hari Kamis malam/malam Jumat 22 September 1605 M/9 Jumadil Awal 014 H. Kemudian dalam masa dua tahun berikutnya seluruh rakyat Gowa dan Tallo telah memeluk agama Islam, peristiwa ini ditandai dengan melakukan sholat Jumat untuk kali pertama pada 9 Nopember 1607 M/9 Rajab 1016 H. Sholat Jumat ini memiliki arti penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, karena setelah itu pelaksanaan sholat Jum'at itu Raja Gowa ke 14, Mangaranngi Daeng Marambbia yang bergelar Sultan Alauddin, mendekritkan bahwa Kerajaan Gowa sebagai Kerajaan Islam dan pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Hal ini didasarkan pada konversi (paseng) persahabatan raja-raja terdahulu yang sudah lama terikat bahwa barang siapa yang menemukan jalan baru akan menyampaikan dan menyebarkannya kepada raja-raja yang lain. Sesuai dengan tuntutan itu Raja Gowa menyampaikan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan bahwa Islam adalah jalan yang baik.

Penyebaran agama Islam diadakan dalam seruan-seruan baik yang diajukan oleh Raja Gowa 14, Sultan Alauddin, seruan pengislaman ini diterima dengan baik pula dibeberapa kerajaan seperti di Kerajaan Sawitto, Balanipa di Mandar, Bantaeng dan Selayar, sampai disini berlangsunglah penyebaran Islam dengan cara-cara damai. Lain halnya ketika penyebaran agama Islam memasuki wilayah kerajaan Bugis kuat, seperti Kerajaan, Bone, Wajo dan Soppeng menolak ajakan Kesultanan Gowa, sehingga

Gowa melakukan perang kepada mereka. Empat kali Gowa mengirimkan pasukannya ke tiga kerajaan itu, pertama kali dalam tahun 1608, akan tetapi Gowa dapat dikalahkan oleh kerajaan Bugis yang tergabung dalam aliansi *Tellu Poccoe*. Pada tahun-tahun berikutnya kerajaan Bugis dikalahkan satu persatu. Berturut-turut Soppeng (1609), Wajo (1610) dan Bone (1611).

Setelah Kerajaan Bone dapat ditaklukkan dan resmi memeluk Islam, maka perang pengislaman yang dilakukan oleh Gowa dapat dianggap sudah berakhir, yang dampaknya sangat menguntungkan dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan sebab diringi dengan pengislaman terhadap raja-raja dan elit kerajaan yang ditaklukkan. Namun demikian, penyebaran Islam oleh Kerajaan Gowa ke Kerajaan-kerajaan Bugis selama empat tahun, dalam Lontara Bugis tercatat sebagai *Musu Selleng* (Perang Pengislaman).

Kerajaan Bone secara resmi menerima Islam pada tanggal 23 November 1611 kemudian Islam di Kerajaan Bone secara berangsur-angsur mengalami perkembangan dalam penyebarannya, Raja Bone ke 12, La Tenri Pale yang bergelar Sultan Abdullah menyeru kepada rakyatnya untuk menerima agama Islam. Pase selanjutnya adalah penyebaran ajaran Islam dan pemantapannya dalam sosio politik.

B A B 5

PENYEBARAN ISLAM PADA DOMAIN SOSIAL-POLITIK DI KERAJAAN BONE

A. Penyebaran Islam dalam Struktur Kerajaan Bone

Penyebaran agama Islam di Kerajaan Bone erat kaitannya dengan Kerajaan Gowa yang mempunyai peranan penting sebagai pusat penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan pada permulaan datangnya Islam di daerah ini, dan sebagai pembawa Islam pertama di daerah tersebut.

Penerimaan penguasa terhadap Islam, mempermudah rakyat mereka untuk berpindah agama, mengikuti jejak rajanya, walaupun ada penerimaan berlangsung secara suka rela, juga terdapat raja atau sultan secara formal mendekritkan sebagai agama rakyat dan negaranya. Raja Bone ke 12, Latenri Pale setelah menerima Islam kemudian menyatakan bahwa seluruh masyarakat wilayah kerajaannya telah menjadi Islam dan diakui agama Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Kerajaan Bone yang banyak berhubungan dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti Kerajaan Gowa, Luwu, Wajo dan Soppeng yang sama-sama mengalami puncak kejayaannya pada abad ke 14 sampai abad ke 18. Dengan demikian struktur pemerintahannya pada masa pra-Islam tidak banyak berbeda dari yang terdapat pada struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan.

1. Penyebaran Agama Islam di Kerajaan Bone

Agama Islam oleh masyarakat di Kerajaan Bone secara berangsur-angsur mengalami perkembangan dalam penyebarannya dimana rajanya yang telah menganut Islam kemudian menyeru kepada rakyatnya dalam hal ini raja Bone XII La Tenripale yang memerintah pada waktu itu sehingga agama Islam diterima menjadi agama resmi kerajaan.

Dalam hal ini akan dikemukakan jalur-jalur penyebaran agama Islam di kerajaan Bone sebagai berikut:

a. Dakwah Islamiyah

Sebelum dijelaskan lebih jauh terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pengertian dari pada dakwah.

Menurut Prof. Dr. Toha Umar dalam bukunya *ilmu Da'wah* mengatakan bahwa pada dasarnya dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan, seruan, panggilan, undangan yang mendorong pada suatu tujuan.¹

Dengan demikian dakwah bertujuan mengajak orang kepada kebenaran agar memperoleh kebahagiaan dimasa sekarang dan yang akan datang dan dakwah tersebut bersumber dari Alquran dan hadis. Dalam hal ini Alquran merupakan kitab suci bagi umat Islam dan merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman hidup umat Islam baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu pula hadis yang merupakan pedoman hidup atau sumber hukum kedua.

b. Mendirikan Masjid dan Mushalla

Masjid adalah tempat melaksanakan ibadah sholat baik secara perorangan maupun secara berjamaah. Pengertian ini merupakan gambaran dalam pengertian masjid dari redaksinya, karena masjid adalah tidak lain

¹ Toha Jahja Omar, *Ilmu Da'wah* (Cet. I; Jakarta: Wijaya, 1967), h. 1.

sebagai tempat bersujud kepada Allah dalam rangka melaksanakan ibadah sholat.

1) Masjid sebagai tempat Ibadah

Masjid bagi umat Islam adalah merupakan aktifitas ibadah, sebab fungsi masjid sangat besar bagi ukhuwah Islamiyah, sebagaimana dalam sejarah yaitu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad saw ketika di Madinah yaitu Mesjid Kuba. Dalam hubungannya dengan kerajaan Bone yang paling dominan Islam sangat memperhatikan keberadaan rumah ibadah sebagai sarana fisik terhadap keagamaan. Adapun masjid yang pertama dibangun di kerajaan Bone setelah masuknya agama Islam adalah Masjid al-Mujahidin yang didirikan oleh La Tenritatta (Arupalakka). Dengan mengingat kegiatan yang dilaksanakan di Masjid tersebut dapatlah dikatakan bahwa masjid merupakan pusat dalam melaksanakan ibadah setiap saat.

2) Masjid sebagai Pusat Pendidikan

Sejarah sebagai bukti nyata bahwa Islam terdahulu dikembangkan melalui tempat-tempat seperti masjid, mushalla dan langgar serta rumah-rumah. Pengajian yang dilaksanakan oleh para ulama seperti dakwah Islamiyyah selalu dilaksanakan di Masjid-masjid, misalnya pada hari Jumat, pada bulan Ramadhan dan kesemuanya itu mengandung unsur pendidikan agama.

2. Struktur Kerajaan Bone

Struktur pemerintahan Kerajaan Bone terdiri atas: a. raja; b. *To-Marilalang*; c. Anggota-anggota adat; d. *Jemma Tongeng*; e. *Anrong guru Anak Karaeng*; f. *Tomalompona Towangke*; g. *Anrong Guru Pukalawing Epu*; h. *Suro (suro seppuloEdua)*; i. *Parennung*; j. Juru Bahasa, dan k. Juru Tulis.

Struktur pemerintahan Kerajaan Bone tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Raja

Kerajaan Bone terbentuk pada awal abad ke 14 pada tahun 1326 Raja yang berkuasa di Kerajaan Bone berasal dari keturunan *To Manurunge* sebagai raja pertama (Ali, 1969: 2). Semua raja penggantinya diakui dan dipercaya sebagai keturunan langsung dari raja Bone yang pertama.

Orang Bone menyebut rajanya "*Petta Mangkaue ri Bone*" (Tuanku yang berdaulat di Bone/raja yang berkuasa dan duduk di atas tahta kerajaan di Bone). Selain istilah ini dipergunakan juga istilah-istilah *Arung Mangkau'* dan *Arum Pone* dalam arti raja pada pusat Kerajaan Bone Mattulada, 1985: 428) Sebelum jatuhnya kerajaan ini ke tangan Belanda pada tahun 1860, raja diangkat atas dasar musyawarah oleh *Ade PituE* sesuai dengan sistem aristokrasi. Sesudah itu raja diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan pasal 26 dari perjanjian yang ditandatangani pada 13 Pebruari 1860.

Kedudukan raja tidak hanya diperuntukkan khusus seorang laki-laki, tetapi terbuka untuk perempuan. Penunjukan seseorang yang akan menduduki tahta kerajaan khusus diperuntukkan bagi mereka yang memiliki darah *To ManurungE* (Rahim, 1985: 70-71). Oleh karena darah dan keturunan yang lebih diperhatikan maka dalam sejarahnya yang panjang kerajaan ini pernah dikendalikan oleh enam orang raja perempuan. Selain itu jika ditelaah lebih rinci lagi raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Bone tidak selalu putra mahkota, yang menduduki tahta kerajaan secara turun-temurun dari ayah kepada anaknya.

Syarat terpenting penunjukan seseorang untuk menduduki tahta kerajaan adalah kemurnian darahnya. Persyaratan ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat

digugat. Hal ini dikarenakan putra-putri keturunan *To ManurungE* telah difungsikan secara maksimal. Putra-putri Kerajaan Bone telah tersebar hampir pada setiap kerajaan Bone. Untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam tangan mereka, persyaratan darah dalam penentuan seseorang menduduki tahta kerajaan mutlak dipenuhi.

Jika seseorang raja memiliki putra atau putri yang bukan berasal dari darah yang sama, biasanya akan dicari saudara dari sang raja untuk menggantikannya. Dalam sejarah Kerajaan Bone ini sering ditemukan, misalnya saja Ratu Bone Besse Kajuara, Raja Bone ke 27, yang menduduki tahta kerajaan karena menggantikan suaminya, Arung Pugi. Demikian pula Arung Pugi, Raja Bone ke 26 karena menggantikan saudaranya Arung Panyili, Raja Bone ke 25.

b. *To-Marilalang*

To-Marilalang (orang dalam). Jabatan *To-Marilalang* pada masa sekarang dapat disejajarkan dengan Perdana Menteri (Hamzah, 1979: 71).. Dalam struktur pemerintahan, *to-marilalang* mengetuai *Ade PituE*. Pengangkatan dan perberhentian *to-marilalang* langsung ditangani oleh raja (Mattulada, 1995: 410). Namun, setelah Kerajaan Bone menjadi kerajaan pinjaman pada tahun 1860 dan seterusnya jatuh di bawah kekuasaan Belanda pada tahun 1905, *To-marilalang* diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan pasal 27 Perjanjian Palakka.

Seorang *To-marilalang* bertugas mengatur semua urusan mengenai pengadilan, polisi dan rumah tangga pemerintahan. Seseorang yang menduduki jabatan ini haruslah keturunan bagsawan, dan salah seorang dari neneknya pernah menjabat kepala pemerintahan. Semasa menjabat jabatan *To-marilalang* tidak berhak untuk diangkat menjadi raja

To-marilalang adalah juga Arung Ujung atau lazim disebut dengan *To-marilalang Malolo*, yang mengepalai seluruh *palili* atau raja-raja kecil. Semua perintah raja disampaikan kepada *palili* lewat *To-marilalang Malolo*.

Penghasilan *To-marilalang* bersumber pada hasil sejumlah besar lahan sawah yang harus dikerjakan dan dipanen oleh penduduk. Juga melalui denda yang dibebankan, dan biaya peradilan dalam kasus pidana dan perdata. Denda itu bisa berupa uang, emas, senjata, benda atau kerbau menurut hukum adat Bone (*Rappang Bone*), dan juga penyerahan wajib dari hasil hutan dan tanaman.

c. Anggota-anggota *Hadat*

Ade' PituE Kerajaan Bone yang pada bab terdahulu telah dijelaskan beranggotakan tujuh orang, yaitu:

- 1) Arung Macege
- 2) Arung Ponceng
- 3) Arung Tobojong
- 4) Arung Tanete Riattang
- 5) Arung Tanete Riawang
- 6) Arung Ta'
- 7) Arung Ujung (Mattulada, 1995).

Jabatan *Ade' PituE* ini merupakan jabatan turun temurun yang diwariskan dari lini perempuan ataupun lini laki-laki, dan biasanya jabatan ini diturunkan dari ayah ke putra-putrinya. Dalam menjaankan tugasnya, baik *To-marilalang* maupun anggota *Ade' PituE* membawahi beberapa bidang pekerjaan demi untuk kepentingan raja dan rakyat. Mereka juga membawahi beberapoa sektor, kecuali yang berhubungan dengan perdagangan, perhubungan laut, bea cukai, keagamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Anggota *Ade' PituE* adalah juga anggota

pengadilan negeri. Mereka ini masing-masing memiliki seorang pembantu yang disebut *sulewatang* yang juga memiliki pembantu yang disebut *mado*. Tugas mereka adalah sebagai pengganti apabila yang bersangkutan berhalangan untuk menghadiri undangan atau persidangan.

Pendatangan atau pemasukan keuangan anggota *Ade' PituE* diperoleh dari sebagian denda dalam kasus pidana, hasil sejumlah *lokah* ikan yang dijual oleh sejumlah penduduk bagi mereka, dan upeti yang biasanya diantar langsung oleh penduduk.

d. *Jemma Tongeng*

Jemma Tongeng merupakan pimpinan dari *Suro PatappuloE* (kurir yang berjumlah 40 orang), yang bertugas menyampaikan berita untuk amanat kepada pihak-pihak tertentu yang disampaikan oleh raja maupun pejabat-pejabat kerajaan. Oleh karena tugasnya itu, seorang *Jemma Tongeng* dianggap mengetahui banyak perihal perintah raja atau majelis, karena itu ia harus hadir dalam setiap majelis untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Ia juga berkewajiban untuk memastikan bahwa mereka yang telah diundang dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

e. *Anrong guru Anak Karaeng*

Anrong guru Anak Karaeng ini bertugas mendidik putra-putri raja. Ia bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan.

f. *Tomalompona Towangke*

Tomalompona Towangke mengepalai seluruh *Towangke*, mereka ini merupakan pasukan pengawal istana, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.

g. *Anrong Guru Pukalawing Epu*

Anrong Guru Pukalawing Epu mengepalai dayang-dayang yang bertugas melayani raja baik di istana maupun dalam perjalanan. Dayang-dayang ini diambil dari kampung-kampung, jumlah mereka sebanyak empat orang.

h. *Suro (suro seppuloEdua)*

Pesuruh atau utusan yang berjumlah 12 orang dan bertugas mengantarkan surat-surat dan perintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah mereka sebenarnya sebanyak 40 orang, tetapi jarang hadir dalam jumlah yang lengkap. Tugas mereka sama seperti halnya *suro-suro* lainnya. Terdapat juga *suro* atau pesuruh untuk mengambil sesuatu di daerah-daerah *palili*. Pada dasarnya semua *suro* merupakan penghubungan yang menangani komunikasi antara pusat pemerintahan dan daerah atau sebaliknya antara raja dengan pejabat-pejabat kerajaan.

i. *Parennung*

Parennung bertugas menyampaikan pesan-pesan raja secara lisan kepada pangeran-pangeran. Mereka ini berada dibawah pimpinan kepala pemerintahan.

j. *Juru Bahasa*

Juru bahasa di Kerajaan Bone terdiri atas dua orang penerjemah ke bahasa Melayu.

k. *Juru Tulis*

Juru tulis Kerajaan Bone ada dua orang, seorang bertugas untuk juru tulis surat-surat resmi, seorang lagi khusus juru tulis pribadi raja yang dutunjuk kepada anggota keluarga atau sahabatnya.

Selain itu untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang terletak jauh dari pusat kerajaan, terdapat beberapa jabatan dengan fungsi masing-masing. Struktur pemerintahan di daerah-daerah itu sangat berkaitan dengan keluasan daerah dan adanya hubungan yang erat dengan *Watampone* (pusat kerajaan). Jabatan-jabatan yang ada di wilayah tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Misalnya saja pada wilayah Lanca. Wilayah Lanca terbagi atas dua bagian yaitu, Lanca ri Lau dan Lanca ri Aja. Struktur kekuasaan yang ada di wilayah ini terdiri atas:

- 1) Arung:
 - a. Arung Lanca ri Lau
 - b. Arung lanca ri Aja
- 2) Madanrang
- 3) Pabbicara:
 - a. Pabbicara LappaE
 - b. Pabbicara KassiE

Lain halnya dengan wilayah Ulu, Struktur kekuasaan yang ada di di derah ini terdiri atas:

- 1) Arung Ulu
- 2) Salampe
- 3) Mandarang
- 4) Sulewatang Ulu
- 5) Pabbicara Ulu
- 6) Mado Pongka

Demikianlah struktur pemerintahan pra-Islam sebagaimana telah dipaparkan di atas. Untuk melihat struktur pemerintahan setelah Islam, maka pembahasan selanjutnya dikemukakan tentang pengaruh Islam dalam struktur Kerajaan Bone.

3. Pengaruh Islam dalam Struktur Kerajaan

Setelah Islam diterima sebagai agama dalam Kerajaan Bone, maka Islam pun menjadi agama resmi kerajaan. Dalam struktur pemerintahan tidak dilakukan perombakan, melainkan dilengkapi dengan memasukkan pranata atau lembaga Islam ke dalam struktur pemerintahan. Raja-raja mempergunakan nama-nama Islam dengan membubuhkan gelar-gelar Sultan didepan namanya. Setiap sholat jumat dalam khotbah didoakan keselamatan raja dan kerajaan oleh khatib (Mattulada, 1995: 385).

Pada masa pemerintahan La Tenri Pale, benih Islam telah tumbuh sedikit demi sedikit di tanah Bone, dan Islam telah merata dikalangan masyarakat, La maddaremmeng yang menduduki tahta kerajaan sebagai Raja Bone ke 13 yang menggantikan pamannya La Tenri Pale, raja ini berusaha mengangkat kedudukan Islam dengan jalan mengembangkan struktur pemerintahan Kerajaan Bone. Maka struktur pemerintahan ditambah lembaga yang disebut *parewa sara'* (pejabat syariat), yang berkedudukan dalam Kerajaan Bone sama dengan *parewa ade'* (pejabat adat). Penunjukan *parewa sara'* dipimpin oleh seorang *kalie (kadhi)*, yaitu pejabat tertinggi di bidang hukum syariat Islam dan berkedudukan di pusat kerajaan. Ditingkat *palili'* diangkat pejabat bawahan yang disebut dengan *imam* serta dibantu oleh seorang *katte (khatib)* dan seorang *bilala* (bilal). Dalam perkembangannya lembaga *parewa sara'* mengikuti lembaga pejabat adat, mulai dari tingkat kerajaan sampai tingkat kampung.

Dengan dipadukannya *sara'* dengan adat dalam struktur Kerajaan Bone, agak wajarlah jika dalam kerajaan Bone terdapat ahli mengenai agama, di samping terdapat ahli dalam urusan pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Bone, *kalie* adalah kepala segala

pejabat *sara'* dan juga kepala peradilan agama tertinggi serta kedudukannya merupakan salah satu kelengkapan kerajaan. Bahkan Raja Bone (Mangkau) meminta fatwa kepada Kadhi khususnya menyangkut hukum Islam, meskipun demikian raja adalah penghulu agama tertinggi dalam kerajaan. Kedudukan ini menjamin kekuasaan di tangan raja dalam bidang keagamaan.

Begitu pentingnya lembaga *sara* dalam struktur pemerintahan kerajaan Bone, maka dalam setiap musyawarah besar dewan adat, kedudukan pejabat *sara'* disamakan dengan pejabat adat. Hal ini terbukti dari komposisi tempat duduk, pada bagian sebelah kanan raja duduk berdampingan pejabat-pejabat *sara* dan pada sisi sebelah kiri duduk pejabat-pejabat adat secara berdampingan pula berhadap-hadapan dengan pajabat *sara*, sedangkan *arung matowa* duduk di tengah berdampingan pula dengan *kali*, sehingga membentuk segi empat. Dalam musyawarah besar dewan adat tersebut, posisi *kali* merupakan penasehat dan penentu kebijaksanaan yang menyangkut hal-hal keagamaan dalam sistem sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan tentang komposisi para pejabat kerajaan setelah dipengaruhi oleh unsur Islam sebagai berikut:

1. *Arumpone* atau *mangkau*, bersama seorang *pakkada* yaitu *Makkedangnge tanah* yang berkedudukan sebagai raja muda atau mangkubumi, yang menempati pusat kekuasaan yang lebih banyak bersifat pertikuler, raja yang lemah melahirkan tokoh-tokoh seperti *petta makkedangnge tanah*, *tomarilaleng* dan anggota *ade pitu* lainnya.
2. *Ade pitu* dibawah koordinasi *To Marilaleng* adalah dewan menteri tanah Bone yang menjalankan pemerintahan sehari-hari tampilnya tokoh-tokoh

unggul antara rakyat dari dalam dewan ini sangat bergantung pada bagaimana kemauan raja yang sedang bertahta. Disamping *To Marilaleng* diadakan pula jabatan *To Marilaleng Lolo*, yang bertugas mengawasi daerah-daerah yang diperintah oleh para *Arung Palili* sebagai penguasa daerah.

3. *Ponggawa* ialah panglima angkatan perang kerajaan yang bertugas menyusun kekuatan pertahanan Negara, dibawah kekuasaan raja. Di bawah pimpinan *pongawa* yang lazim disebut *petta poggawaE* yang terdapat tiga panglima bawahan yang disebut *dulung*, yaitu:
 - a. *Dulung Awang Tangka* yaitu panglima yang berkuasa atau yang menguasai daerah perairan.
 - b. *Dulung Ajang Ale* yaitu panglima yang menguasai daratan.
 - c. *Dulung Lamuru* yaitu panglima yang mengawasi daerah perbatasan.

Dibawah *dulung-dulung* ini terdapatlah *pangulu jowai* atau *anre guru jowa* sebagai pemimpin-pemimpin pasukan atau laskar.

4. *Khadi (kali)* biasa disebut *petta kalie* adalah penghulu agama Islam yang menjalankan aspek *panggadereng* yang disebut *syara'* yaitu pelaksana Islam dalam kehidupan negara (Amir Sessu, 1986: 76-78).

Selain pembahasan tersebut di atas juga dapat dilihat melalui ungkapan dari Lontara Bone tentang jabatan pemerintahan Kerajaan Bone, sebagai berikut:

- a. Menurut Mattulada (1985: 428-429): orang Bugis khususnya Bone menyebut rajanya dengan *Petta Mangkaue ri Bone* (Tuanku yang berdaulat di Bone)

dibantu oleh suatu dewan pemerintahan yang disebut Ade' Pitu yang diketuai oleh Petta Tomarilaleng, Arung Pitu mempunyai tugas masing-masing yaitu Arung Macege bertugas dalam urusan pembangunan dan pekerjaan umum, Arung Tanete Riawang bertugas dalam urusan keuangan dan ekonomi, arung Ta bertugas dalam urusan pendidikan dan pengajaran.

- b. Menurut Abdul Rahman, pejabat Sara, disebut Parewa Sara, diberi kedudukan dalam kerajaan dengan tugas dibidang keagamaan. Parewa Sara dipimpin oleh seorang Khadi yaitu pejabat yang tertinggi di bidang keagamaan atau hukum syariat Islam yang berkedudukan dipusat kerajaan, tiap Palili diangkat pejabat bawahan yang disebut dengan Imam yang dibantu oleh seorang khatib dan seorang Bilal.
- c. Menurut Andi Mappasissi bahwa, raja sebagai penguasa dalam kerajaan Bone yang dibantu oleh Tomarilaleng yang bertugas membantu raja dalam urusan-urusan pemeritahan kedalam termasuk urusan pemerintahan Istana dan Makadeng Tanah yang bertugas sebagai pembantu Raja dalam mengatur urusan-urusan pemerintahan keluar termasuk hubungan dengan kerajaan lain, Tomarilaleng dan Makadeng Tanah dibantu oleh Matowa (matowa Pitu) dalam pengembangan system pemeritahan Bone selanjutnya Matowa Pitu berubah menjadi Ade' Pitu atau Arung Pitu To Marilaleng.

Dari keterangan Lontara Bone tersebut di atas tentang jabatan pemerintahan Kerajaan Bone ditarik kesimpulan bahwa stuktur pemerintahan Kerajaan Bone, yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi terletak ditangan raja disebut Makadeng tanah (sebagai menteri Luar Nageri) kemudian membawahi Tomarilaleng Lolo bertugas

mengawasi daerah bawahan yang disebut Arung Palili atau Sullewatang, panglima perang disebut Ponggawa yaitu suatu jabatan baru mengenai bidang pertahanan kerajaan, dibawahnya terdapat jabatan pasukan yang disebut Petta KaliE, khadi ditingkat Kecamatan terdapat imam dan guru kampong ditingkat Desa masing-masing mengurus wilayahnya dibantu oleh seorang Khatib dan Bilal yang bertugas pada tempat ibadah seperti Masjid atau Mushallah.

B. Pranata Islam dalam Panggadereng

1. Kearifan Budaya dalam Penyebaran Agama Islam

Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi (proses bercampurnya dua (lebih) kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi), yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Budha hilang.

Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut, tidak hanya bersifat kebendaan/material tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Dan proses akulturasi tersebut, pada saat yang sama, juga merupakan bentuk penyebaran agama Islam di Nusantara.

Pada proses selanjutnya, penyebaran agama Islam di Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Candi dan petirtaan tidak dibangun lagi, tetapi kemudian muncul

masjid, surau, dan makam. Sistem kasta di dalam masyarakat dihapus, arca dewa-dewa serta bentuk-bentuk zoomorphic tidak lagi dibuat. Para seniman ukir kemudian menekuni pembuatan kaligrafi, mengembangkan ragam hias flora dan geometris, serta melahirkan ragam hias. Kota-kota mempunyai komponen dan tata ruang baru. Bahkan pada abad XVII M Sultan Agung memunculkan kalender Jawa, yang pada dasarnya merupakan "perkawinan" antara kalender Çaka dan Hijriyah. Akan tetapi pada sisi lain budaya tidak dapat dikotak kotakkan sehingga terjadi pula kesinambungan-kesinambungan yang inovatif sifatnya. Masjid dan cungkub makam mengambil bentuk atap tumpang, seperti Masjid Agung Demak, yang bentuk dasarnya sudah dikenal pada masa sebelumnya sebagaimana tampak pada beberapa relief candi

Demikian pula menara masjid tempat muazin menyerukan azan, seperti menara di Masjid Menara di Kudus. Bentuk dasarnya tidak jauh berbeda dari candi gaya Jawa Timur yang langsing dan tinggi, tetapi detailnya berbeda. Bagian kepalanya berupa bangunan terbuka, relung-relungnya dangkal karena tidak berisi arca, dan hiasan relief diganti dengan tempelan piring porselin.

Bangunan makam Islam merupakan hal baru di Indonesia kala itu, karenanya tercipta nisan, jirat, dan juga cungkub, dalam berbagai bentuk karya seni. Nisan makam-makam tertua di Jawa, seperti makam Fatimah bin Maimun dan makam Malik Ibrahim, Menurut penelitian, benda tersebut merupakan benda yang

diimpor dalam bentuk jadi, sebagaimana tampak dari gaya tulisan Arab pada prasastinya dan jenis ornamentasi yang digunakan. Namun, nisan makam-makam berikutnya dibuat di Indonesia oleh seniman-seniman setempat. Hal ini antara lain tampak dari ragam hias yang digunakan, misalnya lengkung kurawal, patra, dsb. Bahkan di pemakaman raja-raja Binamu di Jeneponto (Sulawesi Selatan) di atas jirat ada patung orang yang dimakamkan. Ini adalah suatu hal yang tidak pernah terjadi ditempat lain.

Pada tata kota, terutama kota kerajaan di Jawa, juga dapat dilihat adanya perubahan dan kesinambungan. Di pusat kota tersebut ada alun-alun, kraton, masjid agung, dan pasar yang ditata menurut pola tertentu. Di sekelilingnya terdapat bangunan-bangunan lain, serta permukiman penduduk yang juga diatur berkelompok-kelompok sesuai dengan jenis pekerjaan, asal dan status sosial. Cara penyebaran Islam yang lain adalah melalui seni, misalnya seni sastra, seni pertunjukan, seni musik, seni pahat, dan seni bangunan. Seni sebagai media dakwah, dan melalui seni pertunjukan, misalnya wayang yang digemari masyarakat Jawa, ajaran agama Islam dapat disampaikan dengan cara disisipkan dalam lakon-lakon yang masih didasarkan pada ceritera-ceritera Jawa Kuno. Selain itu, para pujangga waktu itu juga mengubah ceritera baru untuk dipergelarkan.

Demikian pula lirik dalam tembang untuk mengiringi pertunjukan tersebut, juga dipakai untuk mengungkapkan ajaran agama yang baru. Seni bangunan juga dipakai sebagai sarana untuk

penyebaran agama Islam di Nusantara. Salah satu contohnya adalah gaya arsitektur yang dipilih dalam membangun mesjid. Sebagaimana diketahui gaya arsitektur mesjid kuno yang disebut gaya Nusantara dikembangkan dari arsitektur yang sudah dikenal sebelumnya, namun disesuaikan dengan kebutuhan peribadatan agama Islam. Dengan demikian para Muslim baru tidak merasa gamang datang ke tempat peribadatan baru (mesjid) yang bentuk dan suasananya sudah akrab bagi mereka. Hal ini menandakan bahwa, dalam proses pertemuan antara Islam dan budaya lokal, para penyebar Islam memanfaatkan pranata lokal sebagai infrastruktur bagi pertumbuhan tradisi Islam, dan Islam juga mengakomodasi budaya-budaya lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip mendasar agama Islam. Hal ini pulalah membuat Islam di Nusantara mudah diterima. Dalam penyebarannya, Islam menghadapi sistem nilai yang beragam. Namun proses akomodasi kultural Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktek sosial yang bersifat lokal. Islam tidak hanya mempertimbangkan tradisi tersebut, tetapi juga telah melakukan perubahan-perubahan.dengan memberikan nilai-nilai keislaman di dalamnya.

Dalam proses akomodasi kultural tersebut, dapat dilihat pada kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan tradisi dan adat lokal serta pada kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai pokok keislaman. Dalam proses tersebut tampak bahwa Islam tidak hanya melakukan domestikasi terhadap dirinya,

dengan mengkompromikan kerangka universalnya, sehingga lebur dalam tradisi lokal yang dapat disesuaikan ke dalam keharusan nilai Islam yang prinsipil. Proses akomodasi Islam berlangsung secara berbeda-beda di tempat yang berbeda pula dan ditentukan oleh cara pendekatan para penyiar Islam dalam memperkenalkan agama ini, bagaimana mereka memahami tradisi lokal agar strategi islamisasi yang bersifat asimilatif dapat terlaksana. Strategi para wali di Jawa dan guru sufi pengembara dalam mengadopsi berbagai tradisi lokal, seperti wayang dan gamelan dapat dilihat sebagai salah satu contoh klasik dalam proses penyebaran Islam. Interaksi antara unsur Hindu dan Islam telah memunculkan semacam sinkretisme.

Ajaran Islam diterima dengan baik di berbagai tempat, terutama karena proses islamisasi yang bersifat asimilatif. Pemanfaatan unsur-unsur budaya lokal telah memungkinkan agama Islam diterima oleh penduduk. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses islamisasi terjadi dalam empat aspek dan proses antara lain:

- a. Proses pemasyarakatan warisan budaya istana yang dinilai halus dan adil, seperti seni pewayangan dan musik gamelan.
- b. Kitab-kitab pesantren seperti naskah berbahasa Melayu, bertulisan Jawa Pegon, atau naskah berbahasa Arab menjadi sumber dalam proses kreatif para pujangga dan sastrawan Jawa.
- c. Proses pencarian titik temu dua tradisi seperti yang tampak dari upaya Sultan Agung dalam menyatukan perhitungan tahun Saka masyarakat kejawen dengan tahun Hijriah yang berlaku dalam tradisi pesantren.

- d. Keterlibatan istana dalam syiar Islam yang tampak dari pembangunan berbagai fasilitas keagamaan seperti masjid, dan penyelenggaraan hari besar Islam.

2. Pranata Islam dalam Panggadereng

Panggadereng sebagai sistem budaya dan sistem sosial orang Bone, dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah yang meliputi cara-cara seseorang dalam bertingkaahlaku terhadap sesama manusia yang mengakibatkan adanya dinamika dalam kehidupan masyarakat (Rasdiyanah, 1995: 137). Mattulada menjelaskan bahwa *panggadereng* adalah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata-tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah-laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan materiil dan non materiil (Mattulada, 1985: 339).

Sebelum Islam diterima sebagai agama, sistem *panggadereng* (Bugis) atau *pangngadakang* adalah wujud kebudayaan orang Bugis Makassar, terdiri dari empat unsur pokok yang terintegrasi dalam membangun kehidupan moral manusia, yaitu *ade*, *rapang*, *wari* dan *bicara*. Setelah Islam diterima sebagai sistem kepercayaan masyarakat di Kerajaan Bone, maka *panggadereng* yang memiliki empat unsur itu, diperkaya oleh ajaran Islam sehingga unsur tersebut menjadi lima, karena diterimanya *sara'*, yaitu syariat Islam ke dalam kehidupan masyarakat, di dalam *Lontara Latoa* disebutkan:

*Makkâdatopi to-riolo êppa'nuu uangênna padecengie tana,
iami nagênna limanpuangêng narapi mani asêllengên na*

ripattama'tona sara'e, seuani adê'e maduanna rapenge, matêlunna wari'e, maêppa'na bicarae, malimanna sara'e.... (Mattulada, 1985: 114).

Artinya:

Berkata pula To-Riolo, hanya empat macam hal yang memperbaiki negara dan barulah dicukupkan lima ketika syareat Islam diterima. Pertama *adê*, kedua *rapang*, ketiga *wari*, keempat *bicara* dan kelima *sarak*).

Dengan demikian unsur *pangngadereng* yang telah ada sebelum penyebaran Islam tetap berlanjut setelah agama Islam diterima sebagai agama resmi Kerajaan Bone. Islam hanya memperkaya dengan menambah satu unsur yang disebut dengan *sara*. Kelima unsur pokok tersebut mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terintegrasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana disebutkan di dalam *Lontara Latoa*, sebagai berikut:

... nakko de'ni sara'e, mangkau 'bawammamanênni taue, nakko de'ni bicarae, marusa'ni asseajingênna tana masseajinnge, iana matti mancaji gaga', naia gaga'e nacappari', na ia-iannani tau llesangiwi rapannge, iana ri papoleang ri Allah Taala, bali-pasau', nakko tênriolani bicarae, si anre-balenı taue, apa'tênripatau'ni gau mawatanngę, makkuniro naelorenngi to-rioloe ri peassêri adê'e, na-ritau-tui rapanngę, nariassiturusi ttaroi magêttêng bicarae, bara' kuammenngi narirêbba to-mawatanngę, naripeuatangi tomadodonngę (Mattulada, 1985: 116).

Artinya:

... Dan bila *sara* tak ada lagi, berbuat sewenang-wenanglah semua orang, bila *bicara* tiada lagi,

rusaklah hubungan kekeluargaan negara-negara yang sekeluarga. Itulah nanti yang menjadi sumber pertikaian, dan adapun pertikaian itu, berujung pada perang, dan barang siapa yang mengingkari *rapang* akan didatangkan baginya lawan yang kuat oleh Allah Taala. Bila *bicara* tak dijalani lagi, saling membinasakanlah orang, karena tidak ditakutinya lagi perbuatan yang bersumber dari kekuatan. Begitulah maka dikehendaki oleh To-Riolo agar *ade* diperteguh, *rapang* dipelihara dengan cermat, dan bersama-sama menegaskan kepastian *bicara*, agar dirobokkanlah perlidungan terhadap yang lemah..

Dengan dijadikannya *sara* sebagai sub-sistem yang integral dari *pangngadereng*, saling berkaitan antara sub-sistem satu dan lainnya, sebagai pranata-pranata baru dalam kehidupan sosial budaya di Kerajaan Bone, karena *sara'* memberikan peranannya dalam berbagai kehidupan sosial budaya, ketaatan orang-orang Bugis kepada *sara* sama dengan ketaatan mereka kepada sub-sistem *pangngadereng* lainnya (Rasdiyanah, 1995: 138). Oleh karena itu, maka adalah agak janggal untuk mengatakan bahwa orang Bugis-Bone dalam kehidupan sosial budayanya mengutamakan (secara kualitatif) *ade* dan menomorduakan (secara kualitatif) *sara*, karena keduanya sudah padu sebagai satu sistem dalam *pangngadereng*. Keadaan seperti itu terjadi karena penerimaan Islam di kerajaan Bone tidak terlalu banyak merombak nilai-nilai, kaidah-kaidah kemasyarakatan yang telah ada. Apa yang dibawa Islam pada awal datangnya, hanyalah urusan-urusan *ubudiyjah*, dan tidak merobah pranata-pranata masyarakat yang ada, utamanya pranata-pranata sosial yang menyangkut kehidupan politik, sesuai dengan *pangngadereng*. Semangat keagamaan di Kerajaan Bone tepat mengenai sasaran, karena sasaran utama dari

para penyebar Islam (pada permulaan datangnya) hanya tertuju kepada pendalaman iman dan kebenaran Tauhid. Sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai kesusilaan yang bertujuan menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia menurut fitrah ajaran Islam, memperoleh bentuknya dalam konsep *siri*, yang disesuaikan dengan nilai terdalam dari kemanusiaan menurut Islam, yaitu rahasia kejadian tau *sirrun* atau *sirr* yang berarti terdalam (Mattulada, 1985: 382-383).

Karena adanya kesesuaian, maka *sara* dapat diterima dalam *pangngadereng*. Melalui pranata *sara*, beberapa perubahan telah terjadi berlangsunglah proses penerimaan Islam yang lambat laun memberi warna lebih tegas kepada *pangngadereng* seluruhnya, sehingga bagi orang Bugis (Bone) Islam itu identik dengan kebudayaan Bugis dengan segala aspek-aspeknya. Sangat janggal bagi sebagian besar orang Bugis apabila dikatakan bahwa ada orang Bugis yang bukan Islam, karena hal ini menyalahi *pangngadereng* dan karena *pangngadereng* memberi identitas kepada orang Bugis.

Untuk mengetahui bagaimana *sara* itu yang sudah menjadi satu aspek dalam *pangngadereng* seluruhnya dan melakukan peranan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat dan kebudayaan Bugis maka terdapat dua macam *sara* dalam lingkungan *ade* dan *sara* sebagai pranata dalam *pangngadereng*. *Sara* sebagai organisasi *ade* (pemerintahan) berkembang dalam kedudukan arti dan fungsinya. Semua orang yang menyelenggarakan urusan syariat Islam disebut dengan *parewa sara* (pegawai syariat). Setelah *sara* diterima sebagai bahagian *pangngadereng*, terjadilah pembagian tugas antara *ade* atau *pampawa ade* (pemerintah) dengan *parewa sara* yang biasanya disingkat dengan sebutan *sara*. *Saralah* yang bertanggung jawab dalam soal ibadah, pegurusan zakat,

pengurusan masjid, pernikahan, warisan dan sebagainya yang berkaitan dengan ibadah. (Mattulada, 1985: 384).

Dalam struktur Kerajaan Bone, *sara* disusun mengikuti organisasi *ade*. Misalnya dalam kerajaan terdapat *kali* sebagai pejabat *sara* tertinggi dalam kerajaan. Pejabat-pejabat *sara*, terutama *kali*, adalah orang terkemuka dalam kerajaan Bone. Ia berasal dari kalangan *anakarung* yang mempunyai pengetahuan tentang Islam lebih rata-rata orang dalam kerajaan. Itulah sebabnya maka *kali* itu mempunyai wibawa yang besar di samping raja.

Sara adalah unsur *pangngadereng* yang terakhir diterima dalam kesatuan sistem *pangngadereng*. *Ade* dan *sara* selanjunya berkembang dengan serasi dalam kehidupan Kerajaan Bone. hal ini dimungkinkan karena dalam sejarah pengislaman di Sulawesi Selatan, para rajalah yang mula-mula memeluk agama Islam baru kemudian diikuti oleh para pembesar kerajaan dan akhirnya oleh rakyat. Kesatuan sikap antara *ade* dengan *sara* lebih nyata terutama apabila dilihat dari sudut pranata-pranata *pangngadereng* artinya semata-mata melihatnya dari sudut organisasi politik (Mattulada, 1985: 382-383).

Berkenaan dengan itu, Mattulada mengemukakan bahwa segala sesuatu yang menjadi atribut *pangngadereng*, masih tetap berlangsung terus, di samping berkembangnya pula tata-cara ibadah menurut agama Islam. Beberapa bagian tertentu daripada atribut *pangngadereng*, bersumber dari kepercayaan pra-Islam, di mana agama dan kebudayaan adalah kesatuan yang menjadi latar belakang kenyataan sosial, seperti pemujaan atau pemberian korban kepada *attau-riolong*, *saukang* dan sebagainya. Juga kebanyakan upacara-upacara kerajaan atau upacara turun ke sawah dan panen mengingatkan kehidupan zaman pra-Islam yang memuja para dewa atau roh nenek moyang. Akan tetapi pada awal penyebaran Islam hal-hal seperti itu

tidak ditentang. Karena pada umumnya hal ihwal yang menyangkut *pangngadereng*, tetap hidup berdampingan dengan damai dengan perilaku yang dibawa oleh Islam, sebagai dua aspek kebudayaan yang saling melengkapi dalam organisasi Kerajaan Bone.

Dari sudut kepercayaan, di sini seolah-olah telah terjadi kepercayaan yang campur-aduk, kepercayaan sinkretis. Tapi bila di lihat dari segi lain, yaitu terutama dari sudut ilmu kebudayaan maka cara dakwah para penyebar agama Islam di Kerajaan Bone ketika itu cukup tepat, karena pendekatan melalui pemahaman atas struktur sosial dan dari adaptasi kultural dapat dengan mudah mencapai sasaran penyebaran agama Islam. Dapat dikatakan bahwa hal itu secara metodologis tepat sekali, karena apa yang dicapai dalam adaptasi kultural, yakni membangkitkan emosi persekutuan yang dibangun dalam *pangngadereng*, membuat orang Bugis merasakan kesatuan dalam identitasnya dengan Islam.

Kelima unsur dari *pangngadereng* itu menjadi pedoman dalam bertingkah-laku dalam keseharian, seperti kehidupan rumah tangga, dalam mencari nafkah, dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam tentang akhlak dalam seluruh sistem *pangngadereng* (Rasdiyanah, 1995: 139), terpantul pada aspek-aspek yang empat macam yaitu: *adek*, *rapang*, *warik* dan *bicara*, yang setelah masuknya Islam di Kerajaan Bone maka *sara* dimasukkan ke dalam sistem *pangngadereng*.

Dapat dikatakan, bahwa lewat konsep *pangngadereng* ini menumbuhkan suatu wahana kebudayaan yang tak ternilai bukan hanya bagi masyarakat Bugis di berbagai pelosok nusantara, sekaligus membedakannya dengan suku-suku lain yang mendiami nusantara ini.

2. Islam dalam Kehidupan Sosial

Dalam sub ini akan dibahas mengenai kehidupan sosial budaya. Melalui latar belakang kehidupan sosial suatu masyarakat dapat diketahui melalui struktur sosialnya. Masyarakat Bone mengenal tiga macam tingkatan sosial, yaitu:

- a. Arung/Puang (bangsawan)
- b. Tomaradeka (orang merdeka/orang biasa)
- c. Ata (hamba) (Hamzah, 1984: 93-94).

Dari ketiga lapisan masyarakat tersebut masih terbagi-bagi menjadi beberapa poin, Anakarung atau Arung/Puang (bangsawan) dibagi menjadi:

1. Anakarung Matowa (anak bangsawan penuh)
 - a. Anakarung Masalla (putra putri mahkota)
 - b. Anakarung Matase (putra putrid raja)
2. Anakarung Riolo (bangsawan Istana)
 - a. Anakarung sipue (bangsawan separuh)
 - b. Anakarung Cerak (bangsawan berdarah campuran)

Sedangkan Tomaradeka (orang merdeka) dibagi menjadi:

- a. To Deceng (keluarga orang baik-baik)
- b. To Sama (orang kebanyakan)

Demikian pula halnya dengan Ata dibagi menjadi:

- a. Ata Mana (sahaya warisan)
- b. Ata Mabuang (sahaya baru).

Dalam masyarakat adat lama kedudukan seseorang ditentukan oleh stratifikasi atau status sosialnya dalam masyarakat seperti keturunan atau keluarga raja statusnya lebih tinggi dari pada status yang bukan raja, keturunan bangsawan dan seterusnya.

Pada waktu Islam menjadi agama resmi di Kerajaan Bone, beberapa perubahan telah terjadi dalam tingkatan sosial secara berangsur-angsur. Perubahan ini semakin kentara pada waktu *sara'* (hukum Islam) menduduki tempat penting dalam masyarakat. Penghapusan *ata* (sahaya) yang prosesnya dimulai oleh Raja Bone Ke 13, La Maddaremmang Sultan Muhaammad Saleh (Rahim, 2011: 158).

Kabupaten Bone sebagai salah satu wilayah yang berada pada saat sekarang ini masih mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan sosial masyarakat atas dibagi menjadi dua tingkatan yaitu:

- a. Bangswan (puang/andi)
- b. Non bangsawan (orang biasa).

Hal tersebut dapat kita lihat dari stratifikasi sosial salah satu dari tingkatan sosial sudah tidak ada lagi yaitu tingkat ketiga yang disebut "Ata" (hamba). Ini dikarenakan pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi kerajaan khususnya di kerajaan Bone, walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih berpegang teguh pada status sosial di atas.

Lapisan bangsawan, adalah lapisan tingkatan yang teratas, sedangkan bangsawan adalah lapisan menengah atau bawah. Dan yang termasuk lapisan bangwasawan adalah mereka yang berasal dari keturunan raja (Karaeng bila di Makassar) atau (Puang bila di Bugis) (Abdullah, 1985: 110).

Pada lapisan bangsawan yang pernah memegang jabatan dalam istana kerajaan dahulu dianggap oleh masyarakat lebih tinggi kedudukannya dari yang tidak pernah menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan kerajaan.

Lapisan non bangsawan dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Non bangsawan menengah atas
- b. Non bangsawan menengah
- c. Non bangsawan bawah.

Mereka yang tidak termasuk non bangsawan menengah atas, adalah para pemimpin atau yang duduk dipemerintahan formal, seperti camat, mereka itu bukan keturunan bangsawan namun anggapan masyarakat seperti layaknya orang bangsawan karena kedudukannya yang menentukan sebagai seorang camat, non bangsawan seperti halnya kepala desa, dan para pemimpin informal yaitu seorang pemimpin yang sudah diakui oleh masyarakat walaupun tidak mendapatkan kedudukan dalam suatu pemerintahan, seperti halnya pallontara (orang-orang tua yang dapat meramal musim). Apakah ini musim hujan, musim kemarau, musim angin barat dan musim angin timur dan lain-lain. Sedangkan kelompok non bangsawan bawah adalah mereka yang termasuk petani biasa yang tidak termasuk pada kedua kelompok di atas. Pada umumnya mereka itu termasuk petani penggarap dengan system pembagian hasil panen.

Perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sosial akan lebih mudah diketahui jika dilihat dari pelaksanaan upacara atau siklus hidup pada masyarakat Bone yang dilakukan untuk menandai perpindahan satu fase kehidupan dalam perjalanan hidup seorang individu, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian

Sebagaimana halnya dalam pranata politik, para muballigh Islam tidak melakukan perubahan secara keseluruhan dalam pranata sosial. Adat istiadat dalam upacara siklus hidup pra Islam masih tetap berlangsung, sementara para muballigh berusaha secara bertahap mengisi upacara kemasyarakatan dengan ajaran Islam. Hal ini

tampak pada setiap upacara siklus kehidupan, antara kebudayaan Islam dan adat Istiadat setempat terjadi suatu akulturasi, seperti dapat dilihat pada upacara-upacara, perkawinan, kelahiran dan kematian.

Jikalau kita perhatikan sistem kekerabatan, maka dapat dilihat pada struktur sosial yang ada pada masyarakat di kerajaan Bone, dan secara garis besarnya terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok bangsawan dan kelompok non bangsawan. Berdasarkan struktur sosial ini maka sistem kekerabatan merkapun mengikuti struktur tersebut, seperti juga pada masyarakat lainnya. Kelompok bangsawan sendiri ataupun pada kelompok yang paling bawah dengan kata lain mereka bebas menentukan jodohnya.

Apabila kelompok bangsawan mengambil istri atau memilih jodohnya pada golongan non bangsawan, maka anak dari hasil perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan dari bapaknya, sedangkan apabila mereka memilih jodohnya dikalangannya sendiri maka mereka mengikuti garis keturunan dari salah satu diantaranya dari ibu atau dari bapaknya.

Jika pada zaman dahulu perkawinan yang terjadi antara bangsawan dan non bangsawan jarang sekali terjadi karena menurut mereka perkawinan yang demikian itu adalah perkawinan yang tidak boleh terjadi, alasannya mereka itu menjaga kemurnian dari keturunan mereka sendiri, bahkan perkawinan yang sangat ideal adalah kawin sepupu sekali baik dari bapak maupun dari ibu.

Perkawinan dalam msyarakat Bone dari dahulu sampai sekarang telah banyak mengalami perubahan karena masyarakat sudah tidak terlalu berpegang pada adat yang lama disebabkan telah terjadi pembauran antara bangsawan dan non bangsawan maupun masyarakat pendatang sehingga mereka sudah saling memberi dan menerima anak gadisnya dalam perkawinan. Kalau pada zaman dahulu

perkawinan mereka itu bersifat asimetris (hanya dapat menerima gadis). Maka pada saat sekarang ini berubah menjadi simetris, yaitu sudah dapat memberi dan menerima anaknya dalam suatu perkawinan, lain halnya jika mereka dalam perantauan baik bangsawan maupun non bangsawan mereka mencari jodoh pada tempat yang lain kemudian melangsungkan perkawinannya.

Proses kelahiran seorang anak manusia dalam lingkungan kehidupan manusia Bugis umumnya dan Bone khususnya tidak jauh berbeda dengan tatacara tradisional yang ada pada beberapa kelompok suku bangsa di tanah Air Indonesia. Yaitu sejak seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya telah mulai diperlakukan menurut adat. Dengan memperlihatkan suatu tanda-tanda telah membuahkan bibit manusia dalam kandungannya, yang disebut *mangideng/ngidam* dalam fase ini Ibu tersebut telah mendapatkan perhatian khusus dari segenap anggota keluarganya, terutama dalam menyangkut keinginan yang tidak bisa ditolak. Tujuannya agar si calon bayi nantinya lahir dalam keadaan normal, baik fisik maupun mental. Selama mengandung dalam mengetahui perkembangan bayinya selalu didampingi oleh *sanro pammana/dukun beranak* dan anggota kerabat lainnya.

Kelahiran adalah saat yang membahagiakan dalam kehidupan sebab menandai kehadiran anggota baru dalam keluarga. Oleh karena itu kelahiran tersebut disambut dengan upacara atau ritual, seperti *mappariwa anak lolo/memangku bayi* selama satu minggu. Upacara ini diiringi dengan sesajen berupa songkolo dengan empat warna yaitu, hitam, putih, kuning dan merah. Simbol tersebut mengandung makna dan harapan agar sibayi kelak mencapai kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Bersamaan dengan hal tersebut diatas, dilaksanakan pula upacara, *aqiqah* yang berasal dari agama Islam, yaitu

pemotongan dua ekor kambing bagi bayi laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan. Dalam upacara *Aqiqah* dilaksanakan pemotongan rambut oleh salah satu *parewa sarak* tergantung pada tinggi - rendahnya status sosial si bayi dalam masyarakat. Jika sibayi berasal dari anak bangswang (*puang/andi*) , maka upacara pemotongan rambut langsung ditangani oleh *petta kalie* yang berkedudukan di pusat kerajaan.

Meskipun upacara *aqiqah* berasal dari ajaran Islam, tetapi dalam upacara tersebut ditemukan juga ritual-ritual pra Islam, misalnya alat yang dipakai untuk memotong rambut terlebih dahulu dibasahi air kelapa yang sudah disediakan sebelumnya. Kelapa adalah simbol merupakan pohon yang kokoh dan serbaguna, yang mempunyai makna agar sang bayi kelak menjadi manusia yang kokoh dan berguna, seperti kelapa.

Dalam ajaran Islam dianjurkan untuk memotong kambing bagi bayi yang baru lahir sedangkan menurut kepercayaan masyarakat Bone sebelumnya. Bahwa ketika seorang warga masyarakat melakukan pemotongan hewan dalam suatu upacara menganggap sebagai kendaraan kelak setelah meninggal dunia. Jadi berbeda dengan Islam, dalam masyarakat Bone pelaksanaan pemotongan tersebut bisa dilakukan kapan saja, dalam berbagai pelaksanaan upacara, baik pada waktu perkawinan, kelahiran maupun dalam kematian atau meninggal dunia. Akan tetapi walaupun ada perbedaan dalam waktu pelaksanaan pemotongan hewan tersebut, peristiwa itu tetap menjadi simbol ke Islaman atau kesinambungan tradisi.

Kematian adalah peralihan hidup manusia dari alam nyata ke alam gaib yang masih misterius. Banyak ritual yang dilakukan mengiringi kematian tersebut yang memiliki makna keselamatan pada mayat dan keluarga yang ditinggalkan. Kematian dalam masyarakat Bone adalah ritual

yang paling banyak diwarnai oleh ajaran Islam. Hal ini terjadi karena disebabkan ajaran Islam dianggap oleh masyarakat paling sempurna untuk menjawab segala persoalan misterius setelah meninggal. Tetapi tidak berarti, ritual kematian pra Islam sudah tidak dilaksanakan. Terkadang ritual pra Islam berjalan bersamaan dengan ritua yang berasal dari ajaran Islam.

Pada masa pra Islam, menurut kepercayaan masyarakat Bone bahwa seorang yang meninggal dunia mayatnya harus dijaga agar rohnya tidak mengganggu orang yang masih hidup, harus berjaga malam sebelum mayat tersebut di kebumikan. Kepercayaan ini menyebabkan keluarga dan masyarakat lainnya yang mempunyai sifat solidaritas juga ikut menjaga si mayat sambil bermain kartu untuk mengusir rasa kantuk. Setelah Islam mewarnai kepercayaan tersebut maka, pranata untuk berjaga malam diisi dengan pengajian Alquran. Selain itu juga sering diadakan Tahlilan yaitu dzikir yang biasanya diperingati pada hari keempat puluh dan hari keseratusnya setelah meninggal dunia.

Suatu kepercayaan juga yang dianut oleh masyarakat Bone pada pra Islam adalah penguburan se bagian harta benda yang berharga bersama dengan si mayat, penguburan tersebut dimaksudkan agar roh jahat tidak datang mengganggu kepada yang masih hidup. Setelah Islam kebiasaan tersebut tidak lagi dikuburkan melainkan disederhanakan oleh *parewa sara*, yaitu *petta lmang*, *andre guruta*, *katte* dan *doja*. Sebab merekalah yang menyelenggarakan jenazah, seperti memandikan, mengafani, menyembahyani dan menguburkan. Pemberian sedekah dari harta si mayat masih berlangsung sampai sekarang.

Uraian diatas menunjukkan bahwa upacara adat dan sarak bisa berjalan bersama-sama, Hal itu di latarbelakangi

oleh sifat akomodasi Islam yang diperlihatkan oleh Datuk ri Bandang yang tidak memaksakan ajaran Islam yang belum bisa diterima masyarakat, dengan menampilkan wajah Islam yang penuh toleransi kepada adat istiadat setempat.

Agama Islam diterima oleh rakyat kerajaan Bone berangsur-angsur mengalami perkembangan dalam menyebarkan agama Islam dan melaksanakan ajaran Islam dimana adanya kesatuan yang bersumber dari Alquran dan hadis nabi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima ajaran-ajaran tersebut. Dalam hal ini pedoman yang dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Agama merupakan unsur penting yang menentukan identitas suatu masyarakat. Oleh karena itu, diterimanya Islam sebagai agama resmi oleh kerajaan beserta seluruh masyarakat Bone merupakan peristiwa yang sangat penting. Dimana masyarakat kerajaan Bone sebelum menganut Islam mereka menganut kepercayaan yang disebut *Dewata Sewae* yang pada hakekatnya itulah Tuhan Yang Maha Esa, maka kepercayaan ini diintegrasikan kedalam Islam yang mempercayai adanya Tuhan itu hanya satu atau Esa. Hal inilah yang menyebabkan sehingga penerimaan Islam dikerajaan Bone cepat berkembang kepercayaan identik dengan kepercayaan agama Islam namun pelaksanaannya yang berbeda dengan kata lain penyembahannya.

Hanya saja realitas keislaman masyarakat Bone sebenarnya jauh lebih kompleks dari gambaran tersebut. Disatu sisi, agama Islam memang telah menjadi bagian dan hadir dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan sosial masyarakat Bone. Hal ini dapat dilihat pada praktik peribadatan mereka, nama-nama muslim yang mereka sandang, hadirnya berbagai macam kegiatan sosial Islam dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan sebagainya.

“Antara singkretisme dan Islam ortodoks sejak awal proses Islamisasi tampaknya berbarengan dengan dua kecenderungan yang saling berlawanan, yakni kuatnya keinginan kalangan bangsawan tinggi untuk tetap mempertahankan singkretisme, dan kecendrungan kalangan pedagang dan pelaut untuk menerapkan ajaran Islam yang benar (ortodoks)” (Pelras 2005: 210). Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua bangsawan pasti cenderung ke arah singkretisme, buktinya bahwa Lamaddaremmeng Sepanjang cacatan sejarah pengislaman dan penyebaran Islam di Kerajaan Bone senantiasa mendapat pengawasan dari raja-raja sehingga hubungan antara adat dan pelaksanaan syareat Islam berjalan bersana-sama maka dijadikanlah Islam sebagai agama resmi kerajaan dalam hal ini rajanya yang dahulu masuk Islam kemudian pula rakyatnya yang menganut Islam dalam hal ini reaksi masyarakat dalam penerimaan Islam sangat cepat disebabkan karena rajalah yang berkuasa pada saat itu, maka segala sesuatu ditentukan oleh raja baik dalam hal pemerintahan maupun dalam hal kepercayaan atau adat istiadat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat Bone dalam menerima Islam sangat cepat dan tidak mendapat tantangan baik dari masyarakat maupun dari raja yang turut memberikan andil untuk menghindari konflik antara adat dan *sara*. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kedudukan dan posisi raja dalam penyebaran Islam, akan di fokuskan pada pembahasan selanjutnya.

C. Kedudukan dan Posisi Raja dalam Penyebaran Islam

Peranan raja pada awal penyebaran Islam di Kerajaan Bone dapat dilihat pada penerimaan dan penyebaran Islam yang diawali oleh raja. Penyebaran Islam yang berlangsung relatif singkat dan disebabkan karena

kedudukan raja merupakan figur sentral dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang mengenal pelapisan sosial yang tertutup, status seseorang menjadi sangat penting. Status sosial berpengaruh dalam menentukan tingkat kekuasaan dan kekayaan seseorang. Raja atau Mangkau dalam kerajaan Bone, menduduki puncak piramida dalam struktur sosial. Pensyaratan utama untuk menjabat sebagai raja atau mangkau adalah harus berasal dari keturunan bangsawan murni, yaitu keturunan langsung dari *Tomanurung*.

Seperti telah dikemukakan, *manurunge rimatajang* adalah seorang yang berasal dari kayangan (tempat dewata) yang turun ke bumi untuk memerintah di tanah kerajaan Bone. Kehadiran *Tomanurunge* dimaksudkan untuk bertindak sebagai juru selamat, menciptakan ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan ummat manusia. *Tomanurunge* dipercayai berasal dari Tuhan, karena itu perintah dan larangannya tidak boleh dilanggar. Pelanggaran berarti akan menimbulkan kekacauan. Konsepsi ini berkembang dan kemudian juga berpindah kepada turunannya. Semakin murni darah *Tomanurunge* seseorang, semakin banyak pula darah dewa yang mengalir dalam dirinya, dan itu berarti semakin sakti pula dalam memimpin rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan (Eringtong, 1977: 42). Tidak mengherankan, jika kemurnian darah bangsawan bagi masyarakat Bone menjadi sesuatu yang sangat primer, sebab *Mangkau* yang ideal adalah yang berdarah bangsawan murni. Untuk itu pergantian *Mangkau* dilakukan berdasarkan keturunan. Begitulah seterusnya tahta kerajaan Bone sejak *Manurunge* secara turung temurung sampai Raja Bone yang terakhir yaitu raja Bone yang ke 34 yang bernama Lamappanyukki Sultan Ibrahim *Matinroe* (mangkat) Ri Gowa memerintah pada tahun 1957-1960.

Raja Bone yang pertama memeluk Islam adalah La Tenriruwa bergelar Sultan Adam, akan tetapi raja ini tidak berpengaruh dalam penyebaran Islam di Bone sebagaimana di jelaskan pada bab yang lalu bahwa ia hanya tiga bulan menduduki takhta Kerajaan Bone (1611). Akan tetapi setelah beliau mengumumkan keislamannya ternyata dewan Ade' Pitu, para pembesar kerajaan dan juga rakyatnya menolak seruan beliau untuk menerima Islam. Sebagai seorang raja, penolakan terhadap seruannya itu adalah cerminan dari kesetiaan rakyatnya yang mulai memudar. Atas penolakan ini beliau di ma'zulkan oleh dewan *ade pitu*, lalu Raja Bone dan permaisurinya dan orang-orang yang masih setia meninggalkan Lelebbata-Watampone dan berangkat ke Pattiro. Namun setibanya di Pattiro untuk mengikuti anjuran dari Sultan Alauddin untuk menerima Islam hasilnya tetap mendapat penolakan. Akhirnya baginda berangkat ke Tallo untuk memperdalam ilmu agama pada seorang ulama besar yang bernama Datok ri Bandang dan mendapat tugas menyebarkan Islam di Bantaeng salah satu daerah di Sulawesi Selatan dan mangkat di daerah tersebut sehingga beliau disebut *Matinroe ri Bantaeng*.

Setelah *musu selleng* (perang Islam), Raja Bone ke 12 yaitu La Tenripale Toakkepeang Sultan Abdullah Matinroe ri Tallo yang memerintah antara 1611-1625 dan rakyatnya menerima Islam, maka bagindapun berangkat ke Gowa untuk mempelajari Islam pada Khatib Tunggal, Dato Ri Bandang yang menekankan pada pelajaran syareat dan ilmu Kalam (Sewang, 2010: 86).

Raja Bone ke 13 La Maddaremmeng dengan gelar Sultan Muhammad Saleh yang memerintah antara 1625-1640. Pada masa pemerintahannya dibentuk suatu organisasi pejabat "*Sara*" yang termasuk aspek "*panggadereng*". Pada zaman pemerintahan La Maddaremmeng diangkat pula pejabat-pejabat *Sara* (*parewa*

sara) yang terdiri dari orang-orang bangsawan yang medapat gelar "Petta" seperti Petta Kalie, Petta Imam, parewa syara ini terdiri atas seorang kadi untuk seluruh kerajaan, beberapa Imam, beberapa bilal, beberapa Mukim dan Amil sesuai dengan jumlah masjid yang ada di kerajaan. Para *parewa syara* ini mengatur urusan-urusan atau upacara-upacara keagamaan seperti maulid, *isra' mi'raj*, Id di Istana raja (Abdullah, 1992: 246).

Kedudukan Raja Bone setelah masuknya Islam yakni raja yang diangkat diberi gelar Sultan dalam pemerintahan dan tetap ada lembaga khusus menangani soal-soal keagamaan, rumah ibadah secara langsung diawasi oleh kerajaan, catatan harian menggunakan tahun Hijriyah.

La Maddaremmeng sebagai Arungpone terkenal sebagai raja yang melaksanakan ajaran Islam secara murni dan konsekwen. Baginda pun mengharapkan agar sikapnya itu diteladani pula oleh negeri-negeri tetangganya, seperti Soppeng, Wajo dan Aja'tappareng. Lontara Bone menyebut bahwa Raja Bone La Maddaremmeng sangat keras menjalankan perintah syariat Islam perintahnya antara lain ialah supaya memerdekakan hamba sahaya semua *ata* harus dihapuskan atau dibebaskan dan tidak boleh seorang muslim mempunyai hamba sahaya, sebagaimana yang tercantum dalam *Lontara* sebagai berikut:

*Ia'na mapparentangngi Ri tau Bone pamaradekai sininna
ata Rialae ri musue, kuaetopa ata ridoirie ia muata manue
miennennungeng wedding mui Ri Puata anae ri agi lese
Bolae. Padatosa si ajingnge iamani turusiwi parentana ritu
maserroi manggelli* (Mattulada, 1985: 372).

Artinya:

Ia memerintahkan kepada orang Bone supaya ia memerdekakan seluruh hamba (orang) yang dianggap selama dalam perang, begitu pula hamba sahaya yang dibeli, namun yang hanya bisa diperhamba kecuali hamba yang dipelihara dalam rumah saja. Sebagaimana yang dianggap keluarga yang taat pada pemerintah dan menjauhi yang dilarang.

Kebijaksanaan La Maddaremmeng itu ditentang oleh banyak raja dan kaum bangsawan, termasuk ibunda La Maddaremmeng sendiri. Para penentang itu menghimpun tenaga di bawah pimpinan ibunda La Maddaremmeng, ialah We Tenrisoloreng Makkalarue yang juga memerintah sebagai Datu di Pattiro. Lalu La Maddaremmeng memerintahkan menggempur mereka di Pattiro yang dijadikan sebagai basis pertahanan. Oleh karena merasa tidak cukup kuat menghadapi gempuran itu, Ibunyapun bersama para penentang lainnya meninggalkan Pattiro menyingkir ke Gowa. Maksudnya untuk meminta perlindungan dan bantuan untuk menghadapi Raja Bone. Sultan Malikus Said, Raja Gowa, dengan mudah menyatakan kesediannya. Kemudian Sultan Malikus Said mengirim utusan untuk meminta jawaban Raja Bone terhadap tiga soal yakni:

Apakah raja dalam tindakannya itu berdasarkan Sunnah nabi, atau mengambil adat lama, atau semata-mata mengikuti kesenangan pribadi sendiri? Bila berdasarkan yang pertama maka raja Gowa meminta dalilnya, bila berdasarkan yang kedua, maka dia akan bersedia bekerjasama, tetapi bila berdasarkan yang ketiga, maka raja Bone harus dienyahkan karena rakyat yang tertindas adalah

sahabat Gowa. Raja Bone tidak memberi jawaban dan pasukan tentara Makassar bergerak ke negeri itu dan menaklukkannya setelah tigakali pertempuran, memaksa Raja Bone meninggalkan negeri itu serta menjadikan Bone sebagai propinsinya (Arnold, 1979: 334).

Sampai dimana validitas berita di atas tidak diketahui, namun Gowa setuju membantu dan ini merupakan peluang yang baik bagi Gowa untuk mencoba menaklukkan kerajaan Bugis satu-satunya yang tidak takluk kepada kekuasaan Gowa. Dari segi lain, A. Rahman Rahim (2011: 162) mengemukakan alasan yang dipergunakan Gowa untuk menghadapi Kerajaan Bone ialah: a) Untuk membela si Ibu yang telah dilanggar kepentingannya oleh anaknya sendiri; dan b) hendak memulihkan kembali ketertiban masyarakat yang telah dirusak oleh tindakan La Maddaremmeng. Gowa melakukan tindakan yang diplomatis, tetapi cara ini tidak dapat melawan keteguhan La Maddaremmeng. Terjadilah pertempuran yang hebat, Gowa yang dibantu sekutu-sekutunya seperti Wajo, Sidenreng dan lain-lain menyerang Bone secara besar-besaran pada tahun 1643, yaitu tiga tahun setelah La Maddaremmeng menggempur kaum pembangkang di Pattiro.

Apa yang akan disebutkan disini selain dari keteguhan La Madaremmeng yang menyebabkan tidak ragu menyebarkan dan melaksanakan ajaran Islam di dalam wilayah kerajaannya, yang menyebabkan dia bersedia membela kebijaksanaannya menghapuskan perbudakan dengan peperangan yang sengit yang berlangsung hampir satu tahun lamanya, pada tahun 1644 beliau tertangkap di Cimpu, lalu beliau tawan dan dibawa ke Gowa dan

diasingkan di Desa Sanrangang (Rahim, 2011: 135) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 1644 (Mattulada, 1985: 70).

Kedudukan dan posisi La Madaremmeng dalam menyebarkan pelaksanaan Islam dalam elit Kerajaan Bone A. Rahman Rahim mengemukakan bahwa:

Apakah artinya apabila La Madaremmeng sebagai Raja Bone ke-13 yang berusaha menghapuskan perbudakan sebagai salah satu pelaksanaan ajaran Islam yang dipeluknya dengan taat, harus diperangi oleh Gowa di bawah Sultan Malikussaid yang melanjutkan pimpinan Kerajaan Gowa, Sultan Alauddin, ayahnya yang telah menyampaikan Islam ke Bone. Pastilah bahwa tindakan Gowa itu bukan karena hendak menumpas usaha pelaksanaan ajaran Islam. Gowa adalah pelopor pengislaman di negeri-negeri Bugis. Rupanya politik yang ikut main, yaitu usaha untuk menaklukkan Bone di bawah Gowa. Kalau ini yang menjadi sebabnya, maka kepeloporan tadi telah dikalahkan oleh kepentingan politik. La Madaremmeng telah melakukan suatu usaha yang utama... (Rahim, 2011: 165).

Melihat dari kegiatan raja-raja dalam penyebaran Islam di Kerajaan Bone tidak terlepas dari usaha mereka selaku penguasa dalam kepemimpinannya. Namun dalam pelapisan sosial tetap membawa implikasi yang lebih jauh antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Raja tetap mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif yang dimiliki raja semakin menambah akumulasi kekuasaannya yang sekaligus berdampak pada kedudukannya sebagai penguasa tertinggi

Kekuasaan raja tersebut diatas juga tampak pada pemilikan sumber daya alam, seperti tanah dan sawah,

bahwa masyarakat lapisan bawah hanya boleh memiliki sawah atau tanah yang tidak subur, sebagaimana juga dikemukakan oleh Bakkers di bawah ini:

Tanah, setidaknya sawah-sawah, sebagian besar menjadi milik raja. kerabatnya, *hadat*, para pangerang serta orang-orang penting, sawah-sawah yang dimiliki orang-orang kecil pada umumnya adalah yang paling jelek dan paling tidak produktif (Putra, 1988: 131).

Posisi raja yang menguasai sumber daya alam tersebut juga turut menopang dan memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin yang kharismatik. Raja atau Mangkau yang diyakini berasal dari keturunan Tomanurunge, dipandang oleh masyarakat selaku wakil Tuhan di bumi posisi yang demikian tinggi membuat orang selalu memberikan penghormatan dan ketaatan tertentu kepada rajanya. Namun hal tersebut setelah Islam mengalami perkembangan di kerajaan Bone maka sedikit demi sedikit terjadi pergeseran bahwa sekarang ini yang dianggap penguasa tertinggi bukan lagi dari keturunan raja melainkan kekuasaan dalam partai politik yang terpilih dalam artian kepala daerah (Bupati).

Kesimpulan

Penerimaan Islam sebagai agama resmi Kerajaan Bone, merupakan titik awal dari penyebaran Islam dalam konstitusi dan struktur sosial politik. Penyebaran ajaran Islam di Kerajaan Bone tidak berarti mengubah semua pranata politik yang telah mapan. Tetapi pada umumnya pranata sosial politik yang telah ada tetap dipertahankan,

kemudian diisi dan dilengkapi dengan pranata baru yang berasal dari Islam, seperti yang ada pada *Pangadareng*

Pangadareng adalah konstitusi Kerajaan Bone yang terdiri dari empat unsur pokok yang terintegrasi dalam membangun kehidupan sosial politik masyarakat Bone, yaitu *ade*, *rapang*, *wari* dan *bicara*. Setelah masuknya agama Islam beberapa perubahan telah terjadi secara berangsur-angsur, perubahan ini semakin kentara pada waktu *sara'* menduduki tempat lima. *Sara'* di samping memberikan perubahan yang bersifat *meniadakan* (ata/perbudakan), ia juga bersifat *menambah* (qadi termasuk imam, dan lain-lain, masjid dan mushalla) juga penerapan hukum munakahat (perkawinan) dan hukum *faraid* (pembagian warisan), dan *menggabung* (struktur pemerintahan) (Rahim, 2011: 158). Apabila dicermati perubahan ini dapat di golongan ke dalam perubahan yang memang diperlukan. Kesemua perubahan tersebut tidak melemahkan nilai-nilai yang sudah ada bahkan sebaliknya lebih memperkuat.

Dalam struktur kerajaan, Raja Bone berperan sebagai *Petta Mangkaue ri Bone*" yang berarti Tuanku yang berdaulat dan duduk di atas tahta Kerajaan di Bone. *Mangkau* dalam Kerajaan Bone menduduki puncak piramida dalam struktur sosial kerajaan, sehingga dapat dikatakan menempati posisi sentral dalam penyebaran Islam pada domain sosio politik Kerajaan Bone.

BAB 6

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Penyebaran dan kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Kedatangan Islam awalnya melalui perdagangan Internasional dan penyebaran atau penyampaiannya secara lebih mendalam oleh para muballigh yang berasal dari luar atau dari Indonesia sendiri. Penyebaran Islam di Indonesia bahkan di wilayah Asia Tenggara melalui berbagai jalur: perdagangan, pernikahan, memasuki birokrasi, sufisme, pendidikan (Pesantren) dan Kesenian.

Setidak-tidaknya terdapat tiga pola penyebaran Islam di Indonesia, yaitu: pertama, kota menjadi pusat perdagangan dan sebagai basis komunitas muslim dan dari sinilah penguasa setempat di-Islam-kan. Dalam hal ini istanalah yang mengambil tempat penyebaran Islam, seperti Kerajaan Gowa-Tallo, Bone, Wajo dan Bima. Kedua, kaum para pembesar kerajaan yang berguru ke pusat pendidikan Islam, seperti Ternate yang berguru ke Giri, Gresik. Dan Ketiga, kesultanan Islam memberikan bantuan kepada suatu kerajaan untuk menaklukkan kerajaan lainnya seperti Kerajaan Demak membantu Kerajaan Banjar dalam rangka menaklukkan Kerajaan Daha, dengan syarat peguasanya harus terlebih dahulu masuk Islam.

Jika merujuk kepada teori yang dikembangkan oleh J. Noorduyn (1956: 248), proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu melalui tiga tahap *pertama*,

kedatangan Islam, *kedua*, penerimaan Islam dan *ketiga*, penyebaran Islam lebih lanjut.

Pertama, Kedatangan Islam, agama Islam sudah sampai di Makassar sejak Raja Gowa ke 10, Tunipallangga (1546-1565), yaitu ketika memberikan izin kepada pedagang-pedagang Melayu dengann perantara Nahkoda Bonang, untuk menetap di Mangalekana. Selanjutnya pada masa Raja Gowa ke 12, Tujinallo, telah didirikan sebuah masjid bagi orang-orang Islam di Mangalekana. Apakah benar belum ada orang Makassar atau Bugis memeluk Islam ketika itu, kalau pedagang Melayu dapat diberikan izin dan beberapa hak istimewa oleh raja Gowa, sejak Raja Gowa ke 10, apakah tidak terdapat alasan untuk berpendapat bahwa hubungan persaudaraan antara pemeluk-pemeluk agama Islam kepada orang Makassar dan Bugis, oleh karenanya pada tahap ini kemungkinan telah ada penduduk setempat yang menerima Islam (Mattulada, 2011: 46).

Kedua, Penerimaan Islam, keadaan kedatangan Islam di atas mematangkan diterimanya Islam oleh Raja Gowa dan Tallo, pada permulaan abad ke 17. Dengan demikian Islam yang diterima oleh Kerajaan Gowa dan Tallo bukanlah suatu kebetualn melainkan suatu yang telah bertumbuh dan lahir secara wajar sesuai hukum-hukum perkembangan suatu jalan hidup keagamaan (Mattulada, 2011: 46).

Dalam Lontara yang dipakai sebagai sumber primer terdapat beberapa perbedaan mengenai waktu penerimaan Islam Raja Gowa dan Tallo. Meminjam teori yang dikemukakan oleh J. Noorduyn (1956: 253) mengenai perbedaan awal penerimaan Islam secara resmi hanya merupakan satu perbedaan, jadi hanya kesalahan penulisan, oleh karenanya berdasarkan sumber-sumber yang ada, pada hari Kamis malam/malam Jumat tanggal 22 September 1605 M /9 Jumadil 1014 H. Dinyatakan bahwa yang mula-mula mengucapkan syahadat ialah mangkubumi Kerajaan

Gowa/Raja Tallo, I Malingkaeng Daeng Manyonri bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam, dan sesudah itu barulah Raja Gowa 14, Mangaranggi Daeng Marambia bergelar Sultan Alauddin.

Dalam histografi tradisional "*Lontarak Wajo*" ulama Islam yang meng-Islam-kan kedua raja dan rakyatnya dikenal dengan nama *Datuk Tellua*. Dalam Lontara disebutkan bahwa *Datuk Tellua* itu yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal bergelar Dato 'ri Bandang, berasal dari Kota Tengah Minangkabau yang mengajarkan syariat Islam sebagai langkah dalam dakwah yang dalam penyebarannya ia dibantu oleh kedua rekannya yang juga berasal dari Sumatra untuk penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, Sulaiman Khatib Sulung bergelar Dato' Pattimang dan Khatib Bungsu bergelar Dato Itiro. Mereka sengaja didatangkan Sultan Aceh, Sultan Sidi Mukammil ke Sulawesi Selatan untuk menghadang misi Kristen yang telah menyebarkan agamanya yang sudah sedemikian intensif.

Kemudian dalam masa dua tahun berikutnya seluruh rakyat Gowa dan Tallo telah memeluk agama Islam, peristiwa ini ditandai dengan melakukan sholat Jumat untuk kali pertama pada 9 Nopember 1607 M/9 Rajab 1016 H. Sholat Jumat ini memiliki arti penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, karena setelah itu pelaksanaan sholat Jumat itu Raja Gowa ke 14, Sultan Alauddin, mendekritkan bahwa Kerajaan Gowa sebagai Kerajaan Islam dan pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Ketiga, Penyebaran Islam lebih lanjut, setelah Kerajaan Gowa dan Tallo menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan menjadikannya sebagai pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Hal ini didasarkan pada konversi (paseng) persahabatan raja-raja terdahulu yang sudah lama terikat bahwa barang siapa yang menemukan jalan baru akan menyampaikan dan

menyebarkannya kepada raja-raja yang lain. Sesuai dengan tuntutan itu Raja Gowa menyampaikan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan bahwa Islam adalah jalan yang baik.

Penyebaran agama Islam diadakan dalam seruan-seruan baik yang diajukan oleh Raja Gowa 14, Sultan Alauddin, seruan pengislaman ini diterima dengan baik pula di beberapa kerajaan seperti di Kerajaan Sawitto, Balanipa di Mandar, Bantaeng dan Selayar, sampai disini berlangsunglah penyebaran Islam dengan cara-cara damai. Lain halnya ketika penyebaran agama Islam memasuki wilayah kerajaan-kerajaan Bugis (Bone, Wajo dan Soppeng) menolak ajakan Kesultanan Gowa, sehingga Gowa memaklumkan perang kepada mereka. Empat kali Gowa mengirimkan pasukannya ke tiga kerajaan itu, pertama kali dalam tahun 1608, akan tetapi Gowa dapat dikalahkan oleh kerajaan Bugis yang tergabung dalam aliansi *Tellu Poccoe*. Pada tahun-tahun berikutnya kerajaan Bugis dikalahkan satu persatu. Berturut-turut Soppeng (1609), Wajo (1610) dan Bone (1611).

Dengan demikian proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, zona Kerajaan Gowa-Tallo dan zona Kerajaan Bone memiliki perbedaan. Dimana pada zona Kerajaan Gowa-Tallo proses penyebaran Islam berlangsung damai tanpa melalui perang. Sebaliknya pola penyebaran Islam di zona Kerajaan Bone justru melalui jalan perang pengislaman. Karena itu Islam tersebar di Kerajaan Bone setelah melalui penaklukan Kerajaan Bone yang menginvasi Kerajaan Bone termasuk Soppeng dan Wajo yang masuk dalam Tri Aliansi *Tellupoccoe*, yang menjadi benang merah dari penolakan Kerajaan Bone tersebut ialah sebab yang menyeru adalah Gowa yang memiliki jejak rekam dan citra negatif yang berambisi menghegemoni kerajaan-kerajaan Bugis "Kerajaan Bone". Terlebih jika ajakan Kerajaan Gowa diterima oleh Kerajaan Bone berarti secara langsung

Kerajaan Bone mengakui otoritas Kerajaan Gowa, suatu hal yang tidak bisa diterima mengingat sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian jika mengacu kepada teori Louis Gottschalk (1985: 154-155) dalam membahas penyebab yang mendorong suatu peristiwa membedakan antara "sebab langsung" dan "sebab tidak langsung". Menurutnya, "sebab langsung" bukanlah sebab yang sesungguhnya; sebab langsung langsung hanyalah merupakan suatu titik dalam suatu peristiwa yang sekaligus menjadi pemicu dari penyebab yang sesungguhnya atau "sebab tidak langsung". Dengan demikian, dalam hubungannya dengan penyebaran Islam di Kerajaan Bone, *Musu Selleng* merupakan "sebab langsung" sedangkan "sebab tidak langsung" adalah keinginan Gowa, Sultan Alauddin, untuk menjadikan Gowa sebagai kerajaan yang kuat dari segi ekonomi dan politik. (Sewang, 2005: 153).

Setelah Kerajaan Bone dapat ditaklukkan dan resmi memeluk Islam, maka perang pengislaman yang dilakukan oleh Gowa dapat dianggap sudah berakhir, yang dampaknya sangat menguntungkan dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan sebab diringi dengan pengislaman terhadap raja-raja dan elit kerajaan yang ditaklukkan. Namun demikian, penyebaran Islam oleh Kerajaan Gowa ke Kerajaan-kerajaan Bugis selama empat tahun, dalam Lontara Bugis tercatat sebagai *Musu Selleng* (Perang Pengislaman).

Kerajaan Bone secara resmi menerima Islam pada tanggal 23 November 1611 kemudian Islam di Kerajaan Bone secara berangsur-angsur mengalami perkembangan dalam penyebarannya, Raja Bone ke 12, La Tenri Pale yang bergelar Sultan Abdullah menyeru kepada rakyatnya untuk menerima agama Islam. Pase selanjutnya adalah penyebaran ajaran Islam dan pemantapannya dalam sosio politik.

Penerimaan Islam sebagai agama resmi Kerajaan Bone, merupakan titik awal dari penyebaran Islam dalam konstitusi dan struktur sosial politik. Penyebaran ajaran Islam di Kerajaan Bone tidak berarti mengubah semua pranata politik yang telah mapan. Tetapi pada umumnya pranata sosial politik yang telah ada tetap dipertahankan, kemudian diisi dan dilengkapi dengan pranata baru yang berasal dari Islam, seperti yang ada pada *Pangadareng*

Pangadareng adalah konstitusi Kerajaan Bone yang terdiri dari empat unsur pokok yang terintegrasi dalam membangun kehidupan sosial politik masyarakat Bone, yaitu *ade*, *rapang*, *wari* dan *bicara*. Setelah masuknya agama Islam beberapa perubahan telah terjadi secara berangsur-angsur, perubahan ini semakin kentara pada waktu *sara'* menduduki tempat lima. *Sara'* di samping memberikan perubahan yang bersifat *meniadakan* (ata/perbudakan), ia juga bersifat *menambah* (qadi termasuk imam, dan lain-lain, masjid dan mushalla) juga penerapan hukum munakahat (perkawinan) dan hukum *faraid* (pembagian warisan), dan *menggabung* (struktur pemerintahan) (Rahim, 2011: 158). Apabila dicermati perubahan ini dapat di golongankan ke dalam perubahan yang memang diperlukan. Kesemua perubahan tersebut tidak melemahkan nilai-nilai yang sudah ada bahkan sebaliknya lebih memperkuat.

Dalam struktur kerajaan, Raja Bone berperan sebagai *Petta Mangkaue ri Bone*" yang berarti Tuanku yang berdaulat dan duduk di atas tahta Kerajaan di Bone. *Mangkau* yang berasal dari keturunan *Tomanurung*, *Mata Silonipoe Manurunge ri Matajang*, di percaya sebagai seorang penyelamat yang mempunyai pribadi yang istimewa, wakil Tuhan di Bumi. Konsep *Tomanurung* sebagai raja dengan rakyat selalu tampil hak dan kewajiban yang digariskan oleh rakyat. Memang rakyatlah yang menyebutnya *Tomanurung*. Dengan demikian, *Tomanurung* diakui dan diangkat secara

resmi berdasarkan kontrak pemerintahan sebagai suatu perbuatan hukum bukan kejadian sosiologis semata (Rahim, 2011: 66).

Secara geneologi konsep *Tomanurung* mengalir keketurunan (Sewang, 1997: 221), artinya seorang *Mangkau* dalam struktur Kerajaan Bone menduduki puncak piramida dalam struktur sosial kerajaan, sehingga dapat dikatakan kedudukan raja dalam penyebaran Islam menempati posisi sentral dan titik awal dalam penyebaran Islam dalam kehidupan politik dan sosial di Kerajaan Bone, sebagaimana yang dideskripsikan oleh Uka Tjandrasasmita bahwa, "if their governors and nobles adopted a new religion, they would readily follow, as in their tradition in different degree their king or sultans were regarded as divine representatives in this world" (Tjandrasasmita, 1896: 24). Jika penguasa dan kalangan bangsawan mengadopsi suatu agama baru, mereka secara spontanitas akan diikuti, sebagaimana dalam adat mereka dalam derajat yang berbeda-beda kalangan raja dan sultan acapkali disublimasi sebagai representasi Tuhan di muka Bumi.

KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Hamid, 1985. *Manusia Bugis Makassar*. Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press.
- Abdullah, Taufik, 1985. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Abdullah, Wan Muhd. Shagir, 1977. *Syeikh Yusuf Tajul Khalwati dalam Majallah DIAN Daiges*, bilangan 96, Kelantang, Malaysia: Sharikat Dian Sendirian Berhard.
- Abdurrahim dan Ridwan Borahima, 1974. *Sejarah Kerajaan Tallo (Suatu Transkripsi Lontara)*. Ujung Pandang: Pemda Tkt. I Sulsel bekerjasama dengan P3NBS Sulsel.
- Abdin, A. Zaenal, 1999. *Kapita Selekta Sejarah Sulawesi Selatan*, Makassar: Hasanuddin University Press.
- Ali, Andi Muhammad, 1984. *Rupa'na Bone Perang Bone 1905*. Watampone: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- _____, 1969. *Bone Selajang Pandang*. Watampone: Dikbud Kab. Bone.
- Ali, Mukti, 1970. "Faktor-faktor Penyiaran Islam", dalam *Islam, Alim Ulama dan Pembangunan*. Jakarta: Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

- Ali SS, R. Mohammad, 1966. *Penentuan Arti Sejarah dan Pengaruhnya Dalam Metodologi Sejarah Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Ahmad, A. Kadir, 2003, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis.
- Arnold, Thomas W., 1968, *The Preaching of Islam*. Lahore: Ashraf.
- Arnold, Thomas W., 1979. *The Preaching of Islam*, diterjemahkan oleh Nawawi Rambe, *Sejarah Da'wah Islam*. Jakarta: Wijaya.
- Atjeh, Aboebakar, 1985. *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*. Cet. IV; Solo: Ramadhani.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1990/1411, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi, 1415 H/1995, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi, 2002. *Islam Nusantara: Jaringan Global & Lokal*. Bandung: Mizan.
- Baloch, N.A., 1980, *The Advent of Islam in Indonesia and Some Problems Related to the History of the Early Muslim Period*, dalam Majalah al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga, No. 22 XV.
- Boechari, Sidi Ibrahim, 1971. *Sedjarah Masuknja Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*. Jakarta: Publicita.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982. *Upacara Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan.

_____, 1981/1982. *Laporan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah di kabupaten Bone*, Suaka Penionggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sulawesi Selatan 1981/1982.

Djajadiningrat, P.A. Hoesein, 1963. "Islam Nusantara" dalam Kenneth Morgan (ed.), *Islam Jalan Mutlak*. Djakarta: Pembangunan.

Drewes, 1986. "Pemahaman Baru tentang Kedatangan Islam di Indonesia", dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain, *Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.

Enre, Fakhruddin Ambo, 1983. "Ritumpanna Walenrenge: Telaah Filologis Sebuah Episode Sastra Bugis Klasik Galigo" Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Farid, Andi Zainal Abidin, 1970. *Lontara Sebagai Sumber Sedjarah Terpendam (Masa 1500-1800)*. Makassar: Lembaga Penelitian Hukum Fak. UNHAS.

_____, 1982. "Lontara Sulawesi Selatan sebagai Sumber Sejarah", dalam Andi Rasdiyanah (ed.), *Bugis - Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia* (Ujungpandang: IAIN Alauddin).

- Farid, Ali Abidin, 1976. *Wajo Pada Abad XIV-XVI: Suatu Penggalan Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara*", Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gottschalk, Louis, 1985. *Mengerti Sejarah* diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press.
- Graaf, H.J. De, 1989. "Islam di Asia Tenggara Sampai Abad ke-18", dalam Azyumardi Azra (Penyunting dan Penerjemah), *Perpektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadimuljono, Abd. Muttalib, 1979. *Sejarah Kuno Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Kanwil SPSP Prop. Sul-Sel.
- Hamid, Abu, 1982. "Selayang Pandang Uraian tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-Makassar, dalam Andi Rasdiyanah Amir (ed.), *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia (Selayang Pandang tentang Beberapa Aspek)*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin.
- Hamid, Andi Mansur, 1988/1989. "Musu' Selleng ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah Wajo", dalam *Bingkisan Bunga Rampai Budaya No. 1*. Ujung Pandang: YKSS/Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Hamid, Pananrangi, 1991. *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng*. Ujung Pandang: Balai Kajian Jarahnitra.

- Hamka, 1979. *Sejarah Ummat Islam*, Jilid IV, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamzah, Aminah P. 1979. *Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemda TK. I Sulawesi Selatan.
- Hasymy, A., 1981, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)*. Cet. I; Bandung: Al-Ma'arif.
- Hidayat, Komaruddin, et.all, 2006. *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Bandung: Mizan.
- Gottschalk Louis, 1985, *Mengerti Sejarah* diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press.
- Kamaruddin, dkk. 1985/1986. *Pengkajian Trasliterasi dan Terjemahan Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok*. Ujung Pandang: Depdikbud Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo.
- Kartodirjo, Sartono, 1998, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 - 1900, dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia.
- _____, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1997. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasijanto, 2001. "Sejarah Maluku Utara dalam Susastra Modern Indonesia", dalam Leirizza Jalur Sutera: *Integrasi Laut-Darat dan Ternate sebagai Bandar*

Jalur Sutera, Prolog dalam Ade Kamaluddin et.all, (ed): *Ternate Bandar Jalur Sutera*. Ternate: LinTas.

Koentjaraningrat, 1958, *Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Universitas.

Leur, J.C. van., 1955. *Indonesia Trade and Society*. Bandung: The Hague.

Lewa Aminulla, 1984, *Aru Palakka Dalam Perang Dan Damai*, Pemerintah Daerah TK. I Prof. SulSel, Ujung Pandang.

Ligtvoet, A., 1880. " Transcriptie van het Dagboek der Vorsten van Gowa en Tallo, met Vertalung en Aanteekeningen" dalam *BKI deel V*.

Lombard, Denys, 2008, *Le Carrefour Javanais: Essai d'histoire globale II Les reseaux asiatique*, diterjemahkan oleh Winarsih, et. All., dengan judul *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Mangemba, H.D., 1956. *Kenallah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Timun Mas.

Maknun, Tadjuddin, 2010. "Lontarak: Arti, Asal Usul dan Nilai Budaya yang dikandungnya". Dalam Kennedy Nurham (ed.) *Industri Budaya dan Budaya Industri*. Jakarta: Kemenbudpar RI.

- _____, 2011. *Fenomena-fenomena Budaya India/Hindu di Sulawesi Selatan dan Barat*, "Makalah", Makassar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- Mappanganra, Suriadi dan Irwan Abbas, 2003. *Sejarah di Sulawesi Selatan*. Cet. I; Makassar: Bidang Agama Biro KAAP Sekretariat Popinsi Sulawesi Selatan bekerja sama Lamacca Press.
- _____, 2003, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca Press.
- Mattulada, 1975, *Islam di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- _____, 1974. *Bugis Makassar, Manusia dan Kebudayaan*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- _____, 1982. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Cet. I; Ujung Pandang: Bakti Baru Berita Utama.
- _____, 1983. "Islam di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 1983. "Minangkabau dalam Kebudayaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan", dalam A.A.Navis (ed), *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik* (Padang: Genta Singgalang Press,

- _____, 1983. *"Islam di Sulawesi Selatan"* dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial).
- _____, 1985, *Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____, 1995. *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.
- Kruger, Th. Muller, 1959. *Sejarah Gereja di Indonesia*. Djakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Muljana, Slamet, 1992. *Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, Harun, 1991. *Falsafah Agama*. Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang.
- Nur, Azhar, *et.al.*, 2000. *Lontara Manurungnge ri Tompo Tika*. Ujung Pandang: Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makssar.
- Noorduyn, J. 1975, *Origin of Soauth Celebes Historical Writing* termuat dalam Soedjatmoko (ed.), *An Introduction to Indonesian Historiography*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- _____, 1972. *"Islamisering van Makassar"* diterjemahkan dengan Judul *Islamaisasi Makassar*, oleh S. Gunawan Bhratara, Jakarta.

- _____ 1987. "Makassar abd The Islamization of Bima" dalam BKI deel 143, KILTV.
- _____ 1964. "Sedjarah Agama Islam di Sulawesi Selatan," dalam W.B. Sidjabat (ed), *Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- _____ 1995 "Asal Mula Histografi di Sulawesi Selatan:, dalam Soedjatmiko, dkk., *Histografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Notosusanto, Nugroho, 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu Pengalaman*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Nur, Azhar, 2009, *Tri Aliansi Kerajaan Bone - Soppeng - Wajo*. Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta.
- Oeman, A. Moerad, 1982. "Masuknya Islam di Indonesia Bahagian Timur dan Hubungannya dengan Aceh Darussalam" dalam Andi Rasdiyanah Amir (ed.), *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia (Selayang Pandang tentang Beberapa Aspek)*. Ujung Pandang: Alauddin.
- Palallo, Abd. Rahman Daeng, 1966. "Memperkenalkan Kampung Melayu dan Penduduknya", dalam *60 Tahun Kota Makassar*. Makassar: Percetakan Sejahtera.
- Patunru, Abdurrazak Daeng, 1967, *Sejarah Gowa*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makassar.

- Patunru, Abdurrazak Daeng, *et. al.*, 1993. *Sejarah Bone. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.*
- Pelras, Christian, 1973. *Sumber-sumber Kepustakaan Eropah Barat tentang Sul-sel*, Panitia Dies Natalis Fak. Hukum Unhas ke XXI.
- _____ 2006, "The Peoples of South-East Asia and the Pacific", diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Rahman Abu *et. all.*, dengan judul *Manusia Bugis*. Cet. I; Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris.
- Rahman, *et. all .*, *Peristiwa Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad ke XIV s/d XIX*, Edisi I. Ujungpandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 1985.
- Rahman, Ahmad dan Muhammad Salim, *Pelestarian dan Perkembangan Aksara Lontarak di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: t.p., 1996. Rasdiyanah, Andi, "Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) dengan Sistem Syari'at sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa", *Disertasi*. Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.
- Rahim, Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1985.

- Rahim, Abd., dan Ridwan Borahima, 1975. *Sejarah Tallo (Sebuah Transkripsi Lontara)*, Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung Pandang.
- Rasdiyanah, Andi, 1982. *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia (Selayang Pandang tentang Beberapa Aspek)*. Ujungpandang: IAIN Alauddin.
- _____, 1995, *Integrasi Sistem Pangngadereng (Adat) dengan Sistem Syari'at sebagai Pandangan Hidup dalam Lontarak Latoa*, Disertasi. Yogyakarta: 1995.
- Ricklefs, M.C., 1991. *Sejarah Nusantara Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robert H., 1993, *Perfektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, Alwi, 1998. *"The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia"* diterjemahkan oleh Ihzan Ali-Fauzi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Mizan
- Schrieke, B., 1966. *Indonesian Sociological Studies*, Van Hoeve Publishers LTD The Hague.
- Sessu, Amir, 1986. *Relung-relung Sejarah Tanah Bone, Peiode Legendaris ke Masa Kemerdekaan*, Jilid I. Watampone: Dikbud.
- Sewang M, Ahmad, 1997, *"Islamisasi Kerajaan Gowa (Pertengahan Abad XVI sampai pertengahan*

Abad XVII), *Disertasi*. Jakarta: PPs IAIN Syarif Hidayatullah.

———, 2002, *Penerapan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan (Tinjauan Historis dan Kultural)*, "Jurnal al-Hikmah". Makassar: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Alauddin Makassar.

Stavorinus, John Splinter, 1978. *Voyages to the East - Indies*, London: G.G. and J. Robinson, Paternoter, Rownt.

Suryabrata, Sumadi, 2003, *Metodologi Penelitian*. Cet. XIV; Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tjandrasasmita, Uka, 1976. "Masuknya Islam ke Indoensia dan Pertumbuhan Kota-kota Pesisir Bercorak Islam," dalam *Bulletin Yaperna No. 11 Th. III, Pebruari 1976*.

———, 1986. "The Arrival and Expansion of Islam in Indonesia in Realation to Southeast Asia," dalam Mulyono Sumardi (ed), *International Seminar on Islam in Southeast Asia*. Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah.

Thosibo, Anwar, 1984. "Pelayaran Orang Bugis-Makassar Abad XVII", Tesis. Yogyakarta: Universitas Cahjah Mada.

Yakub, TK. Ismail, 1979. *Peranan Pesantren dan Pengembangannya dalam Pembinaan Umat*, Panitia Mu'tamar DDI keXIV, 27 Mei di Pare-pare.

Young, Cho Tae, 2011. "Aksara Searang sebagai Wadah Pembinaan Tamaddun Islam di Sulawesi Selatan", Disertasi. Makassar: PPs Universitas Hasanuddin Makassar.

Yusuf, Mundzirin *et. all.*, (ed)., 2006. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka.

Wolhoff dan Abd. Rahirn, t.th. *Bingkisan Sedjarah Gowa*. Makassar: JKST.

LAMPIRAN – LAMPIRAN SENARI ISTILAH

<i>Ada</i>	:	Kata, amanat; pesan; sesuatu ucapan yang hampir bernilai undang-undang; persepakatan; <i>Ulu-ada</i> Persepakatan atau perjanjian yang disepakati oleh beberapa piha
<i>Ade'</i>	:	Adat-istiadat, tata-krama, kebiasaan
<i>Ade' Pitue</i>	:	Dewan kerajaan Bone yang terdiri atas 7 orang anggota, juga disebut <i>Matoa Pitu</i> (Tujuh tetua).
<i>Aru/Arung</i>	:	gelar raja/bangsawan Bone
<i>Bate Salapang</i>	:	"Sembilan Bendera", nama Dewan Penasehat di Gowa.
<i>Bicara</i>	:	Sabda, hukum; peraturan-peraturan hakim/raja. Bicara dalam panngadereng ialah semua keadaan yang bersangkutan paut dengan masalah peradilan
<i>Datu</i>	:	Gelar raja/bangsawan. Raja-raja Sulawesi Selatan yang digelar Datu antara lain Datu Luwu, Datu Soppeng dan Datu Pammana.
<i>Dewata</i>	:	Nama umum untuk dewa sebelum Islam
<i>Gelarang</i>	:	Kepala sebuah desa atau daerah, juga disebut raja bawahan

- Jannang* : Seorang yang menjalankan pemerintahan (Kerajaan Gowa) di negeri taklukan
- Karaeng* : Gelar untuk raja/penguasa (nahasa Makassar)
- Latoa* : "Cermin Para Raja" orang Bugis yang menampilkan kearifan orang-orang tua dan dijadikan petunjuk ke arah pemerintahan yang baik.
- Lamumpatue ri Timurung* : Persepakanatan antara Raja Bone, Arung Matowa Wajo, dan Datu Soppeng, di Timurung tahun 1582, yang sering disebut sebagai Tellu Bocco (Tiga Punak Kerajaan Besar Bugis)
- Musu' Selleng* : Peperangan Islam
- Matowa* : Kepala orang Wajo di Makassar
- Palili* : Kerajaan taklukan atau daerah bawahan yang memiliki otonomi di dalam menjalankan kekuasaan; mempunyai bendera (panji) dan alat-alat kerajaan (arajang) sendiri.
- Panngaderreng* : Wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan

		materiil dan non materiil. Sendi-sendi panngaderreng, yaitu: ade, bicara, rapang, wari dan sara.
<i>Paseng</i>	:	Ikrar
<i>Rapang</i>	:	Perumpamaan; bidal; contoh; kesamaan atau kias; salah satu ketentuan yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kejadian-kejadian yang pernah dilakukan pada waktu lalu. Karena rapang itu mappaseng rupa, memberi hukum kesamaan (analoog) atas persoalan yang sejenis. Di dalam Latoa, kata rapang itu disebut sebagai salah satu di antara sendi-sendi panngaderreng.
<i>Sara</i>	:	Syariat; hukum Islam; Penyelenggara hukum Islam disebut parewa sara yang dipimpin khadi, salah satu sendi darip panngaderreng.
<i>Sabandara</i>	:	Syahbandar
<i>Tellu Bocco</i>	:	Tiga Puncak Kerajaan Besar Bugis yaitu Bone, Soppeng dan Wajo
<i>Tomanurung/ Tumanurung</i>	:	"Yang turun dari (dunia) atas", tokoh dari dunia atas yang turun ke bumi dan menjadi penguasa pertama di kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar
<i>Tumarilalang</i>	:	Perantara antara penguasa/raja dengan perdana menteri

- Tumabbicarabutta* : "Juru bicara negeri", jabatan paling penting di Kerajaan Gowa, sering disamakan dengan perdana menteri.
- Ugi' /Wugi* : Bugis disebut *Ugi'* atau *Wugi*, dalam bahasa Makassar disebut *Bugisi'*, dalam bahasa Toraja *Bugi'* serta dalam bahasa Mandar dan Melayu disebut Bugis.
- Ulu ada* : Ikrar; persepakatan
- Ulukanaya ri*
- Calappa* : Persepakatan di Caleppa
- Wari* : perbuatan mappallai sennge (yang tahu membedakan) batas norma. Wari salah satu sendi panngaderreng yang menyangkut batas-batas hak dan kewajiban kekeluargaan; pewarisan dan lain-lain. Dalam hidup kenegaraan, wari berfungsi sebagai pranata yang menata negara.

Nama Raja-raja Bone sampai jatuhnya ke tangan Pemerintah Hindia Belanda 1905

1. Matasilompoé [Manurungngé ri Matajang] (1392-1424)
2. La Umassa Petta Panré Bessié [To' Mulaiyé Panreng] (1424-1441)
3. La Saliyu Karampélúwa/Karaéng Pélua' [Pasadowakki] (1441-1470)
4. We Ban-ri Gau Daéng Marawa Arung Majang Makaleppié Bisu-ri Lalengpili Petta-ri La Welareng [Malajangngé ri Cina] (1470-1490)
5. La Tenri Sukki Mappajungngé (1490-1517)
6. La Uliyo/Wuliyo Boté'é [Matinroé-ri Itterung] (1517-1542)
7. La Tenri Rawe Bongkangngé [Matinroé-ri Gucinna] (1542-1584)
8. La Icca'/La Inca' [Matinroé-ri Adénénna] (1584-1595)
9. La Pattawe [Matinroé-ri Bettung] (15xx - 1590)
10. We Tenrituppu [Matinroé ri Sidénréng] (1590-1607)
11. La Tenrirua [Matinroé ri Bantaéng] (1607-1608)
12. La Tenripalé [Matinroé ri Tallo] (1608-1626)
13. La Ma'daremméng Matinroé ri Bukaka (1626-1643)
14. Tobala', Arung Tanété Riawang, dijadikan *regent* oleh Gowa (1643-1660)
15. La Ma'daremméng Matinroé ri Bukaka (1667-1672)
16. La Tenritatta Matinroé ri Bontoala' (Arung Palakka) Petta Malampe'é Gemme'na Daéng Sérang (1672-1696)
17. La Patau Matanna Tikka Walinonoé To Tenri Bali Malaé Sanrang Petta Matinroé ri Nagauléng (1696-1714)
18. Batari Toja Daéng Talaga Arung Timurung Datu-ri Citta Sultana Zainab Zakiyat ud-din binti al-Marhum Sultan

- Idris Azim ud-din [Matinroé-ri Tippuluna] (1714-1715)
(masa jabatan pertama)
19. La Padassajati/Padang Sajati To' Apaware Paduka Sri Sultan Sulaiman ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din [Matinroé-ri Béula] (1715-1720)
 20. Bata-ri Toja Daéng Talaga Arung Timurung Datu-ri Citta Sultana Zainab Zakiat ud-din binti al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din [Matinroé-ri Tippuluna] (1715)
(masa jabatan kedua)
 21. La Pareppa To' Aparapu Sappéwali Daéng Bonto Madanrang Karaéng Anamonjang Paduka Sri Sultan Shahab ud-din Ismail ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din (1720-1721). Ia menjadi Sultan Gowa [Tumamenanga-ri Sompapu], Arumpone Bone, dan Datu Soppeng.
 22. I-Mappaurangi Karaéng Kanjilo Paduka Sri Sultan Siraj ud-din ibni al-Marhum Sultan 'Abdu'l Kadir (1721-1724). Menjadi Sultan Gowa dengan gelar Tuammenang-ri-Pasi dan Sultan Tallo dengan gelar Tomamaliang-ri Gaukana.
 23. La Panaongi To' Pawawoi Arung Mampu Karaéng Biséi Paduka Sri Sultan 'Abdu'llah Mansur ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din [Tuammenang-ri Biséi] (1724)
 24. Batari Toja Daéng Talaga Arung Timurung Datu-ri Citta Sultana Zainab Zakiat ud-din binti al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din [Matinroé-ri Tippuluna] (1724-1738)
(masa jabatan ketiga)
 25. I-Danraja Siti Nafisah Karaéng Langelo binti al-Marhum (1738-1741)
 26. Batari Toja Daéng Talaga Arung Timurung Datu-ri Citta Sultana Zainab Zakiat ud-din binti al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din [Matinroé-ri Tippuluna] (1741-1749)
(masa jabatan keempat)

27. La Temmassogé Mappasossong To' Appaware' Petta Paduka Sri Sultan 'Abdu'l Razzaq Jalal ud-din ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din [Matinroé ri-Malimongang] (1749-1775)
28. La Tenri Tappu To' Appaliweng Arung Timurung Paduka Sri Sultan Ahmad as-Saleh Shams ud-din [Matinroé-ri-Rompégading] (1775-1812)
29. La Mappatunru To Appatunru' Paduka Sri Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin [Matinroé-ri Lalengbata] (1812-1823)
30. I-Manéng Paduka Sri Ratu Sultana Salima Rajiat ud-din [Matinroé-ri Kassi] (1823-1835)
31. La Mappaséling Paduka Sri Sultan Adam Nazim ud-din [Matinroé-ri Salassana] (1835-1845)
32. La Parénréngi Paduka Sri Sultan Ahmad Saleh Muhi ud-din [Matinroé-ri Aja-bénténg] (1845-1858)
33. La Pamadanuka Paduka Sri Sultan Sultan Abul-Hadi (1858-1860)???
34. La Singkeru Rukka Paduka Sri Sultan Ahmad Idris [Matinroé-ri Lalambata] (1860-1871)
35. I-Banri Gau Paduka Sri Sultana Fatima [Matinroé-ri Bola Mapparé'na] (1871-1895)
36. La Pawawoi Karaéng Sigéri [Matinroé-ri Bandung] (1895-1905)
37. Haji Andi Bacho La Mappanyuki Karaéng Silaja/Selayar Sri Sultan Ibrahim ibnu Sri Sultan Husain (1931-1946) (*masa jabatan pertama*)
38. Andi Pabénténg Daéng Palawa [Matinroé-ri Matuju] (1946-1950)
39. Haji Andi Bacho La Mappanyuki Karaéng Silaja/Selayar Sri Sultan Ibrahim ibnu Sri Sultan Husain [Matinroé-ri Gowa] (1950-1960) (*masa jabatan kedua diangkat oleh belanda*).

RIWAYAT PENULIS



Rahmawati Lahir di Bone 12 Juni 1969, kini menjabat sebagai Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, membina mata Kuliah Sejarah Islam. Meraih gelar Sarjana (SI) Pada Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1993, pada Jurusan Sejarah dan kebudayaan Islam. Memperoleh gelar

magister pada tahun 2008 di UMI Makassar jurusan sejarah peradaban Islam dan untuk sementara dalam penulisan disertasi pada Universiti Utara Malaysia (UUM). Penulis telah menerbitkan Buku dan beberapa tulisan dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan jurusan yang digeluti yaitu Sejarah Islam.



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

